



Li
Surya

LAPORAN HASIL PENELITIAN MANDIRI

**PERAN PEREMPUAN PESISIR DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA BAHARI DESA MADELLO KABUPATEN BARRU
SULAWESI SELATAN**

Oleh :

Dra. Hj. Surya Dewi, MM., CHE

**DIBIYAI DENGAN DIPA POLTEKPAR MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR:
040.01.2.538869/2021 KODE KEGIATAN: 5349.009.052.A MAK.521119**

**JURUSAN: PERJALANAN
PROGRAM STUDI: MENAJEMEN KONVENSI & PERHELATAN
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
2021**

**PERAN PEREMPUAN PESISIR DALAM PENGEMBANGAN
PARIWISATA BAHARI DESA MADELLO KABUPATEN BARRU
SULAWESI SELATAN**

Oleh :

Dra. Hj. Surya Dewi, MM., CHE

**DIBIYAI DENGAN DIPA POLTEKPAR MAKASSAR TAHUN ANGGARAN 2021
DENGAN SURAT PERJANJIAN PELAKSANAAN PENELITIAN NOMOR:
040.01.2.538869/2021 KODE KEGIATAN: 5349.009.052.A MAK.521119**

**JURUSAN: PERJALANAN
PROGRAM STUDI: MENAJEMEN KONVENSI & PERHELATAN
POLITEKNIK PARIWISATA MAKASSAR
2021**

PENGESAHAN HASIL PENELITIAN PENELITIAN

1. Identitas penelitian
 - a. Judul Penelitian : Peran Perempuan Pesisir Dalam Pengembangan Pariwisata Bahari Di Sulawesi Selatan.
 - b. Bidang Kajian : Eksploratif Reachers
 - c. Jenis Penelitian : Kualitatif
 2. Peneliti
 - a. Nama Lengkap & Gelar : Dra. Hj. Surya Dewi, MM., CHE
 - b. Gol. Dan Ruang : Pembina- IV/a
 - c. Jabatan : Dosen
 3. Lokasi Penelitian : Sulawesi Selatan
 4. Lama Penelitian : 3 Bulan
-

Mengetahui:
Ketua Jurusan/Prodi

Makassar, Oktober 2021
Ketua Peneliti,

DR. Andi Hasbi., A.Md.Par., S.Sos., MM
NIP: 19720922 1998031001

Dra. Hj. Surya Dewi,MM
NIP: 19680404199303

Menyetujui:
Kepala PPPM POLTEKPAR MAKASSAR

Drs. Darmayasa, S.Pd., M.Pd
NIP: 19650829199603 1 001

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas berkah dan rahmat-Nya yang telah dilimpahkan-Nya, pada akhirnya kami dapat membuat proposal Penelitian individu sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Penelitian individu ini mempunyai tujuan untuk memenuhi salah satu kewajiban/tugas dalam tri darma perguruan tinggi dilingkungan akademik Politeknik Pariwisata Makassar. Pada penyusunan proposal penelitian ini banyak pelajaran dan hikmah baik dari substansi penelitian maupun dalam proses menyelesaikan usulan proposal penelitian ini. Dalam penyusunan proposal Penelitian ini, peneliti mengangkat judul **Peran Perempuan Pesisir Dalam Pengembangan Pariwisata Bahari Desa Madello Kabupaten Barru Sulawesi Selatan.**

Penulis menyadari kelemahan serta keterbatasan yang ada sehingga dalam menyelesaikan proposal ini memperoleh bantuan dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Drs. Muhammad Arifin M.Pd., selaku direktur Polteknik Pariwisata Makassar.
2. Bapak Drs. Darmayasa M.Pd., selaku ketua P3M, yang telah memberikan kesempatan pada Penulis melakukan penelitian.
3. Para Dosen dan pengajar di lingkungan Politeknik Pariwisata Makassar atas sumbangan pemikiran dan saran.
4. Pegawai Politeknik Pariwisata Makassar atas segala dukungan moril.

Penulis menyadari bahwa proposal penelitian ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis namun juga bagi para pembaca.

Makassar, Oktober 2021

Peneliti

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melihat sejauh mana peran perempuan dalam pengembangan pariwisata bahari di desa Madello Kabupaten Barru. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, adapun pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian lapangan ditemukan bahwa 1) peran perempuan pesisir di desa madello bergerak pada sektor ekonomi jasa dalam pembuatan sirup mangrove, olahan rumput laut, terasi dan pengolahan abon ikan yang tersebar di dusun Ujunge dan pulau Pannikiang. 2) potensi wisata yang dimiliki desa madello yakni garis pantai yang cukup panjang, di desa ini wisatawan dapat menikmati beberapa atraksi wisata antarlain pulau pannikiang, pantai ujunge, eduwisata di hutan mangrove, wisata kuliner dan snorkling; 3) pengembangan desa wisata dilakukan dengan cara memaksimalkan potensi yang dimiliki desa, membentuk kelompok wanita yang terbagi dalam 3 kelompok yakni kelompok wanita tani, kelompok ibu-ibu PKK dan kelompok majelis taklim.

Kata Kunci: Pengembangan, Wisata Bahari, Desa Madello

ABSTRACT

This study aims to see the extent of the role of women in the development of marine tourism in Madello village, Barru district. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, while data collection is done by means of observation, interviews and documentation. Based on research in the field, it was found that 1) the role of coastal women in Madello village was engaged in the service economy sector in the manufacture of mangrove syrup, processed seaweed, shrimp paste and fish shredded processing spread across Ujunge hamlet and Pannikiang island. 2) the tourism potential of Madello village, namely a fairly long coastline, in this village tourists can enjoy several tourist attractions including Pannikiang Island, Ujunge Beach, edutourism in the mangrove forest, culinary tours and snorkeling; 3) the development of tourist villages is carried out by maximizing the potential of the village, forming a women's group which is divided into 3 groups, namely a group of women farmers, a group of PKK women and a group of taklim councils.

Keywords: *Development, Marine Tourism, Madello Village*

DAFTAR ISI

PENGESAHAN HASIL PENELITIAN PENELITIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
ABSTRAK.....	vi
<i>ABSTRACT</i>	vii
DAFTAR ISI	viii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat/Kegunaan Penelitian.	12
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
A. Defenisi dan Pengertian Perempuan Pesisir	13
B. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan	14
C. Peran Garda Perempuan.....	16
D. Pengembangan Pariwisata	21
E. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir	27
F. Partisipasi Masyarakat	39
G. Desa Wisata.....	43
BAB III	49
METODE PENELITIAN.....	49
A. Jenis Penelitian	49
B. Lokasi Penelitian	49
C. Jenis dan Sumber Data	49
D. Instrumen Penelitian.....	51

E. Teknik Pengumpulan Data.....	51
BAB IV.....	55
GAMBARAN LOKASI PENELITIAN.....	55
A. Sejarah Desa Madello	55
B. Kondisi Geografis.....	56
C. Kondisi Geografis.....	58
D. Sistem Kekerabatan dan Perkawinan.....	61
E. Sistem Agama dan Kepercayaan	63
F. Struktur Organisasi Desa	63
G. Dusun Ujunge Sebagai Perkampungan KB.....	64
BAB V.....	67
HASIL DAN PEMBAHASAN	67
A. Peran perempuan pesisir di Desa Madello dalam pengembangan pariwisata bahari.....	67
B. Potensi yang dimiliki Desa Madello sehingga dapat dijadikan sebagai Desa Wisata Bahari.....	94
C. Pola pengembangan Desa Wisata yang sesuai dengan Desa Madello sebagai Kampung KB dalam meningkatkan partisipasi perempuan.....	105
D. Analisis Peran dan Pemberdayaan Perempuan.....	117
BAB VI.....	148
PENUTUP	148
A. Kesimpulan	148
B. Saran.....	150
DAFTAR PUSTAKA.....	152

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara kepulauan yang menjadikannya memiliki banyak wilayah pesisir. Wilayah pesisir adalah wilayah yang memiliki kekhasan tersendiri. Setiap harinya wilayah pesisir di dominasi oleh penduduk wanita dan anak-anak karena umumnya suami dan remaja pria pergi melaut. Ada nelayan yang melaut sehari-hari, tetapi ada juga nelayan biasa yang hanya melaut di malam hari, sehingga ibu atau istri memegang tanggung jawab kehidupan sehari-hari dalam keluarga. Oleh karena itu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga nelayan lebih di titik beratkan pada kaum wanita. Wanita-wanita di daerah pesisir dapat menjadi motor penggerak kegiatan ekonomi produktif masyarakat pesisir sehingga meningkatkan fungsinya dari ibu rumah tangga biasa menjadi pencari nafkah. Sebagian besar aktivitas perekonomian dikawasan pesisir ini melibatkan kaum perempuan. Dalam sistem pembagian kerja tersebut kaum perempuan justru menempati peran strategi sebagai penguasa aktivitas ekonomi pesisir. Dampak dari sistem pembagian kerja ini kaum perempuan bisa mendominasi dalam urusan ekonomi rumah tangganya (Kusnadi, 2001).

Keadaan pendapatan nelayan yang tidak menentu secara langsung mempengaruhi berbagai aspek kehidupan para nelayan di Kabupaten Barru, khususnya di Desa Madello, mulai dari segi ekonomi, kesehatan tingkat pendidikan yang dapat diperoleh keluarga nelayan, gaya hidup, dan lain-lain. Pemenuhan

kebutuhan hidup dalam keluarga nelayan tidak akan pernah tercukupi apabila hanya mengandalkan pekerjaan pokok saja.

Gambaran kondisi seperti ini akhirnya membuat ibu rumah tangga yang sebelumnya hanya menjalankan peran reproduktif (peran domestik/ peran dalam rumah tangga), kemudian terjun dalam sektor produktif dengan ikut serta menopang perekonomian keluarga. Peran serta perempuan dalam menghasilkan uang menjadi salah satu alternatif untuk menyiasati kekosongan penghasilan nelayan di musim paceklik, dan meningkatkan daya tahan ekonomi keluarga nelayan.

Pengembangan objek wisata beserta fasilitas pendukungnya tentunya akan membawa pengaruh bagi penduduknya, khususnya mereka yang berada di sekitar wilayah pesisir. Hal ini tampak terutama dinegara-negara sedang berkembang yang tentunya masyarakatnya masih memiliki pendapatan per kapita yang cukup rendah. Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa pembangunan pariwisata lebih banyak menghasilkan kerugian dalam hal sosial dan kebudayaan pembangunan di sektor yang lainnya (Khumaini 2002). Pendapat semacam ini muncul akibat banyak pemerintah di negara-negara sedang berkembang mengabaikan masyarakat setempat (lokal) dalam membangun objek-objek wisata, bahkan tidak jarang mereka terpaksa pindah ketempatlain. Pembangunan pariwisata juga sering dituduh penyebab perubahan budaya masyarakat lokal. Banyak tradisi dan kesenian yang semula terintegrasi ke dalam agama setempat lalu lama-kelamaan berubah dan dikemas dalam hitungan ekonomi.

Kontribusi sektor pariwisata dapat dilihat secara konkrit, tetapi aspek aspek ekonomi yang dicanangkan dalam pembangunan pariwisata, aspek sosial pun perlu memperoleh porsi perhatian dalam pengembangan pariwisata tersebut (Hairurrozi 2019). Oleh karena itu, pengembangan sektor wisata perlu mengkaitkan antara aspek sosial dan ekonomi secara terpadu sebab kedua aspek tersebut merupakan pengembangan pariwisata itu sendiri. Dengan demikian, tujuan akhir pengembangan pariwisata adalah untuk dinikmati, tidak hanya oleh wisatawan, tetapi juga oleh masyarakat setempat.

Oleh karena itu, munculnya pariwisata yang ada di suatu daerah perlu mempertimbangkan peluang kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Demikian juga perkembangan pariwisata juga harus mempertimbangkan hal tersebut. Secara teoritis sektor pariwisata akan banyak memunculkan kesempatan kerja yang dapat dimanfaatkan oleh kaum perempuan. Dengan semakin banyaknya kaum perempuan yang memasuki wilayah kerja kaum laki-laki, tentunya akan membawa masalah masalah gender yang semakin menarik. Akan tetapi fenomena ini terus berdampak pada upaya-upaya peningkatan perempuan dalam berbagai sektor (Afrina et al. 2019).

Jika pembangunan dan juga pengembangan kawasan wisata hanya didominasi oleh satu kelompok saja, maka dapat dipastikan akan muncul kesenjangan di masyarakat. Oleh karena itu partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat sangat dibutuhkan, namun realita yang terjadi tidak semua kelompok masyarakat mau dan bersedia untuk ikut berpartisipasi aktif. Kaum laki-laki justru lebih mendominasi, tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran kaum

perempuan juga dibutuhkan dalam dalam setiap proses pembangunan dan pengembangan kawasan wisata.

Menurut konsep ibuisme, kemandirian perempuan tidak dapat dilepaskan dari perannya sebagai ibu dan istri, perempuan dianggap sebagai makhluk sosial dan budaya yang utuh apabila telah memainkan kedua peran tersebut dengan baik. Fenomena *house wifization* karena peran utama perempuan adalah sebagai ibu rumah tangga yang harus memberikan tenaga dan perhatiannya demi kepentingan keluarga tanpa boleh mengharapkan imbalan, prestise serta kekuasaan. Keterlibatan perempuan melakukan peran ganda merupakan perilaku atau tindakan sosial yang diharapkan dapat menciptakan stabilitas dan harmoni keluarga. Ibu-ibu dari keluarga yang berpenghasilan rendah, umumnya melakukan peran ganda karena tuntutan kebutuhan hidup bagi keluarga. Meskipun suami berkewajiban sebagai pencari nafkah yang utama dalam keluarga hal ini tidak menutup kemungkinan bagi istri untuk bekerja sebagai penambah penghasilan keluarga dan tentunya bertujuan untuk mencapai tingkat kesejahteraan (Ryanne, 2015).

Kontribusi perempuan dalam pembangunan diabaikan karena: (1) pekerjaan perempuan diasosiasikan dengan proses natural (alamiah); (2) pekerjaan perempuan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan menjamin kebutuhan untuk hidup; (3) pekerjaan ini tidak dipertimbangkan berkontribusi terhadap penerimaan *Gross National Product* (GNP) dan tidak dijadikan sebagai indikator pembangunan (Lingga, 2021).

Peranan perempuan mulai diperhitungkan sebagai salah satu penunjang pembangunan. Hal ini dapat terlihat bukan hanya pada ranah sosial saja, pada ranah politik yang selama ini cenderung menjadi ranah kaum pria, tetapi saat ini sudah mulai dimasuki kaum perempuan dengan hadirnya UU No. 10 tahun 2008 tentang pemilihan umum yang mengharuskan setiap partai untuk memuat / mencalonkan paling sedikit 30% keterwakilan perempuan. Terbukanya ruang bagi kaum perempuan, diharapkan kaum perempuan melalui program pemberdayaan dapat meningkatkan kesejahteraan keluarganya.

Terjadinya pergeseran paradigma pembangunan berdampak positif terhadap perempuan. Perempuan senantiasa dipandang bukan sebagai beban pembangunan. Perempuan memiliki berbagai posisi strategis untuk mendukung kegiatan pembangunan. Oleh karena itu, upaya pengembangan potensi perempuan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara adalah sebuah keharusan sebagai bentuk pemberdayaan dari ketidakberdayaan (powerless) perempuan selama ini (Remiswal, 2013:1).

Partisipasi perempuan dalam pembangunan di segala bidang mutlak sangat diperlukan, karena merupakan sebagai modal dasar dalam pembangunan. Untuk mensejajarkan tenaga kerja perempuan dalam konsep-konsep kerja bukan semata-mata masalah mengejar kepentingan segi ekonomis atau peningkatan pendapatan, akan tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan partisipasi atau peranan perempuan dalam masyarakat.

Salah satu sumber daya yang sangat terabaikan dalam proses pembangunan selama ini adalah bidang kelautan dan perikanan. Sumber daya kelautan dan perikanan ini menyimpan potensi ekonomi besar. Sektor kelautan dan perikanan memiliki peluang strategis untuk dijadikan sumber pertumbuhan baru bagi bangsa Indonesia agar bisa keluar dari cengkaman krisis ekonomi (Kusnadi, 2013:1).

Pada kenyataannya sampai hari ini keberadaan masyarakat pesisir sangat menopang kemandirian bangsa mengingat banyak potensi yang dimiliki seperti potensi fisik, potensi pembangunan, potensi sumber daya pulih (renewable resources), potensi sumber daya tidak pulih, potensi geopolitis, proses sumber daya manusia dan pariwisata.

Sebagian besar kegiatan ekonomi yang dimasuki oleh kaum perempuan pesisir, istri nelayan, di sektor pengolahan hasil ikan, seperti industri pemindangan, pengeringan ikan, perdagangan ikan segar, dan pembuatan petis. Kaum perempuan juga bekerja di industri rumah tangga pembuatan kerupuk ikan dan rengginang, yang menggunakan bahan baku ikan laut. Selebihnya, mereka bekerja di sektor jasa, seperti membuka toko yang menjual barang-barang kebutuhan konsumsi penduduk setempat. Dilihat dari kedudukannya dalam aktivitas pekerjaan-pekerjaan di atas, perempuan pesisir bisa berperan sebagai pemilik usaha atau sebagai pekerja. Sebagian besar kaum perempuan memerankan diri sebagai pekerja di sektor usaha tersebut. Kalaupun istri nelayan memiliki usaha mandiri, biasanya skala usahanya bersifat kecil menengah. Sangat sedikit kaum perempuan pesisir yang memiliki usaha ekonomi berskala besar (Kusnadi, 2013:78).

Istri nelayan yang bekerja, khususnya rumah tangga nelayan kecil atau buruh nelayan, merupakan “pintu pembuka” untuk melakukan mobilitas sosial atau mobilitas vertikal. Jika keberhasilan ekonomi atau kesuksesan hidup bisa diraih maka orientasi kerja itu tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga semata, tetapi juga untuk memenuhi kebutuhan sosial lainnya.

Sektor pariwisata merupakan sektor perekonomian yang sangat penting dan sebagai penggerak kegiatan jasa dan perdagangan lokal. Dinamika sosial-ekonomi desa sangat di tentukan oleh produktivitas sumberdaya perempuan yang juga menjadi tulang punggung kegiatan rumah tangga nelayan. Oleh karena itu, jika perempuan pesisir mampu mengambil peran dalam pengembangan pariwisata desa bahari di desa Madello maka akan sangat menjanjikan bagi keberlangsungan ekonominya. Keterlibatan perempuan dalam sektor pariwisata bahari biasanya pada industri pengolahan dan perdagangan hasil laut, kerajinan tangan, dan pada sektor ekonomi seperti membuka warung atau toko.

Peran perempuan dalam pariwisata berbasis komunitas masih minim, padahal keterlibatan perempuan menjadi kunci sukses keberhasilan pengelolaan pariwisata dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ideal nya keterlibatan serta partisipasi antara laki-laki dan perempuan bersifat sejajar karena keduanya berperan dalam kemajuan lokasi pariwisata itu sendiri (Mu'tamaroh and Pantiwati 2020). Namun faktanya memang berbicara lain. Berdasarkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Argryo Demartoto (2012), berkaitan dengan kehadiran perempuan dan mengenai pariwisata dengan judul pemberdayaan perempuan dalam pariwisata berbasis komunitas (studi kasus di tiga desa wisata di Jawa Tengah),

menyingkap beberapa fakta yang sangat menarik. Argryo Demartoto dalam penelitian menjelaskan bahwa, tiga desa wisata di Jawa Tengah yaitu Desa Bejo Kabupaten Karanganyar, Desa Kliwonan Kabupaten Sragen, dan Desa Samiran Kabupaten Boyolali diketahui bahwa “jumlah perempuan yang terlibat dalam pengelolaan kawasan wisata berbasis komunitas ini jumlahnya jauh lebih sedikit ketika dibandingkan dengan kaum laki-laki.

Upaya untuk meningkatkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan pariwisata ramah lingkungan dapat dilakukan melalui peran asosiasi kelompok swadaya yang memungkinkan perempuan untuk mendapatkan kontrol lebih besar atas sumber daya seperti kepemilikan materi, sumber daya intelektual seperti pengetahuan, informasi, ide dan pengambilan keputusan di rumah, masyarakat, maupun bangsa. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Suja (2012) dalam penelitiannya di Tamil Nadu tahun 2012 yang menyatakan bahwa asosiasi tersebut memiliki perhatian pada peningkatan keterampilan, memfasilitasi penemuan baru, memperoleh akses ke kredit dari lembaga keuangan untuk usaha mikro, menanamkan hidup hemat dan pengawasan kredit untuk perempuan miskin. Menurutnya, perempuan dapat mencapai kekuasaan, jika dia memiliki status layak secara finansial, sosial dan budaya. Hal itulah yang disebut pemberdayaan. Lebih lanjut diungkapkan oleh Radel (2012) bahwa aliansi cukup berhasil dalam memenuhi kepentingan konservasi, memberikan kontribusi terhadap mata pencaharian perempuan, dan meningkatkan posisi relatif mereka dalam rumah tangga dan masyarakat melalui perubahan dalam kontrol gender pengambilan keputusan sumber daya.

Desa Madello adalah salah satu desa di Kabupaten Barru yang terdapat di Kecamatan Balusu yang berjarak kurang lebih 15 kilometer dari pusat Kabupaten Barru. Desa Madello ini merupakan salah satu desa yang diarahkan oleh pemerintah Kabupaten Barru untuk menjadi kampung KB karena angka kelahiran yang tidak terkontrol, rata-rata penduduk di desa ini bermata pencaharian sebagai nelayan. Desa Madello memiliki garis pantai yang cukup panjang dengan sajian pemandangan alam yang indah, kapal-kapal nelayan terparkir rapih di tepi pantai. Pada sore dan pagi hari wisatawan disajikan aktivitas keseharian nelayan.

Begitu pula halnya yang dialami oleh para perempuan pesisir di Desa Madello. Perempuan pesisir di Desa Madello memilih untuk bekerja ditengah kesibukan yang harus mereka jalankan sebagai ibu rumah tangga. Kebanyakan dari mereka memilih bekerja sebagai penjual dan pengolah hasil laut demi meningkatkan daya tahan ekonomi keluarga. Alasan utama mereka memilih pekerjaan ini adalah karena waktunya yang tidak terikat (fleksibel) dan bahan bakunya mudah untuk didapatkan. Jadi mereka masih memiliki waktu untuk mengerjakan pekerjaan mereka sebagai ibu rumah tangga yang bertugas untuk mengurus kebutuhan pribadi anak-anak beserta suami. Mereka menyadari bahwa mereka harus berperan aktif agar kebutuhan dalam keluarga mereka bisa terpenuhi. Mereka tahu sebagian besar tanggungjawab kelangsungan hidup sehari-hari pada keluarga tersebut ada ditangan perempuan sebagai ibu sekaligus ayah. Peran serta perempuan dalam menghasilkan uang menjadi salah satu alternative untuk menyiasati kekosongan penghasilan nelayan di musim paceklik, dan menambah daya tahan ekonomi rumah tangga nelayan di saat musim panen.

Kawasan Desa Madello sebagai kampung KB di Kabupaten Barru memiliki potensi pariwisata berupa wisata pantai maupun keragaman budaya, namun kawasan ini juga mengalami kerusakan lingkungan sehingga pariwisata harus dikelola dengan baik agar mampu mendukung keberlanjutan sumber daya yang ada sebagai daya tarik wisata. Permasalahannya, interaksi perempuan dalam pengembangan pariwisata diabaikan, sehingga Kebijakan tersebut belum mampu menarik kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas perempuan dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Barru.

Pemberdayaan perempuan di desa Madello dibagi kedalam tiga kelompok, pertama; Kelompok perempuan yang dibentuk oleh dinas pertanian yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT), kedua; Kelompok perempuan yang dibentuk oleh pemerintah Desa Madello adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan ketiga; Kelompok Majelis Taklim yang dibentuk oleh PKK. Kurangnya perhatian pemerintah dalam pemberdayaan perempuan pada sektor pariwisata di Desa Madello menjadi perhatian penulis, potensi alam wisata pantai yang dimiliki oleh desa Madello semestinya dikembangkan menjadi desa wisata sehingga pemberdayaan perempuan dalam pembangunan tidak hanya terbatas pada sektor domestik saja. Melihat beragam potensi yang dimiliki, Desa Madello layak untuk dikembangkan sebagai tujuan wisata yang menarik dan potensial, namun kenyataannya pada saat ini potensi yang dimiliki belum dikembangkan secara maksimal, hanya potensi hasil laut saja yang dimanfaatkan dan dikelola dengan baik.

Penelitian ini berusaha untuk menggali keterlibatan peran perempuan dalam pembangunan pariwisata di Kabupaten Barru dengan judul “**Peran Perempuan Pesisir Dalam Pengembangan Pariwisata Bahari Desa Madello Kabupaten Barru Sulawesi Selatan**)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut;

- 1) Bagaimana peran perempuan pesisir di Desa Madello dalam pengembangan pariwisata bahari?
- 2) Apa saja potensi yang dimiliki Desa Madello sehingga dapat dijadikan sebagai Desa Wisata Bahari?
- 3) Bagaimana pola pengembangan Desa Wisata yang sesuai dengan Desa Madello sebagai Kampung KB dalam meningkatkan partisipasi perempuan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut;

- 1) Untuk mengetahui peran perempuan pesisir di Desa Madello dalam pengembangan pariwisata bahari.
- 2) Untuk memetakan potensi yang dimiliki Desa Madello sehingga dapat dijadikan sebagai Desa Wisata Bahari.
- 3) Untuk menganalisis pola pengembangan Desa Wisata yang sesuai dengan Desa Madello sebagai Kampung KB dalam meningkatkan partisipasi perempuan.

D. Manfaat/Kegunaan Penelitian.

Adapun manfaat dari penelitian ini sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

1. Dapat di jadikan sebagai langkah awal analisa tentang bentuk pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Madello melalui peranan ibu rumah tangga dalam kegiatan sosial ekonomi lokal pada sektor pariwisata bahari sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rumah tangganya.
2. Dapat menjadi rekomendasi bagi perencanaan di masa yang akan datang sebagai dasar penajaman program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat nelayan di Desa Madello Kabupaten Barru.

b) Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah, diharapkan dapat memerikan masukan sehingga kedepanya dapat lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaan pengembangan desa wisata pesisir berbasis partisipatif perempuan.
2. Bagi Masyarakat, sebagai informasi mengenai kerjasama pengembangan desa wisata pesisir berbasis partisipasi yang memiliki kontribusi besar dalam pemberdayaan potensi lokal agar terciptanya lapangan pekerjaan yang optimal dan berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Defenisi dan Pengertian Perempuan Pesisir

Perempuan pesisir adalah istilah bagi kaum perempuan yang hidup dikawasan pesisir, baik yang hidup dilingkungan keluarga dengan aktivitas sebagai nelayan maupun yang dilingkungan pesisir dengan aktivitas mencari nafkah diluar kehidupan sebagai nelayan.

Orang pesisir memiliki orientasi yang kuat untuk merebut dan meningkatkan kewibawaan atau status sosial. Mereka sendiri mengakui bahwa mereka cepat marah, mudah tersinggung, lekas menggunakan kekerasan, dan gampang cenderung balas membalas sampai dengan pembunuhan. Orang pesisir memiliki rasa harga diri yang amat tinggi dan sangat peka. Perasaan itu bersumber pada kesadaran mereka bahwa pola hidup pesisir memang pantas mendapat penghargaan yang tinggi (Boelaars, 1984: 62).

Masyarakat pesisir itu sendiri dapat didefinisikan sebagai kelompok orang atau suatu komunitas yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Masyarakat pesisir ini terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, *supplier factor* sarana produksi perikanan. Bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari; penjual jasa pariwisata, penjual jasa

transportasi, dan kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pasir untuk menyokong kehidupannya (Bengen, 2001).

B. Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan

Ukuran partisipasi perempuan dalam pembangunan seperti yang disampaikan Sofiani (2009) dapat dilihat dari peran perempuan sebagai pelaku, pengendali, pengambil keputusan, penasehat dan penerima manfaat pembangunan. Partisipasi mengandung makna adanya keterlibatan khususnya masyarakat dalam tahap-tahap kegiatan pembangunan baik secara mental dan emosi seseorang didalam kelompok yang mendorong orang tersebut untuk berperan dan ikut bertanggungjawab dalam pelaksanaan kegiatan guna pencapaian tujuan kelompok.

Perempuan, terutama dari kalangan miskin seringkali menjadi penerima informasi kedua karena tidak pernah terlibat dalam rembuk-rembug yang diselenggarakan untuk memecahkan permasalahan masyarakat. Memang di beberapa tempat kehadiran perempuan dalam penentuan keputusan terjadi walaupun jumlahnya relatif kecil, akan tetapi seringkali suaranya kalah dengan suara laki – laki yang jumlahnya cukup besar, bahkan kadang-kadang mereka hanya ikut hadir tetapi tidak bisa memberikan suaranya. Padahal rembuk-rembug yang dilakukan warga merupakan aset yang besar sebagai modal sosial untuk melibatkan masyarakat dalam proses memecahkan persoalan kehidupan mereka. Kondisi ini seringkali berpengaruh dalam proses pengambilan keputusan yang pada gilirannya dapat berakibat adanya kebijakan-kebijakan yang tidak memihak pada kebutuhan perempuan. Untuk itu menjadi strategis ketika melibatkan perempuan dalam proses

pembangunan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan monitoring dan evaluasi (PNPM, 2008). Hal ini disebabkan:

- 1) Sebagai penghargaan terhadap perempuan sebagai manusia yang merdeka yang berhak untuk menentukan pemecahan masalah yang dihadapinya.
- 2) Pemecahan masalah-masalah, termasuk masalah kemiskinan yang menyangkut perempuan akan lebih tepat apabila dibicarakan bersama dengan perempuan.
- 3) Memberi kesempatan kepada perempuan untuk menjalankan tanggung jawab sosialnya sebagai manusia
- 4) Potensi yang besar yang dipunyai oleh perempuan, akan sangat berarti apabila digunakan bukan hanya untuk sektor domestik akan tetapi juga dalam sektor publik sehingga dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
- 5) Keterlibatan dalam semua proses pembangunan memberikan kesempatan untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi yang sama.

Langkah-langkah untuk merealisasikan hak perempuan ialah dengan menghapus adanya perbedaan, disparitas/kesenjangan atau keadaan yang merugikan perempuan (Sofyan, 2003). Langkah ini akan terealisasi ketika perempuan mendapat „ruang“ dalam aspek-aspek kegiatan baik dalam peran domestik maupun publik. Adanya kesetaraan dan keadilan antara laki-laki dan perempuan dalam berperan akan menghasilkan manfaat yang besar karena mereka bisa saling mendukung sesuai dengan potensi masing-masing yang dimiliki baik

perempuan maupun laki-laki. Sementara itu dari ketentuan perundangundangan dan kebijakan pemerintah yang dirumuskan menunjukkan konsistensi pemerintah masih tetap ada untuk berusaha menghapuskan diskriminasi dalam segala bentuk terhadap perempuan dan tetap mewujudkan prinsip-prinsip persamaan hak bagi perempuan di bidang politik, hukum, ekonomi dan sosial budaya.

C. Peran Garda Perempuan

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis dari penduduk dan status. Pendapat yang dikemukakan Soekanto, bahwa apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan. Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses jadi tepatnya peranan dapat dikatakan bahwa seseorang menduduki suatu posisi atau tempat dalam masyarakat serta menjalankan suatu peranan (Soekanto, 1987).

Menurut pandangan Max Weber melihat kenyataan sosial sebagai sesuatu yang didasarkan pada motivasi individu dan tindakantindakan sosial, tindakan yang nyata diarahkan kepada orang lain yang mungkin terjadi karena pengaruh dari situasi tertentu (Weber, 1964). Tindakan sosial disini dikaitkan dengan perilaku perempuan yang berperan ganda pada suatu masyarakat karena sebuah alasan dan situasi tertentu, seperti halnya masyarakat desa Madello bahwa perempuan disana banyak yang bekerja sebagai buruh pabrik dan pedagang ikan untuk pemenuhan kebutuhan keluarga. Tuntutan peran dan tugas, kedudukan, dan kewajiban yang pantas dilakukan oleh laki-laki atau perempuan sangat bervariasi disetiap masyarakat. Masyarakat yang menganut sistem patriarki, terdapat beberapa

kemiripan yang khas, misalnya hampir semua kelompok masyarakat menyerahkan tanggung jawab perawatan anak pada perempuan, sedangkan tugas mencari nafkah diberikan pada laki-laki. Pada kasus ini relasi gender berperan dalam pembagian peran, relasi gender diartikan sebagai hubungan antara laki-laki dan perempuan berkaitan dengan pembagian peran yang dijalankan masing-masing pada berbagai tipe dan struktur keluarga (keluarga miskin/kaya, keluarga desa/kota, keluarga lengkap/tunggal, keluarga punya anak/tidak punya anak, keluarga pada berbagai tahapan life cycle dan keluarga petani/nelayan) (Puspitawati, 2012).

Konsekuensi apabila perempuan bekerja, upah perempuan lebih rendah dibanding dengan upah laki-laki, bahkan pada jenis pekerjaan yang telah disosialisasikan selama berpuluh-puluh dan beratus-ratus tahun yang lalu. Kaitannya dengan beban ganda tersebut, Mosser (1999) menyebutkan bahwa perempuan tidak saja berperan ganda, akan tetapi perempuan memiliki *triple role* yaitu peran reproduksi, yang berhubungan dengan peran tradisional disektor domestik, peran produktif yang berhubungan dengan ekonomis disektor publik, dan peran sosial yang pada hal ini dimaksudkan dengan peran di komunitas sosial masyarakat (Mosser, 1999 dalam Megawangi). Pada *triple burden (triple role)* menurut Mosser ketiganya dilalui oleh perempuan Desa Madello, terutama pada peran reproduksi dan produktif. Peran reproduksi akan selalu ada dan hadir di dalam kehidupan keluarga, karena secara otomatis seorang perempuan akan mengalami dan merasakan peran tersebut. Peran produktif pada perempuan Desa Madello tercipta dari adanya sebuah kondisi yang mengharuskan perempuan ikut andil

dalam proses pencarian pendapatan untuk terpenuhinya kebutuhan keluarga (Fakih, 1996 dalam Jurnal Equilibrium Vol III, 2015).

Banyak perempuan yang dapat memegang peran ganda dengan bantuan dan dukungan suami mereka, ada pula yang dapat berbuat demikian sekalipun tanpa dukungan suami. Kerap kali umur mempengaruhi cara-cara suami melihat peran-peran istri. Pandangan kaum pria sebagian tergantung pada pendapat masyarakat ada waktunya sendiri. Pria yang berumur 50 tahun sampai 60 tahunan cenderung bersikap lebih konvensional tentang apa yang diharapkan dari istri dan wanita pada umumnya. Banyak dari kalangan wanita seusia itu mengungkapkan kesulitan yang mereka hadapi, bahkan perlawanan. Pria merasa bahwa perubahan dalam pola hidup itu merupakan ungkapan permusuhan, tantangan melawan adat dan barangkali kurangpercayaan pada kemampuan mereka sendiri untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Bahkan ada sementara pria yang meskipun menerima baik tambahan nafkah untuk anggaran belanja keluarga mengatakan bahwa mereka merasa tidak tentram mempunyai istri yang bekerja (Wolfman, 1993).

Berbagai perubahan yang mengakibatkan seorang perempuan harus terjun di dalam dunia pekerjaan salah satunya adalah untuk alasan pemenuhan kebutuhan. Pada masyarakat Desa Madello pembagian peran produktif dilakukan oleh para perempuan dengan alasan karena faktor ekonomi, namun disisi lain perempuan Desa Madello melihat bahwa peluang pekerjaan atau dalam hal ini sebagai buruh pabrik yang ditawarkan di daerah sekitarnya membuat mereka secara sukarela untuk bekerja. Hal tersebut juga nantinya akan dapat merubah bagaimana perilaku

perempuan atau para ibu rumah tangga, mulai dengan peranan sebagai istri dan ibu. Peranan seorang ibu pada anak-anak sangat besar, sehingga terdapat suatu kecenderungan bahwa peranan ibu mulai berubah. Perubahan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya :

- 1) Kesempatan bekerja semakin banyak bagi para perempuan
- 2) Adanya lembaga-lembaga pendidikan lanjutan yang terbuka bagi perempuan
- 3) Dibentuknya organisasi-organisasi perempuan yang ada kaitannya dari tempat bekerja suami (Elizabeth, 2014).

Pada point 1 disebutkan adanya kesempatan bekerja yang semakin banyak bagi perempuan, dalam hal ini akan berpengaruh pada peran seorang perempuan sebagai istri dan ibu. Pernyataan tersebut akan memunculkan perubahan-perubahan yang terjadi ketika seorang perempuan (istri atau ibu) bekerja. Hal ini Mansoer Fakih beranggapan bahwa kaum perempuan bersifat memelihara, rajin, dan tidak cocok menjadi kepala rumah tangga, maka akibatnya semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab perempuan. Oleh karena itu beban kerja perempuan yang berat dan alokasi waktu yang lama untuk menjaga kebersihan dan kerapian rumah tangga, mulai dari mengepel lantai, memasak, dan sebagainya.

Di kalangan keluarga miskin, beban berat harus dikerjakan sendiri, apalagi selain harus mengerjakan tugas-tugas domestik, mereka masih juga dituntut harus bekerja, sehingga perempuan miskin memikul peran ganda. Sedangkan bagi keluarga kaya, beban kerja ini kemudian dilimpahkan kepada pembantu rumah

tangga, inilah yang menjadi korban dari bias gender di masyarakat. Mereka bekerja berat lebih lama, tanpa perlindungan, hubungan mereka bersifat feodalistik dan perbudakan. Sebagai akibat bias gender, beban kerja diperkuat lagi dengan pandangan masyarakat bahwa semua pekerjaan yang dilakukan perempuan dalam rumah tangga dianggap sebagai “pekerjaan perempuan” karenanya dianggap rendah, dibanding jenis pekerjaan yang dianggap “pekerjaan laki-laki” dan dianggap tidak produktif, sehingga tidak diperhitungkan dalam statistik ekonomi negara (Fakih, 2013).

Pada pernyataan yang dipaparkan Mansoer Fakih nantinya akan peneliti kaitkan dengan penelitian ini, apakah hal tersebut akan sama dengan apa yang terjadi pada perempuan Desa Madello atau dengan perempuan bekerja akan menimbulkan perubahan baru pada masyarakat, bahwa perempuan ikut bekerja merupakan sebuah hal yang perlu diapresiasi atau hal yang tidak seharusnya dilakukan oleh seorang perempuan.

Peran laki-laki dan perempuan secara sosial, bukanlah sesuatu yang given dan kodrati sifatnya. Namun konstruksi peran sesungguhnya telah dibentuk jauh sebelum budaya dan perkembangan masyarakat mencapai titik didih kemajuan. Paling tidak, terdapat dua teori peran, yang bisa digunakan untuk melihat peran laki-laki dan perempuan. Tentu saja, yang dimaksud peran dalam konteks ini adalah peran sosial, yang dikonstruksi oleh masyarakat. Dua teori dimaksud adalah teori *nature* dan teori *nurture*. Kedua teori peran ini, pada tahap berikutnya senantiasa berjalan secara berlawanan. Laki-laki atau perempuan, tidak didefinisikan secara alamiah namun kedua jenis kelamin ini dikonstruksikan secara sosial. Menurut teori

Nurture, perbedaan laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Konstruksi sosial budaya selama ini menempatkan perempuan dan laki-laki dalam kelas yang berbeda (Megawangi, 1999).

D. Pengembangan Pariwisata

Pariwisata terlahir dari bahasa sansekerta yang komponen-komponen nya terdiri dari “Pari” yang artinya sempurna, lengkap, tertinggi, berkeliling “Wisata” yang artinya perjalanan, sehingga pariwisata berarti perjalanan yang lengkap atau sempurna (Arjana, 2016:6). Pariwisata juga bisa diartikan sebagai perjalanan atau berpergian yang dilakukan dengan cara berkeliling.

Pada hakikatnya berpariwisata adalah suatu proses kepergian sementara dari seseorang atau lebih menuju tempat lain diluar tempat tinggalnya. Dorongan kepergiannya adalah karena berbagai kepentingan, baik karena kepentingan ekonomi, sosial, kebudayaan, politik, agama, kesehatan, maupun kepentingan lain seperti karena sekedar ingin tahu, menambah pengalaman ataupun untuk belajar (Suwantoro, 2004:3).

Istilah pariwisata berhubungan erat dengan pengertian perjalanan wisata, yaitu sebagai suatu perubahan tempat tinggal sementara seseorang diluar tempat tinggalnya karena suatu alasan dan bukan untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan upah. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perjalanan wisata merupakan suatu perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau lebih dengan tujuan antara lain untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin

mengetahui sesuatu. Dapat juga karena kepentingan yang berhubungan dengan kegiatan olahraga untuk kesehatan, konvensi, keagamaan dan keperluan usaha yang lainnya (Suwanto, 2004: 9).

Menurut Muljadi Istilah pariwisata (*tourism*) baru muncul dimasyarakat kira-kira pada abad ke-18, khususnya sesudah Revolusi Industri di Inggris. Istilah pariwisata berasal dari dilaksanakannya kegiatan wisata (*tour*), yaitu suatu aktifitas perubahan tempat tinggal sementara dari seseorang, diluar tempat tinggal sehari-hari dengan suatu alasan apa pun selain melakukan kegiatan yang bisa menghasilkan upah atau gaji. Di lain sisi World Tourism Organization (WTO) menjelaskan pariwisata adalah kegiatan seseorang yang bepergian ke atau tinggal di suatu tempat di luar lingkungannya yang biasa dalam waktu tidak lebih dari satu tahun secara terus menerus, untuk kesenangan, bisnis ataupun tujuan lainnya (Muljadi, 2010:7).

Menurut Hunziker dan Kraf, pariwisata dapat didefinisikan sebagai keseluruhan jaringan dan gejala-gejala yang berkaitan dengan tinggalnya orang asing di suatu tempat, dengan syarat bahwa mereka tidak tinggal di situ untuk melakukan suatu pekerjaan yang penting yang memberikan keuntungan yang bersifat permanen maupun sementara (Muljadi, 2010:9).

Menurut Yoeti terdapat empat faktor yang harus ada dalam batasan suatu definisi pariwisata. Faktor-faktor tersebut adalah perjalanan itu dilakukan dari satu tempat ke tempat lain, tujuan perjalanan dilakukan semata-mata untuk bersenang-senang, tanpa mencari nafkah di negara, kota atau daerah tujuan wisata yang

dikunjungi, uang yang dibelanjakan wisatawan tersebut dibawa dari negara asalnya, perjalanan dilakukan minimal 24 jam atau lebih (Primadany dkk, 2012:137).

Menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan, yang dimaksud pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Secara umum pariwisata sebagai bagian dari kegiatan dalam sistem perwilayahan dapat diidentifikasi tiga unsur pembentuk terjadinya kegiatan wisata yaitu:

- 1) Ruang, merupakan tempat kegiatan pariwisata berlangsung
- 2) Manusia sebagai pelaku kegiatan wisata
- 3) Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang menghubungkan tempat asal wisatawan dan tujuan wisatanya (Wibowo dkk, 2013: 4).

Pitana dan Gayatri mengatakan bahwa pariwisata mencakup tiga elemen utama, yaitu :

- 1) *Adynamic element*, yaitu travel ke suatu destinasi wisata
- 2) *astatic element*, yaitu singgah di daerah tujuan, dan
- 3) *a consequetial element*, atau akibat dari dua hal di atas (khususnya terhadap masyarakat lokal), yang meliputi dampak ekonomi, sosial, dan fisik dari adanya kontak dengan wisatawan (Hermawan, 2016:107).

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa pariwisata yaitu suatu kegiatan perjalanan yang melibatkan orang-orang dengan tujuan yang berbeda-beda yaitu untuk mendapatkan kenikmatan dan memenuhi hasrat ingin mengetahui sesuatu yang baru dalam kurun waktu tertentu dan bukan mencari nafkah, dan juga dapat menimbulkan dampak ekonomi bagi masyarakat.

Menurut Yeoti, pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya (Primadany dkk, 2012:139).

Pengembangan pariwisata menjadi pilihan penting bagi suatu negara atau daerah karena multiefek yang ditimbulkan oleh kegiatan pariwisata. Pertumbuhan ekonomi merupakan dampak utama yang dicirikan oleh terbukanya lapangan kerja, stimulasi investasi sehingga berkembang produk wisata baik barang maupun jasa sehingga pariwisata terus berkembang. Dikemukakan oleh Marpuang pengembangan pariwisata tidak terlepas dari adanya daya tarik sampai adanya jenis pengembangan yang ditunjukkan oleh adanya penyediaan fasilitas dan aksesibilitas. Objek daya tarik wisata sangat erat hubungannya dengan travel motivation dan travel fashion (Arjana, 2016:119).

Ada beberapa hal yang menunjang atau menentukan pengembangan suatu objek wisata. Sedangkan menurut Ahdinoto dikutip dalam Mujadi A.J, beberapa

hal yang menunjang atau menentukan pengembangan objek wisata, ada lima jenis komponen dalam Pengembangan Pariwisata yaitu:

- 1) Atraksi wisata: atraksi adalah daya tarik yang memotivasi wisatawan untuk berkunjung atau berlibur. Atraksi bisa berupa alam seperti landscape, pantai, pegunungan, iklim, lembah: atraksi buatan seperti kota bersejarah, taman dan resort: atraksi budaya drama, festival, museum, galeri, dan atraksi sosial seperti kesempatan berbaur dengan masyarakat di daerah tujuan wisata dan ikut mengalami cara hidup bersama mereka. Atraksi yang diidentifikasi (sumber daya alam, sumber daya manusia, budaya dan sebagainya) perlu dikembangkan untuk menjadi atraksi wisata. Tanpa atraksi wisata, tidak ada pariwisata, bagian utama lain tidak akan diperlukan.
- 2) Promosi dan pemasaran: promosi adalah suatu rancangan untuk memperkenalkan atraksi wisata yang ditawarkan dan cara bagaimana agar atraksi dapat dikunjungi. Untuk perencanaan, promosi adalah bagian penting.
- 3) Pasar wisata (masyarakat pengirim wisata) : pasar wisata merupakan bagian yang penting. Walaupun untuk perencanaan belum/tidak diperlukan suatu riset lengkap dan mendalam, namun informasi mengenai trend perilaku, keinginan, kebutuhan, asal, motivasi dan sebagainya dari wisatawan perlu dikumpulkan dari mereka yang berlibur.

- 4) Transportasi: pendapat dan keinginan wisatawan adalah berbeda dengan pendapat penyuplai transportasi. Transportasi mempunyai dampak besar terhadap volume dan lokasi pengembangan pariwisata. Yang dimaksud dengan aksesibilitas adalah sarana yang memberikan kemudahan kepada wisatawan untuk mencapai daerah tujuan wisata.
- 5) Masyarakat menerima wisatawan yang menyediakan akomodasi pelayan jasa pendukung wisata (fasilitas dan pelayanan) (Suryani, 2018:57).

Komponen pengembangan pariwisata diatas dapat dipahami bahwa atraksi merupakan daya tarik yang akan melahirkan motivasi dan keinginan bagi wisatawan. Dalam melakukan perjalanan wisatawan memerlukan sarana yang memberikan kemudahan transportasi bagi wisatawan untuk mencapai ke suatu objek wisata serta fasilitas dasar seperti jalan raya, akomodasi, pusat informasi, pusat perbelanjaan yang kesemuanya perlu disediakan untuk membuat wisatawan merasa nyaman. Kualitas produk, komunikasi pemasaran, kebijakan harga, dan saluran pemasaran merupakan kegiatan untuk membangun citra wisata.

Banyak literatur yang menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata pada suatu daerah mampu memberikan dampak-dampak yang dinilai positif, yaitu dampak yang diharapkan, bahwa peningkatan pendapatan masyarakat, peningkatan penerimaan devisa, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha, peningkatan pendapatan pemerintah dari pajak dan keuntungan badan usaha milik pemerintah, dan sebagainya. Namun selain dampak terhadap ekonomi pengembangan

pariwisata juga berdampak terhadap lingkungan hidup, sosial dan budaya pada masyarakat.

E. Pemberdayaan Masyarakat Pesisir

Menurut Bengen, D.G. (2001), Populasi masyarakat pesisir didefinisikan sebagai kelompok orang yang tinggal di daerah pesisir dan sumber kehidupan perekonomiannya bergantung secara langsung pada pemanfaatan sumberdaya laut dan pesisir. Definisi inipun bisa juga dikembangkan lebih jauh karena pada dasarnya banyak orang yang hidupnya bergantung pada sumberdaya laut. Mereka terdiri dari nelayan pemilik, buruh nelayan, pembudidaya ikan dan organisme laut lainnya, pedagang ikan, pengolah ikan, supplier faktor sarana produksi perikanan. Dalam bidang non-perikanan, masyarakat pesisir bisa terdiri dari penjual jasa pariwisata, penjual jasa transportasi, serta kelompok masyarakat lainnya yang memanfaatkan sumberdaya non-hayati laut dan pesisir untuk menyokong kehidupannya.

Strategi pengembangan masyarakat pantai dapat dilakukan melalui dua pendekatan yaitu, yang bersifat struktural dan non struktural. Pendekatan struktural adalah pendekatan makro yang menekankan pada penataan sistem dan struktur sosial politik. Pendekatan ini mengutamakan peranan instansi yang berwenang atau organisasi yang dibentuk untuk pengelolaan pesisir laut. Dalam hal ini peranan masyarakat sangat penting tetapi akan kurang kuat karena aspek struktural biasanya lebih efektif bila dilakukan oleh pihak-pihak yang mempunyai kewenangan, paling tidak pada tahap awal. Dilain pihak pendekatan non struktural adalah pendekatan yang subyektif. Pendekatan ini mengutamakan pemberdayaan masyarakat secara

mental dalam rangka meningkatkan kemampuan anggota masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan dan persoalan pesisir laut. Kedua pendekatan tersebut harus saling melengkapi dan dilaksanakan secara integratif.

a. Pendekatan Struktural

Sasaran utama pendekatan struktural adalah tertatanya struktur dan sistem hubungan antara semua komponen dan sistem kehidupan, baik di wilayah pesisir dan laut maupun komponen pendukung yang terkait, termasuk komponen sosial, ekonomi dan fisik. Dengan penataan aspek struktural, diharapkan masyarakat mendapatkan kesempatan lebih luas untuk dapat memanfaatkan sumber daya alam secara berkelanjutan. Selain itu penataan struktur dan sistem hubungan sosial dan ekonomi tersebut diharapkan dapat menciptakan peluang bagi masyarakat untuk ikut serta melindungi sumber daya alam dari ancaman yang datang baik dari dalam maupun dari luar. Langkah ini diharapkan dapat mengurangi bahkan menghilangkan masalah-masalah sosial dan ekonomi yang utama yang selama ini secara terus menerus menempatkan masyarakat (lokal) pada posisi yang sulit. Pendekatan struktural membutuhkan langkah-langkah strategi sebagai berikut:

1) Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat pada Sumber Daya Alam.

Aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya alam adalah salah satu isu penting dalam rangka membangun perekonomian masyarakat. Langkah tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat untuk dapat menikmati peluang pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan (sustainable). Kesempatan tersebut selain dapat meningkatkan dan memelihara perekonomian masyarakat, juga diharapkan dapat mendorong

masyarakat supaya lebih aktif untuk melindungi lingkungan, baik dengan cara pemanfaatan yang ramah lingkungan maupun upaya secara aktif untuk menjaga dari kerusakan lingkungan. Selain itu, aksesibilitas masyarakat terhadap potensi perairan pesisir dan laut untuk transportasi dan pariwisata perlu ditingkatkan. Tujuan untuk kegiatan dan membuka lapangan kerja yang lebih luas bagi masyarakat setempat. Pengembangan sektor seperti kegiatan pariwisata dapat mendorong kegiatan masyarakat untuk ikut serta melindungi lingkungan terutama apabila pelaksanaannya dilakukan dengan tepat. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap sumber daya alam sangat diperlukan, karena sebagian besar masyarakat pantai telah dan masih akan bergantung pada sumber daya alam.

2) Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Sumber Daya Ekonomi.

Pengembangan aksesibilitas masyarakat pantai terhadap sumber daya ekonomi dimaksudkan untuk meningkatkan diversifikasi sumber penghasilan masyarakat dan sekaligus meningkatkan kesejahteraannya. Langkah ini mencakup perluasan pilihan sumber daya ekonomi, seperti perluasan usaha dan perkreditan. Peluang usaha selain sektor perikanan yang perlu dibuka lebih luas adalah dibidang pertanian, kerajinan, peternakan dan jasa angkutan. Hal ini penting dalam rangka membuka kesempatan masyarakat untuk tidak hanya bergantung secara langsung pada sumber daya alam, tetapi juga sekaligus mengurangi beban alam. Guna mendukung langkah tersebut, maka perlu dikembangkan aksesibilitas masyarakat terhadap perkreditan. Sistem perkreditan yang mampu

memberikan pelayanan dan dorongan bagi masyarakat, sangat diperlukan. Perkreditan tersebut perlu lebih diarahkan kepada upaya pengembangan usaha yang tidak terlalu mengandalkan sumber daya alam utama di wilayah pesisir dan laut, yaitu mangrove. Karena itu, perlu dikembangkan suatu sistem perkreditan yang mampu mendorong tumbuhnya sektor usaha alternatif.

3) Pengembangan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Proses Pengambilan Keputusan.

Keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut sangat tergantung pada ketepatan kebijakan yang diambil. Kebijakan yang dikembangkan dengan melibatkan dan memperhatikan kepentingan masyarakat dan menjamin keberhasilan pengelolaan sumber daya alam dan wilayah. Keterlibatan masyarakat sangat diperlukan karena akan menghasilkan kebijakan yang disesuaikan dengan potensi, aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kebijakan yang berbasis pada potensi masyarakat akan mendorong keterlibatan masyarakat dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam. Selain itu juga memberikan keuntungan ganda : pertama, dengan mengakomodasi aspirasi masyarakat maka pengelolaan pesisir dan laut akan menarik masyarakat sehingga akan mempermudah proses penataan. Kedua, memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut bertanggung jawab atas keamanan pesisir dan laut. Selain itu yang lebih penting lagi adalah adanya upaya untuk meningkatkan kepentingan hakiki masyarakat yaitu kesejahteraan.

Pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan, dapat dilakukan dengan pendekatan yang menggabungkan bottom up dan top down planning. Pada tingkat perencanaan masyarakat harus dilibatkan dalam penyusunan tata ruang untuk menyerap informasi dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut akan memberikan manfaat bagi proses pengembangan zona yang akan dijadikan sebagai pola dasar penyusunan rencana pengelolaannya. Informasi dan aspirasi masyarakat tersebut juga akan bermanfaat untuk menggali potensi masyarakat terutama dalam rangka mengembangkan sistem perlindungan kawasan yang berbasis pada masyarakat. Di lain pihak, top down planning diperlukan untuk memberikan peluang bagi pemerintah untuk merancang pola pengelolaan wilayah bagi kepentingan yang lebih luas.

4) Peningkatan Aksesibilitas Masyarakat Terhadap Informasi.

Informasi merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan masyarakat pantai sebagai bagian dari pengelolaan pesisir dan laut. Ketersediaan informasi mengenai potensi dan perkembangan kondisi wilayah dan sumber daya alamnya sangat berharga untuk penyusunan kebijakan, program dan kegiatan di wilayah tersebut. Ketersediaan informasi ini juga penting bagi masyarakat untuk dijadikan bahan pertimbangan pengembangan kegiatan dan perannya dalam rangka meningkatkan perekonomian mereka. Hal tersebut juga bermanfaat untuk mengefektifkan upaya masyarakat dalam melindungi sumber daya alam serta wilayah pesisir dan laut. Mengingat sebagian besar penduduk di wilayah ini tergantung

secara ekonomis pada sumber daya alam, maka informasi yang berkaitan dengannya sangat diperlukan bagi masyarakat. Guna meningkatkan aksesibilitas informasi dari masyarakat, dapat dilakukan dengan pembentukan forum komunikasi yang melibatkan masyarakat, unsur-unsur pemerintah dan pihak terkait serta stakeholders.

5) Pengembangan Kapasitas Kelembagaan

Untuk meningkatkan peran masyarakat dalam perlindungan wilayah dan sumber daya alam, diperlukan kelembagaan sosial, untuk mendorong peranan masyarakat secara kolektif. Semangat kolektif akan mendorong upaya pemberdayaan masyarakat untuk melindungi wilayahnya dari kerusakan yang dapat mengancam perekonomian. Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan lembaga sosial diharapkan untuk memperkuat posisi masyarakat dalam menjalankan fungsi manajemen wilayah pesisir dan laut. Selain itu, pengembangan kelembagaan sosial diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kegiatan masyarakat untuk selanjutnya akan berdampak pada jalannya kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Pengembangan kelembagaan dapat dilakukan dengan pembentukan embrio lembaga-lembaga sosial dalam bidang yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Apabila lembaga serupa telah ada sebelumnya, maka lembaga-lembaga tersebut perlu diberdayakan. Salah satu strategi yang dapat diterapkan adalah pengembangan jaringan sosial antara lembaga-lembaga serupa baik dalam lingkungan desa, antar desa, maupun antar kecamatan.

Selain itu, pemberian peranan yang lebih kepada lembaga-lembaga tersebut dalam proyek-proyek pembangunan akan makin memperkuat kapasitas lembaga-lembaga yang bersangkutan.

6) Pengembangan Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat.

Keberadaan sistem pengawasan yang efektif merupakan syarat utama keberhasilan pengembangan masyarakat sebagai bagian dari pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Sistem pengawasan tersebut harus mampu menjalankan fungsinya dengan cara memobilisasi semua unsur terkait. Salah satu pendekatan yang efektif adalah pengembangan sistem pengawasan berbasis pada masyarakat. Sistem pengawasan yang berbasis pada masyarakat adalah suatu sistem yang dilandasi oleh kepentingan, potensi dan peranan masyarakat lokal. Untuk itu, sistem pengawasan yang berbasis pada masyarakat tersebut selain memberikan peluang bagi masyarakat untuk ikut mengawasi sumber daya alam dan wilayah tempat mereka tinggal dan mencari makan, juga memperkuat rasa kebersamaan masyarakat dalam mengembangkan potensi daerahnya. Hal ini dapat dilakukan melalui lembaga sosial masyarakat pantai (nelayan).

7) Pengembangan Jaringan Pendukung

Pengembangan koordinasi tersebut mencakup pembentukan sistem jaringan manajemen yang dapat saling membantu. Koordinasi melibatkan seluruh unsur terkait (stakeholders), baik jaringan pemerintah, masyarakat maupun dunia usaha. Keberhasilan dari unsur-unsur ini, selain secara teknis manajemen akan memberikan manfaat praktis, juga secara sosial dan politis

dapat mendorong terciptanya integrasi pengelolaan pesisir dan laut. Untuk mewujudkan sistem koordinasi yang efektif, maka perlu persyaratan sistem dialog antar instansi terkait dan antara instansi-instansi tersebut dengan masyarakat. Kebiasaan mengkomunikasikan gagasan dan rencana kegiatan setiap instansi dengan instansi lain merupakan langkah strategis yang harus dikembangkan. Untuk itu, pelembagaan sistem koordinasi antar stakeholders perlu dilakukan secara terus menerus dan melibatkan langsung jajaran instansi dilingkungan pemerintah.

8) Pendekatan Subyektif

Pendekatan subyektif (non struktural) adalah pendekatan yang menempatkan manusia sebagai subyek yang mempunyai keleluasaan untuk berinisiatif dan berbuat menurut kehendaknya. Pendekatan tersebut berasumsi bahwa masyarakat lokal dengan pengetahuan, keterampilan dan kesadarannya dapat meningkatkan peranannya dalam perlindungan sumber daya alam disekitarnya. Karena itu, salah satu upaya untuk meningkatkan peran masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya alam dan wilayah pesisir dan laut adalah dengan meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan kesadaran masyarakat untuk berbuat sesuatu demi melindungi sumber daya alam. Pengetahuan dan keterampilan tersebut tidak harus berkaitan langsung dengan upaya-upaya penanggulangan masalah kerusakan sumberdaya alam tetapi juga hal-hal yang berkaitan dengan usaha ekonomi, terutama dalam rangka membekali masyarakat dengan usaha ekonomi alternatif sehingga tidak merusak lingkungan, antara lain yaitu :

1) Peningkatan Pengetahuan Dan Wawasan Lingkungan

Pengetahuan dan wawasan lingkungan perlu dimasyarakatkan untuk memberikan konsep dan pandangan yang sama dan benar kepada masyarakat tentang lingkungan dan peranannya terhadap kehidupan masyarakat secara keseluruhan. Jenis pengetahuan dan wawasan yang diberikan berbeda menurut lokasi pemukiman dan jenis pekerjaan. Bagi masyarakat yang berlokasi di zona inti tentu lebih spesifik dan lebih menekankan pada pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan hubungan langsung antara masyarakat setempat dengan pemanfaatan sumberdaya alam dan pengawasannya dibanding dengan masyarakat diluar wilayah. Peningkatan pengetahuan dan wawasan juga perlu melibatkan aparaturnya dusun, desa, dan kecamatan serta masyarakat luas.

2) Pengembangan Keterampilan Masyarakat

Peningkatan keterampilan praktis pengelolaan lingkungan bagi masyarakat dan jajaran pemerintah ditingkat dusun, desa dan kecamatan sangat penting untuk mendorong peran serta unsur-unsur tersebut secara aktif dalam menanggulangi masalah-masalah lingkungan yang secara ekologis dan ekonomis akan merugikan. Keterampilan tersebut terutama berkaitan dengan cara-cara pemanfaatan sumberdaya alam secara efisien, dan keterampilan tentang upaya penanggulangan permasalahan. Penguasaan

keterampilan tersebut akan meningkatkan efektifitas peran serta masyarakat pantai dalam pengelolaan pesisir dan laut.

3) Pengembangan Kapasitas Masyarakat

Pengembangan kapasitas masyarakat diperlukan untuk dapat ikut serta dalam proses pengambilan kebijakan, terutama dalam proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan. Pengembangan kapasitas masyarakat sebenarnya merupakan serangkaian kegiatan seperti yang diuraikan sebelumnya, namun dalam program ini perlu ditekankan pentingnya kemampuan dan peluang masyarakat untuk dapat mengartikulasikan kepentingannya melalui kelompok atau lembaga sosial. Sasaran utama program ini adalah meningkatkan kepercayaan diri masyarakat dan kemampuan berinisiatif.

4) Pengembangan Kualitas Diri

Kualitas masyarakat pantai perlu ditingkatkan untuk menjawab dua tantangan. Tantangan pertama adalah, upaya mengatasi masalah perekonomian, baik untuk mengatasi masalah pemenuhan kebutuhan pokok, maupun dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang lebih luas. Tantangan kedua adalah, upaya mengatasi masalah kerusakan alam, yaitu untuk mengurangi tekanan terhadap sumberdaya alam diwilayah pesisir dan laut sebagai akibat makin meningkatnya aktifitas manusia diwilayah tersebut. Pengembangan diri tersebut termasuk pengembangan kualitas manusia, baik secara perorangan maupun kelompok untuk mengisi

kebutuhan tenaga kerja yang kian beragam. Peningkatan kualitas manusia diharapkan dapat mendorong terjadinya diversifikasi lapangan kerja dan sumber penghasilan penduduk setempat sehingga mampu mengurangi kecenderungan usaha yang bertumpu pada pengelolaan sumber-daya alam yang tidak efisien. Program pengembangan kualitas manusia ini selain dapat dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan juga dengan cara membentuk kerjasama antar lembaga-lembaga sosial dan ekonomi, baik di lingkungan desa pantai maupun di luar, bahkan antar wilayah. Penyiapan tenaga kerja untuk mengantisipasi perkembangan kegiatan pembangunan di wilayah pesisir dan laut dan wilayah lain disekitarnya perlu dilakukan secara proaktif dengan dilandasi oleh pandangan jauh ke depan.

5) Peningkatan Motivasi Masyarakat Untuk Berperanserta

Motivasi masyarakat perlu ditumbuhkan untuk mendorong peran serta mereka secara aktif dalam pengelolaan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut. Untuk itu, upaya pelibatan masyarakat dan pengembangan kegiatan yang dilandasi oleh kepentingan masyarakat perlu ditingkatkan terus. Pelaksanaannya perlu diintegrasikan dengan aspek-aspek yang secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat. Penyeimbangan kepentingan lingkungan, sosial dan ekonomi mempunyai arti yang strategis untuk mendorong

masyarakat melibatkan diri dalam upaya perlindungan sumberdaya alam.

6) Penggalian Dan Pengembangan Nilai Tradisional Masyarakat.

Upaya penggalian nilai-nilai tradisional adalah penting untuk dijadikan bahan pengembangan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat menjadi norma-norma yang dapat dioperasionalkan menjadi landasan dan rambu-rambu pengamanan sumberdaya alam di wilayah pesisir dan laut. Pengembangan nilai-nilai dan norma-norma arif lingkungan masyarakat akan mendorong penggunaan aturan-aturan atau cara-cara mereka sendiri dalam mengelola sumberdaya alam berdasarkan pada nilai-nilai yang mereka yakini. Dengan demikian, strategi pengembangan masyarakat pantai dalam meningkatkan kemandirian Daerah, sesungguhnya dapat dibagi dua yaitu, pertama merupakan strategi jangka pendek yang bertujuan untuk mengatasi berbagai masalah pengembangan masyarakat pantai dengan menyesuaikan urgensi kebutuhan melalui pendekatan struktural dan non struktural. Kedua adalah strategi jangka panjang dengan tujuan yang menitikberatkan pada : (1) Peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui perluasan kesempatan kerja dan kesempatan berusaha. (2) Pengembangan program dan kegiatan yang mengarah kepada peningkatan, pemanfaatan secara optimal dan lestari sumber daya di wilayah pesisir dan lautan. (3) Peningkatan kemampuan dan peran serta

masyarakat pantai dalam pelestarian lingkungan. (4) Peningkatan pendidikan, latihan, riset dan pengembangan di wilayah pesisir dan lautan.

F. Partisipasi Masyarakat

Masyarakat lokal didefinisikan sebagai sekelompok orang dengan suatu identitas tertentu yang berinteraksi dan mempengaruhi aspek kehidupan (tempat tinggal mereka). Kelompok tersebut memiliki wewenang dalam mengatur sumber daya alamnya dan memiliki hubungan yang kuat dengan kebudayaan, ekonomi, spiritual dan kehidupan sosial di area tersebut. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Scherl and Edwards (2007) dalam (Muganda, dkk, 2013:54), yaitu:

“...groups of people with a common identity and who may be involved in an array of related aspects of livelihoods. They further note that local communities often have customary rights related to the area and its natural resources and a strong relationship with the area culturally, socially, economically and spiritually”

Pengertian akan masyarakat seperti yang telah diuraikan mengandung kata *involve*, yang berarti dalam suatu masyarakat atau kelompok orang terdapat keterlibatan yang dalam penelitian ini disebut partisipasi. Istilah partisipasi sering digunakan di dalam kajian tentang peranan anggota masyarakat baik formal maupun non formal. Partisipasi merupakan keikutsertaan masyarakat dalam suatu kegiatan. Jadi partisipasi adalah keterlibatan sejumlah besar orang dalam usaha meningkatkan kesejahteraan sosial.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyebutkan bahwa dalam prinsip penyelenggaraan

kepariwisataan salah satunya harus dapat memberdayakan masyarakat setempat. Pernyataan tersebut menunjukkan masyarakat merupakan suatu komponen yang sangat penting yang harus diperhatikan keberadaannya dengan melibatkan mereka dalam kegiatan wisata serta menghargai hak-hak prioritas mereka. Berdasarkan uraian pada Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat lokal sangat penting dalam kegiatan pariwisata.

Pentingnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan kepariwisataan diungkapkan dalam Kode Etik Kepariwisata Dunia Pasal 5, yaitu:

“penduduk setempat haruslah diikutsertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan harus memperoleh manfaat secara adil dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, khususnya kesempatan kerja langsung maupun tak langsung dari kegiatan kepariwisataan”

Partisipasi masyarakat lokal dalam kegiatan pariwisata menunjang peningkatan taraf hidup masyarakat lokal, oleh karena itu partisipasi masyarakat lokal merupakan salah satu aspek penting dari pengembangan pariwisata berkelanjutan. Partisipasi masyarakat yang dimaksud dalam penelitian ini adalah masyarakat lokal yang tinggal pada suatu desa/tempat berperan aktif dalam kegiatan dan usaha pariwisata sehingga menerima manfaat secara langsung serta ikut dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pengelolaan dan evaluasi desa wisatanya.

- 1) Partisipasi Masyarakat dalam Pengembangan Desa Wisata
Pengembangan desa wisata penting dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan model desa wisata yang sesuai dengan prinsip desa

wisata. Dalam pengembangan desa wisata diperlukan tahapan-tahapan model pengembangan desa wisata yang diharapkan dapat diterapkan di daerah penyangga kawasan konservasi (Soemarno, 2010:118) antara lain:

a) Dari sisi pengembangan kelembagaan desa wisata

Perlunya perencanaan awal yang tepat dalam menentukan usulan program atau kegiatan khususnya pada kelompok sadar wisata agar mampu meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat melalui pelaksanaan program pelatihan pengembangan desa wisata, seperti: pelatihan bagi kelompok sadar wisata, pelatihan tata boga dan tata homestay, pembuatan cinderamata, pelatihan guide/pemandu wisata termasuk didalamnya keterampilan menjadi instruktur outbound

b) Dari sisi pengembangan objek dan daya tarik wisata

Perlunya perencanaan awal dari masyarakat untuk menjadi tuan rumah yang baik bagi wisatawan dan mampu mendatangkan wisatawan dari berbagai potensi yang dimiliki oleh masyarakat, serta perlunya sosialisasi dari instansi terkait dalam rangka menggalakkan sapta pesona dan paket desa wisata terpadu.

c) Dari sisi pengembangan sarana prasarana wisata

Perencanaan awal dari pemerintah perlu diarahkan ke pengembangan sarana dan prasarana wisata yang baru seperti: alat-alat outbound, pembangunan gapura, gedung khusus pengelola desa

wisata, cinderamata khas setempat, dan rumah makan bernuansa alami perdesaan. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kerjasama masyarakat dengan pemerintah dan pengusaha/pihak swasta.

Partisipasi masyarakat desa dalam pengembangan desa wisata memiliki empat tahapan yang menunjukkan keterlibatan masyarakat dalam kegiatan desa wisata. Parisukmana dan Mulyadin (2001:39-40) menjabarkan tahapan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata seperti pada Tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Tahapan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata

No.	Tahapan partisipasi	Indikator
1.	Perencanaan	1) Survey lapangan 2) Penyusunan rencana tapak 3) Penyusunan anggaran dan sumber anggaran 4) Perencanaan SDM
	Pelaksanaan pembangunan	1) Pembangunan Prasarana 2) Pelaksanaan pembangunan
	Pengelolaan	1) Perekrutan SDM 2) Pengorganisasian 3) Promosi
	Evaluasi	1) Penelitian dan pengembangan 2) Pelaporan

Sumber: Parisukmana dan Sukmadin (2001, 39-40)

Konsep tahapan partisipasi masyarakat dalam pengembangan desa wisata menjadi acuan bagi peneliti untuk menggali informasi mengenai berbagai aktivitas yang telah dilakukan oleh masyarakat lokal dalam kegiatan pengembangan di Desa Wisata di Desa Madello Kabupaten Barru.

G. Desa Wisata

Desa Wisata adalah sebuah area atau daerah pedesaan yang memiliki daya tarik khusus yang dapat menjadi daerah tujuan wisata. Di desa wisata, penduduk masih memegang tradisi dan budaya yang masih asli. Serta beberapa aktivitas pendukung seperti sistem bertani, berkebun serta makanan tradisional juga berkontribusi mewarnai keberadaan desa wisata itu sendiri. Selain faktor tersebut, faktor lingkungan yang masih asli dan terjaga merupakan faktor penting yang harus ada di suatu desa wisata (Zakaria, 2014)

Sehingga unsur dari pengembangan desa wisata adalah pemahaman akan unsur yang ada di desa wisata yaitu; lingkungan alam, budaya masyarakat, arsitektur, sosial ekonomi, struktur tata ruang dan aspek historis, termasuk kemampuan dan pengetahuan lokal yang dimiliki oleh masyarakat setempat.

Menurut Suwanto (1997), desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang menawarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan baik dari tata ruang, arsitektur bangunan, maupun pola kehidupan sosial-budaya masyarakat, adat istiadat keseharian serta mampu menyediakan komponen-komponen kebutuhan pokok wisatawan, seperti akomodasi, makanan dan minuman, cindramata, dan atraksi-atraksi wisata.

Selain akomodasi dan atraksi, komponen desa wisata dilihat dari keunikan dan keaslian suatu desa wisata, letaknya yang berdekatan dengan keadaan alam yang luar biasa, memiliki budaya yang unik yang dapat menarik pengunjung, serta memiliki potensi untuk dikembangkan baik dari sarana dan prasarana (Gumelar dalam Zakaria 2014). Prasiara dalam Zakaria (2014) berpendapat bahwa komponen

desa wisata terdiri dari empat komponen. Keempat komponen tersebut adalah partisipasi masyarakat lokal, adanya sistem norma yang ada di desa tersebut, adat dan budaya setempat yang masih asli. Desa wisata harus memiliki potensi pariwisata, seni dan kebiasaan di daerah setempat, area desa masuk kedalam lingkup kawasan pengembangan pariwisata atau setidaknya ada dalam rute perjalanan tour package yang telah dijual, tersedianya tenaga pengelola, pelatih, dan pelaku seni yang dapat mendukung keberlangsungan desa wisata tersebut, aksesibilitas yang dapat mendukung program desa wisata serta terjaminnya keamanan, ketertiban dan kebersihan (Putra dalam Zakaria, 2014)

Letak keberhasilan suatu perencanaan pengembangan pariwisata sangat ditentukan oleh strategi yang digunakan, yang mana strategi tersebut mampu diterapkan di Desa Wisata yang memiliki potensi yang berbeda-beda. Pengembangan pariwisata di Kabupaten Barru dilaksanakan dengan tujuan peningkatan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat dan pembangunan yang berorientasi pada pengembangan produk unggulan daerah. Hal tersebut mencakup berbagai aspek, seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya budaya, mengembangkan industri kecil, destinasi, pemasaran dan promosi pariwisata, bersifat memberdayakan masyarakat, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, sinergi lintas sektor dan kerjasama antar daerah, serta tanggung jawab dalam pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan dan budaya. Mengacu terhadap beberapa aspek tersebut, maka karakteristik dalam pengembangan Desa Wisata di Kabupaten Barru didasarkan pada potensi yang dimiliki suatu Desa dan masyarakat.

Pengembangan desa wisata lebih mengutamakan manfaat langsung yang diterima oleh seluruh masyarakat. Masyarakat tidak hanya sebagai objek wisata, tetapi sebagai subyek dari pengembangan pariwisata di wilayahnya. Di sisi lain pengembangan desa wisata menjadi alternatif yang sensitif, karena apabila salah dalam perencanaan maka pengelolaan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap keberadaan desa wisata (Pitana, 2005:105).

Ada empat tahap proses yang dilalui dalam pengembangan desa wisata. Pertama, menyiapkan konsep perencanaan yang matang, memperhatikan tata ruang agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari. Pemetaan pemukiman warga sehingga tidak mengganggu tata letak kawasan wisata. Pemetaan akses jalan menuju kawasan wisata. Pembangunan homestay dengan arsitektur bangunan lokal. Memperhatikan pola kehidupan sosial budaya dan adat istiadat masyarakat lokal. Kedua, keterlibatan masyarakat dalam penyiapan kuliner tradisional, minuman tradisional, kerajinan tangan, dan sanggar budaya tradisional. Ketiga, pengelolaan dan pemanfaatan ekonomi dari hasil usaha pariwisata yang dirasakan langsung oleh masyarakat desa. Keempat, masyarakat desa tidak hanya sebagai objek wisata, tetapi juga sebagai subyek atau pelaku usaha pariwisata.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa desa wisata merupakan suatu wilayah pedesaan yang mencerminkan suasana yang tradisional, jauh dari unsur-unsur pembangunan moderen. Masyarakat diberi pelatihan dan pengembangan kemampuan, agar mampu menjadi subyek atau pelaku usaha wisata di Desa Wisata. Pemanfaatan daya tarik wisata dilakukan secara terpadu oleh masyarakat, pemerintah, dan pengelola agar dapat menghasilkan nilai ekonomi

untuk menambah pendapatan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi desa. Pengelolaan daya tarik wisata dimulai dari perencanaan, keterlibatan masyarakat secara aktif, dan manfaat ekonomi yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat.

Berbagai upaya pengembangan desa wisata mengacu pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai, dengan tidak hanya tertuju pada sasaran pengembangan Desa Wisata saja, melainkan pengembangan produk yang dijadikan unggulan. Selanjutnya tujuan tersebut merupakan upaya peningkatan perekonomian untuk kesejahteraan masyarakat dan penunjang PAD, dan juga yang tak kalah penting adalah Desa Wisata Pesanggrahan mampu teridentifikasi sebagai desa yang mempunyai potensi produk unggulan yang khas dan unik.

A. Kerangka Pikir

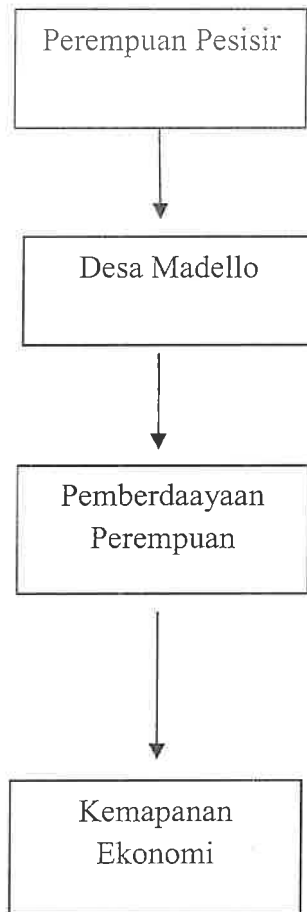
Persepsi dalam masyarakat nelayan terhadap perempuan yang bekerja disektor publik terbagi menjadi tiga, yaitu: persepsi konservatif, moderat bersyarat, dan kontekstual dinamis. Jika persepsi "konservatif" dan pandangan "moderat bersyarat" dianut oleh sebagian kecil masyarakat nelayan, sebaliknya pandangan "kontekstual-dinamis" dianut oleh sebagian besar warga masyarakat nelayan. Persepsi kontekstual-dinamis lebih rasional dalam menilai perempuan pesisir yang bekerja sesuai dengan kebutuhan dan kondisi-kondisi sosial ekonomi lokal. Persepsi ini memberikan ruang yang luas bagi perempuan untuk terlibat aktif dalam kegiatan publik dengan tidak mengorbankan tanggung jawab domestiknya (Kusnadi, Hari Sulistiyowati, Adi Prasodjo, dan Sumarjono, 2006).

Menurut Sanatang (2006) wanita merupakan salah satu komponen yang sangat penting dalam pembangunan pesisir karena peran wanita sangat strategis

dalam kegiatan berbasis perikanan dan kelautan. Sebagai contohnya wanita sangat berperan sebagai pedagang pengecer, pengumpul ikan, pedagang besar, buruh upahan, maupun tenaga pengolah hasil perikanan. Berbagai aspek kajian ataupun program-program pembangunan pesisir menyangkut perempuan tidak banyak tersentuh.

Wanita merupakan sumber daya manusia yang sangat potensial dalam pembangunan. Begitu pula para wanita yang tinggal di daerah pesisir. Hanya saja dalam pengembangannya mengalami beberapa kendala antara lain rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Hasil penelitian *Mubyarto et. Al* dalam *Soengkono* (2002), memberikan gambaran umum bahwa kemiskinan nelayan memang disebabkan oleh beberapa faktor yang kompleks. Ribuan pulau dan laut yang membentang luas belum dapat menghapus fenomena kemiskinan keluarga nelayan sehingga perlu dicari solusi untuk meningkatkan perekonomian komunitas nelayan. Aktivitas produktif perikanan laut menunjukkan gejala spesifik peranan gender yang sangat jelas, yaitu laki-laki mendominasi proses penangkapan ikan sedangkan wanita hanya berperan sebagai pengelola pasca tangkap yang nilai tambah ekonomisnya sangatlah rendah.

Adapun kerangka pikir dalam penelitian ini sebagai berikut;



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilaksanakan, yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif deskriptif ini ialah data yang umumnya berbentuk kata-kata, gambar, dan sebagian besar bukan berbentuk angka. Data tersebut yang dimaksud adalah meliputi transkrip wawancara, catatan observasi di lapangan, dokumentasi foto-foto, serta dokumen lainnya. Termasuk deskripsi mengenai situasi wilayah penelitian di dalamnya (Dewi, 2015).

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Madello sebagai salah satu kampung Kb yang berada di desa pesisir di Kabupaten Barru. Pemilihan lokasi didasarkan atas fakta bahwa kawasan tersebut memiliki sejumlah daya tarik wisata alam, eduwisata dan wisata budaya yang dapat dikembangkan jika dikelola dengan maksimal. Penelitian ini dilakukan sejak bulan April-Juli 2021.

C. Jenis dan Sumber Data

Terdapat dua sumber data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer mencakup data yang diperoleh langsung dari sumbernya yang asli melalui wawancara dan

pengamatan yang mendalam. Dalam hal ini, data primer dikumpulkan dari para responden kunci (*key respondents*) antara lain keterangan atau informasi dari masyarakat lokal yang berpartisipasi langsung dalam pengelolaan desa wisata seperti pemuka masyarakat, pengelola desa wisata masyarakat, dan para wisatawan yang sedang berkunjung. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dipublikasikan melalui alat media oleh instansi dan lembaga tertentu yang berkaitan dengan substansi penelitian yang sedang dilaksanakan. Data primer dan data sekunder dikumpulkan dari sumbernya dan mengadakan eksplorasi terhadap fenomena yang terjadi di masyarakat kedua desa tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari informasi kunci yang diwawancarai, dibuat catatan khusus, tabulasi dan sintesis yang selanjutnya dilakukan analisis deskriptif kualitatif dengan menghubungkan jawaban yang diperoleh dari masyarakat lokal baik yang berasal dari para tokoh masyarakat desa Madello yang sangat tahu dan mengerti akan berbagai masalah yang berkaitan dengan perencanaan dan pengelolaan di desa wisata ini. Pemilihan dan penentuan responden didasarkan atas hasil diskusi. Di samping itu, sumber informasi lainnya adalah dari pejabat pemerintah yang memiliki keterkaitan dengan obyek penelitian ini. Informan adalah orang yang sangat penting dalam penelitian ini karena segala informasi yang ingin diperoleh terdapat pada informan yang dipilih untuk dimintai. informasi data yang ingin diperoleh untuk dijadikan dasar dalam menyelesaikan penelitian ini. Dengan demikian, dalam menentukan informan, diperoleh beberapa pertimbangan antara lain :

- 1) yang bersangkutan sudah memiliki pengetahuan dan pengalaman pribadi yang sangat mendalam tentang informasi yang diperoleh
- 2) orang bersangkutan sebagai informan adalah tokoh masyarakat penduduk asli dalam arti masyarakat yang lahir dan tinggal di desa itu, dan
- 3) ditinjau dari sudut usia dalam artian yang bersangkutan sudah mengerti dan memahami permasalahan yang diteliti serta sehat jasmani dan rohani.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu yang dibutuhkan dalam proses penelitian. Penelitian kualitatif ini menggunakan instrumen penelitian yang dibutuhkan berupa pedoman wawancara, pedoman observasi, alat perekam suara (*audio recorder*), kamera, dan video camera. Teknik pelaksanaannya dilakukan secara informal, terlibat langsung dalam kehidupan masyarakat sehingga tidak menunjukkan suatu kegiatan penelitian yang sebenarnya. Instrumen penelitian berupa panduan wawancara berupa daftar pertanyaan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan suatu cara yang digunakan untuk mengumpulkan data dari suatu penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1) Observasi, yaitu cara pengumpulan data dengan mengadakan pengamatan langsung pada obyek yang diteliti
- 2) Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai, yaitu yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2002).
- 3) Kuisisioner, yaitu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan yang disusun dalam bentuk instrument dengan menjabarkan setiap variabel dengan beberapa indikatornya.

F. Analisis Data

Setelah data terkumpul sesuai kebutuhan baik data dari observasi dan dokumentasi, kemudian data-data tersebut diolah sebagai laporan. Setelah data yang diperlukan terkumpul selanjutnya data tersebut dianalisa menguraikan hasil penelitian secara rinci apa adanya. Dengan demikian akan terlihat kesesuaian ideal dalam teori dan kenyataan di lapangan (penelitian) selanjutnya dengan diketahui adanya perbedaan-perbedaan tersebut dijadikan landasan dalam melakukan analisa. Analisis data adalah proses mengorganisasian dan mengurutkan data kedalam pola, katagori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dirumuskan tema dan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.

Prinsip utam dalam analisa data adalah bagaimana menjadikan data atau informasi yang telah dikumpulkan disajikan dalam bentuk uraian dan sekaligus

memberikan makna atau interpretasi sehingga informasi tersebut memiliki signifikansi ilmiah atau teoritis.

Penulis menggunakan analisis data kualitatif, adapun hal-hal yang terdapat dalam analisis kualitatif, akan muncul data terwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data model Miles dan Huberman yang terkenal dengan analisis interaktif. Sedangkan analisis interaktif ini ada tiga hal yaitu:

1. Reduksi data, yaitu proses pemilihan, merangkum, memilih hal-hal pokok. Data yang sudah melalui proses reduksi disusun lebih sistematis sehingga data dapat memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah dalam mencari data selanjutnya.
2. Display atau penyajian data, yaitu sekumpulan informasi yang disajikan secara tersusun dan dikelompokkan sesuai hal-hal yang serupa menjadi satu kategori dalam bentuk uraian singkat agar mudah dipahami. Penarikan kesimpulan, yaitu langkah terakhir dalam teknik analisis data.
3. Penarikan Kesimpulan ini artinya mencari makna dari data yang sudah terkumpul dan tersusun secara sistematis dan menghasilkan informasi yang mudah dipahami dan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan (Sugiyono, 2010:85).

G. Jadwal Pelaksanaan

Rencana jadwal pelaksanaan penelitian selama 4 bulan dari dimulai tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap pelaporan pada tahun 2021 sebagai berikut.

Tabel 2. Rencana Kegiatan

Kegiatan	2021									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pengajuan proposal	■									
Pengumpulan teori dan literatur	■	■								
Identifikasi instrumen	■	■								
Pengumpulan data			■	■						
Tabulasi data			■	■						
Pengolahan data				■	■					
Pengujian hipotesis					■	■				
Analisis data					■	■	■			
Pembahasan						■	■	■		
Penyimpulan							■	■		
Publikasi									■	■

BAB IV

GAMBARAN LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Desa Madello

Pada waktu I Lipa Dg. Mananku yang bergelar Matinroe ri Madello memerintahkan kerajaan Barru, rombongan kecil dari didaerah Kalukue (Kab. Pangkep) yang dipimpin oleh Baso Kalukue mendarat di pulau Pa'nikiang. Dari pulau ini Baso Kalukue bersama rombongannya sangat tertarik dan terpesona menyaksikan walaupun dari jauh sebatang pohon (*Pissue*) yang tumbuh diseberang timur pulau Pa'nikiang yang sedang berbunga. Sinar matahari yang menyinari pohon Pissue tersebut, membuat warna bunganya berseri-seri yang dalam bahasa Bugis diucapkan Marello, begitu tertariknya Baso Kalukue bersama rombongannya, mereka lalu meninggalkan Pa'nikiang menuju daratan tempat tumbuhnya pohon pissue yang tumbuh melalui sungai. Rombongan baso kaluku mendarat dan membuat pemukiman (baruga) didekat tumbuhnya pohon pissue tetapi merasa keamanan belum terjamin maka rombongan pindah ke suatu tempat berbentuk Goa yang sekarang ini lokasinya berada didusun Latimpa dikenal dengan sebutan Goa togangra. Setelah bermukim beberapa lama di Goa Togangra, Baso Kaluku bersama rombongan didatangi Suro utusan Raja Barru yang menanyakan maksud kedatangan mereka. Baso Kaluku menjelaskan maksud kedatangannya yaitu ingin menjadi penduduk dan menetap di kerajaan Barru. Penjelasan Baso Kaluku itu oleh Suro disampaikan kepada raja Barru dengan ucapan : "*Naiyya topolowe sijitta pole ri Kalukue maelo mellau attna-tanan malipu rilaleng parentana Arunge narekko*

engkamui masennang nyawana Arunge”. Mendengar maksud dan ucapan Baso Kaluku tersebut, Raja Barru menerima dengan baik dan memerintahkan Suro kembali menyampaikan Baso Kaluku dengan ucapan : “ *Taroni kua narekko engkamui macenning makkasiwiyang ri Arunge nau pappada padamangngi juwaku/ tauku, suroni monro rilili rimanoranna wanuae naengka mancaji patteppo wanua*”. Mendengar kata-kata penerimaan Raja barru melalui Suro, Baso Kaluku bersama rombongannya pindah bermukim ditempat semula yakni didekatya pohon pissue yang kemudian dikenal dengan sebutan desa Madello (Dokumen rancangan pembangunan jangka menengah Desa Madello 2011-2015).

B. Kondisi Geografis

Desa Madello termasuk dalam cakupan wilayah Kecamatan Balusu berjarak sekitar 10 KM dari Ibukota Kabupaten Barru. Mempunyai luas 721 Ha yang terdiri atas 4 (empat) dusun, yaitu:

- | | |
|-------------------|-------------|
| 1. Dusun Madello | : 42,25 Ha |
| 2. Dusun Latimpa | : 162,68 Ha |
| 3. Dusun Palie | : 497,95 Ha |
| 4. Dusun Ujungnge | : 18, 12 Ha |

Dengan batas administratif :

Sebelah Utara : Kelurahan Takkalasi Kecamatan Balusu.

Sebelah Selatan : Kelurahan Mangempang Kecamatan Barru.

Sebelah Timur : Desa Binuang Kecamatan Balusu

Sebelah Barat : Laut (Selat Makassar)

Letak tanahnya 0 – 65 Mdpl dengan kemiringan tanahnya mulai 25°, sedangkan kisaran suhu rata-rata harian berkisar 21°C-35°C yang mengalami perubahan musim dua kali dalam setahun, yaitu musim hujan dan musim kemarau. Musim hujan mulai pada bulan November hingga Maret, sedangkan musim kemarau mulai bulan April hingga Oktober. Desa Madello terletak dipesisir pantai, maka sebahagian besar wilayahnya setiap hari terjadi penggantian arah angin, yakni angin darat dan angin laut.

Dari luas wilayahnya 721 Ha, terdiri atas :

1. Luas persawahan (sawah tadah hujan) : 298,80 Ha
2. Tanah hutan :
 - Hutan lindung : 326 Ha
 - Hutan produksi : 80,70 Ha
 - Hutan konversi : 17,30 Ha

Maka melihat kondisi geografis desa Madello ini komoditas yang dapat dikembangkan :

1. Pertanian tanaman pangan
2. Perkebunan palawija
3. Perkebunan buah-buahan
4. Perikanan laut
5. Peternakan

Sumber-sumber kekayaan desa :

1. Pertanian/ perkebunan
2. Perikanan/tambak
3. Peternakan
4. Batu kapur/dolomit

C. Kondisi Geografis

Berdasarkan hasil sensus penduduk tahun 2010 bahwa jumlah penduduk desa Madello adalah sebanyak 4.447 jiwa, laki-laki 2.177 jiwa dan perempuan 2.270 jiwa terdiri dari 1.209 kepala keluarga. Penduduk ini tersebar dalam 4 wilayah dusun dengan rincian sebagai berikut :

Kepadatan dan distribusi penduduk per dusun dalam wilayah desa Madello diuraikan dalam table I

No.	Dusun	Jumlah Kelamin		Jumlah	KK	Ket
		Pria	Wanita			
1.	Madello	621	704	1318	326	
2.	Ujungnge	479	502	972	218	
3.	Latimpa	453	484	970	240	
4.	Palie	601	627	1211	325	
	Jumlah	2.154	2.317	4.471	1.109	

Sumber : Kecamatan Balusu Dalam Angka tahun 2020.

Data sejumlah penduduk tersebut ada sebahagian keluar ke Kabupaten lain untuk bekerja /berkebun akan tetapi mengambil kartu tanda penduduk sesuai dengan alamat dusunnya masing-masing dalam desa Madello.

Sumber perekonomian utama desa Madello sebahagian besar bergerak disektor pertanian (tanaman padi), perkebunan (palawija dan buah-buahan) dan

perikanan (nelayan tangkap), disamping profesi lainnya sebagai peternak, buruh tani, buruh bangunan, pedagang, wirausaha, pegawai swasta, PNS, dan anggota TNI/Polri.

Nelayan pada umumnya masih melakukan penangkapan secara tradisional dan mempunyai peralatan tangkap yang serba terbatas sehingga belum bisa memperoleh penghasilan secara maksimal.

Dari segi ekonomi desa Madello yang strategis memiliki darat dan pantai (laut) yang didapat dikembangkan menjadi lahan pertanian, perkebunan dan nelayan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun masih kurangnya lapangan kerja mengakibatkan pendapatan perkapita penduduk desa Madello masih dibawah upah minimum regional (UMR). Dari segi sosial dan budaya penduduk desa Madello mayoritas masyarakatnya mengenyam pendidikan sampai sekolah dasar (SD) dan kedua tertinggi SLTP , dan masih sebahagian kecil yang mengenyam sampai pendidikan yang lebih tinggi yang berdampak pada kurangnya sumber daya manusia yang siap pakai, mengakibatkan terjadinya kesenjangan sosial ditengah masyarakat. Dari segi kelembagaan, Desa Madello mempunyai LKP, BPD, PKK, organisasi perempuan, kelompok tani dan karang taruna, namun keberadaannya belum maksimal karena belum ada sarana prasaranya dan pemberdayaan agar nantinya menjadi kader penggerak pembangunan ditengah masyarakat sehingga menjadi masyarakat yang adil dan makmur. Jumlah penduduk didesa Madello berdasarkan mata pencahariannya terdiri atas petani : 332 orang, buruh petani : 124 orang, pengrajin : 12 orang, pedagang : 83 orang, nelayan : 88 orang, montir : 5 orang, dokter : 2 orang, peternak : 43 orang.



Gambar 4.1 potret kehidupan nelayan di Dusun Ujunge ketika sedang tidak melaut.

Pendidikan adalah salah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan pada umumnya dan tingkat perekonomian padakhususnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat pendidikan juga akan mendorong tumbuhnya keterampilan kewirausahaan dan pada gilirannya akan mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Penduduk desa Madello pada umumnya tidak banyak yang melanjutkan pendidikannya sampai ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi hanya sebahagian kecil saja yang menyelesaikan studinya. Menurut rincian pendidikan penduduk desa madello terdiri atas belum sekolah 467 orang, usia 7-45 tahun tidak pernah sekolah 566 orang, pernah sekolah Sd tapi tidak tamat 270 orang, tamat SD 1222, tamat SLTP 830 orang, tamat SMA 706 orang, D2 12 orang, D3 25 orang, S1 77 orang, S2 1 orang. Didesa Madello sendiri terdapat 21 unit taman kanak-kanak dengan 42 guru dan 82 orang murid, sekolah dasar 3 unit dengan 40 orang guru dan

486 orang murid, SMP 2 unit dengan 52 orang guru dan 4.312 murid, dan yang terakhir SMA 1 unit dengan 6 orang guru dan 27 murid (Dokumen Rencana Pembangunan Desa Madello 2011-2015).

D. Sistem Kekerabatan dan Perkawinan

Masyarakat adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan antara yang satu dengan yang lainnya. Dalam masyarakat Kabupaten Takalar sebagian besar masyarakat memiliki nilai gotong royong. Hal ini terlihat dalam tradisi *abbeso' biseang* (menarik perahu). Masyarakat bergotong royong dalam menarik perahu dari pesisir pantai ke air.

Kekayaan dan keragaman budaya desa Madello sebagai suatu rumpun budaya terdiri dari suku Bugis, dan selebihnya Makassar dan Mandar. Kemajemukan ini terkait pula dengan potensi kearifan lokal yang bisa berkembang dalam tatanan sosial budaya. Menurut pandangan orang Bugis-Makassar, perkawinan bukan sekedar menyatukan dua mempelai dalam hubungan suami-istri, tetapi perkawinan merupakan suatu upacara yang bertujuan untuk menyatukan dua keluarga besar yang telah terjalin sebelumnya menjadi semakin erat atau dalam istilah orang Bugis disebut *mappasideppémabélaé* atau mendekatkan yang sudah jauh (Pelras, 2006:178). Oleh karena itu, perkawinan di kalangan masyarakat Bugis umumnya berlangsung antarkeluarga dekat atau antarkelompok patronasi (endogami), terutama di kalangan masyarakat biasa, karena mereka sudah saling memahami sebelumnya (Hilman Hadikusuma, 2003:68).

Meskipun sistem perkawinan endogami tersebut masih bertahan hingga sekarang, namun tidak dianut secara ketat. Dewasa ini, pemilihan jodoh sudah banyak dilakukan di luar lingkungan kerabat elautherogami (Hadikusuma, 2003:69). Kendati demikian, peran orang tua tetap diperlukan untuk memberikan petunjuk anak-anaknya agar mendapatkan pasangan hidup dari keturunan orang baik-baik, memiliki adab sopan-santun, kecantikan, keterampilan rumah tangga, serta memiliki pengetahuan agama.

Yang perlu diperhatikan dalam pemilihan jodoh yakni syarat-syarat pernikahan. Ketika seseorang telah dipilihkan jodohnya maka sang wanita atau sang lelaki dianggap telah memnuhi syarat untuk menikah. Syarat untuk menikah antara lain :

- 1) Telah memiliki pekerjaan yang tetap
- 2) Umur yang sudah cukup sekitar 21-25 tahun adalah usia yang ideal untuk menikah.
- 3) Telah siap untuk berumahtangga.
- 4) Mapan dalam kehidupan ekonomi.
- 5) Telah memiliki pasangan untuk dijadikan pendamping hidup.
- 6) Bagi perempuan telah bisa mengurus rumah tangga seperti mencuci, masak dan membersihkan rumah (wawancara: Nani, 22 Juni 2021).

Di dusun Ujunge umumnya kaum ibu yang telah berumahtangga dinikahkan dengan laki-laki yang masih memiliki hubungan keluarga dengannya, apakah mereka bersepupu sekali atau keluarga jauh, karena umumnya yang terjadi mereka

menikah karena dijodohkan oleh kedua orangtua. Hal ini terjadi karena tingkat pendidikan di dusun Ujunge sangat rendah itulah mengapa banyak pemuda-pemudi yang dinikahkan sangat cepat.

E. Sistem Agama dan Kepercayaan

Mayoritas penduduknya menganut agama islam. Karena mayoritas masyarakatnya berasal dari suku Bugis maka perspektif budaya masyarakat desa Madello masih sangat kental dengan budaya Bugis. Dari latar belakang budayanya, kita bisa melihat aspek budayadan sosial yang berpengaruh dalam kehidupan masyarakat. Didalam hubungannya dengan agama yang dianut, islam sebagai agama mayoritas, dalam menjalankannya sangat kental tradisi budaya Bugis.

F. Struktur Organisasi Desa

Di desa Madello terdapat beberapa organisasi *pertama* Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang dipilih dengan cara demokrasi dan masa jabatan 5 tahun. *Kedua*, lembaga Ketahanan Desa (LKD) yang bertanggungjawab dalam menjamin pelibatan dan pemberdayaan masyarakat diberbagai kegiatan dalam hidup bermasyarakat, masa jabatan sama dengan BPD yakni 5 tahun. *Ketiga*, Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) dikhususkan bagi kaum ibu-ibu. *Keempat*, kader posyandu memiliki peran dan fungsi di masyarakat sebagai tenaga sukarela yang membantu bidan desa dalam melakukan pelayanan kesehatan di masyarakat, seperti imunisasi dan penimbangan balita, pelayanan KB serta berbagai layanan kesehatan yang berhubungan dengan masyarakat. Kader posyandu juga masih memiliki keterbatasan kapasitas dan sumber daya sehingga masih sangat diperlukan

pembinaan. *Kelima*, karang taruna dan yang terakhir Tim Pengelolah Kegiatan PNPM-MP.

Organisasi-organisasi perempuan yang ada di Desa Madello tidak begitu banyak dan juga program pemberdayaan perempuan di pemerintah Desa Madello tidak ada secara mengkhusus di buat oleh kepala desa ataupun pemerintah Desa Madello, kegiatan perempuan di Desa Madello diserahkan sepenuhnya kepada PKK, yang di ketuai oleh ibu desa,. Adapun kelompok-kelompok perempuan atau organisasi perempuan yang ada di Desa Madello adalah Kelompok Wanita Tani, PKK, dan Majelis Taklim (di bentuk oleh PKK).

G. Dusun Ujunge Sebagai Perkampungan KB

Perkampungan KB diresmikan tanggal 16 Maret 2016 di Dusun Ujunge Desa Madello, peresmian ini dilakukan oleh Bupati terpilih Kabupaten Barru bersama dengan kepala Badan BKKBN Provinsi. Untuk menjadi sebuah kampung KB tidaklah mudah sebab ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Misalnya pihak kecamatan mengusulkan sebuah desa atau dusun untuk dijadikan perkampungan KB setelah itu melengkapi berkas yang dibutuhkan seperti data kependudukan dan pengguna akseptor KB. Data yang sudah terkumpul tadi lalu dikirim ke tingkat Kabupaten sebelum akhirnya dikirim ke tingkat Provinsi. Setelah dilakukan verifikasi maka Dusun Ujunge resmi menjadi sebuah perkampungan KB. Sebelum peresmian dipasang mi itu tanda kampung Kb tanggal 13 Maret 2016 didanai sama desa kerjasama dengan kecamatan.



Gambar 4.2 pintu gerbang masuk dusun Ujunge yang menegaskan bahwa dusun ini adalah Kampung Kb di Desa Madello.

Dusun Ujunge dijadikan Dusun percontohan Kb di Desa Madello alasannya kerana :

1. Tempatnya masih kumuh
2. Tempatnya berada dipesisir pantai
3. Yang tidak ada menjadi ada (umumnya warga masyarakat menggunakan jamban terpanjang yakni menggunakan pantai sebagai jamban umum, jadi bagi penduduk yang tidak memiliki wc diusahakan untuk mempunyai wc, yang tidak menggunakan kb di anjurkan untuk menggunakan Kb).
4. Di Dusun Ujunge masih terdapat banyak nelayan yang prasejahtera, jika dipersentasikan terdapat sekitar 80% berbeda dengan dusun lain yang masih dalam wilayah satu desa sebab rata-rata mereka berprofesi

sebagai petani dan nelayan tambak jadi pengasilan yang didapat setiap bulannya stabil.

5. Pihak pengawas Kb yang menunjuk untuk dijadikan kampung Kb, ini usulan dari kecamatan.
6. Dusun Ujunge merupakan satu-satunya dusun yang padat penduduknya, banyak anak-anak putus sekolah jadi kurang pendidikannya, banyak pernikahan dini, tinggi angka perceraian, banyak juga Pasangan Usia Subur. Ini semua mi yang kasi rawan ki (Rahima: 22 Juni 2021).

Ketika pertama kali dicanangkan Dusun Ujunge menjadi salah satu perkempungan KB masyarakat mendukung kita undang tokoh masyarakat, camat, kepala desa, kepala dusun, pemberdayaan perempuan, tokoh agama, masyarakat. Rapat pertama sebelum peresmian dikantor desa, baru rapat ki lagi diposyandu untuk pemantapannya.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Peran perempuan pesisir di Desa Madello dalam pengembangan pariwisata bahari

Pada tataran sosial (masyarakat pesisir), dominasi perempuan pesisir dalam sektor pemberdayaan ekonomi, telah menempatkan mereka sebagai kontributor penting terhadap dinamika ekonomi kawasan pesisir. Stabilitas dinamika ekonomi pesisir sangat menentukan distribusi pendapatan dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Peranan yang demikian dapat dirasakan jika dilihat kehidupan sosial ekonomi di pemukiman nelayan yang memiliki potensi sumber daya perikanan cukup besar. Kontribusi ekonomi perempuan pesisir terhadap kehidupan masyarakatnya merupakan wujud kapasitas aktualisasi diri mereka dan sebagai realitas sosial yang tidak bisa diabaikan. Mereka dapat dianggap sebagai modal pemberdayaan. Perempuan pesisir yang harus bekerja dalam konteks tanggung jawab domestik, produktif maupun pemberdayaan komunitas merupakan suatu tuntutan dan kebutuhan kehidupan, yang dianut dan disetujui oleh sebagian besar warga masyarakat pesisir.

Sistem pembagian kerja secara seksual dalam masyarakat pesisir menempatkan secara tegas tentang peranan laki-laki dan perempuan. Laut adalah ranah kerja laki-laki (nelayan) dan darat adalah ranah kerja perempuan pesisir. Kegiatan utama laki-laki adalah menangkap ikan, sedangkan kaum perempuannya mengolah dan menjualkan hasil tangkapan suami. Sebagian besar waktu dihabiskan nelayan untuk menangani pekerjaan melaut, tidak cukup

kesempatan bagi nelayan mengurus aktivitas sosial ekonomi di darat. Sebaliknya, perempuan pesisir menghabiskan sebagian besar waktunya untuk menangani pekerjaan-pekerjaan di darat. Karakteristik geografis dan mata pencaharian di kawasan pesisir telah membentuk peranan sosial-ekonomi yang khas para nelayan dan isterinya.

Terdapat tiga jenis tanggung jawab perempuan telah menempatkan posisi sosial dan peranan ekonomi perempuan pesisir yang cukup kuat dan mendominasi Pertama, peran reproduksi atau peran domestik (tataran rumah tangga). Kedua, peran produktif. Ketiga, peran keterlibatan dalam mengelola kerja sosial atau potensi komunitas.

Pada tataran rumah tangga, perempuan pesisir menjadi "salah satu tiang ekonomi" rumah tangga, sejajar dengan suami-suami mereka. Hubungan fungsional suami-isteri dalam memenuhi kebutuhan ekonomi rumah tangga bersifat saling-melengkapi. Perempuan pesisir tidak sekedar "melengkapi atau membantu" pemenuhan kebutuhan ekonomi rumah tangga, tetapi ikut menentukan tersedianya sumber daya ekonomi untuk kebutuhan rumah tangga. Jika salah satu pihak tidak berfungsi sebagaimana mestinya, maka tiang ekonomi rumah tangga itu akan terancam roboh. Karena posisi ekonomi perempuan seperti ini, posisi sosial mereka dalam berhadapan dengan suami di rumah tangga juga cukup kuat. Isteri mengontrol sebagian besar pengelolaan dan pengeluaran sumber daya ekonomi rumah tangga. Tidak ada pengeluaran sumber daya ekonomi rumah tangga, termasuk memenuhi kebutuhan suami, seperti membeli rokok dan perlengkapan melaut, yang terlepas dari "restu" isteri. Pola-pola perilaku kultural

ini dipandang sebagai kewajiban dan kebajikan yang harus dipatuhi suami-isteri nelayan agar rumah tangga terjaga keutuhannya.

Perempuan pesisir menghadapi beberapa permasalahan dalam meningkatkan partisipasinya dibidang pembangunan pariwisata antara lain berupa terbatasnya profesionalisme untuk mengelola kegiatan usaha yang mendukung bidang pariwisata, Faktor produksi dan pemasaran produk masih terbatas atau kurang lancar; latar belakang budaya dan persepsi sebagian masyarakat pedesaan yang masih bias gender; keterbatasan dana untuk menyediakan sarana dan prasarana objek wisata, kerjasama dan koordinasi antar sektor/instansi yang kurang intensif sehingga pemberdayaan perempuan pesisir di bidang pariwisata ini masih kurang optimal pelaksanaannya. Sebagian besar perempuan pesisir tidak memiliki keterampilan yang berarti untuk mencari nafkah. Bagi mereka yang memiliki keterampilan, ternyata juga merasa bahwa keterampilan yang telah dimiliki masih belum cukup untuk dapat digunakan sebagai modal berusaha.

Sebagian besar perempuan pesisir adalah kelompok wanita pada usia produktif yang menjadi bagian dari masyarakat pesisir, yang berdomisili di pesisir pantai kepulauan Indonesia atau di pulau-pulau terluar, dengan ciri desa-desa pantai yang relatif tradisional, serta memiliki kehidupan sosial ekonomi yang sangat tergantung pada sumberdaya kelautan. Kehidupan dan perekonomian yang diusahakan perempuan pesisir tidak terlepas dari tradisi komunitas yang melingkupinya. Masyarakat pesisir secara umum memiliki profesi sebagai nelayan, pembudidaya ikan, udang, pengolah dan pedagang hasil laut, mengusahakan pertanian dan pengolahan hasil pertanian dengan jenis tanaman pantai. Peluang

kerja dan pengembangan di sektor perekonomian bagi perempuan pesisir sesungguhnya terbuka luas. Kelebihan dan kekayaan alam pesisir yang memiliki daya tarik wisata juga memberikan ruang yang lebar bagi perempuan untuk membuka usaha ekonomi produktif. Akan tetapi daya serap tenaga kerja wanita selama ini masih belum dapat menempatkan perempuan pada posisi strategis. Tenaga kerja perempuan sebagai unsur yang perlu mendapat perhatian. Perempuan merupakan tenaga kerja yang dapat dikembangkan dan memiliki sifat inheren yang memungkinkan untuk mendukung berlangsungnya suatu usaha ekonomi produktif. Dengan dikembangkannya tenaga kerja perempuan, sangat memungkinkan bagi tumbuhnya sektor usaha ekonomi produktif yang lebih mengakar. Di samping usaha tersebut menjadi penyumbang wadah baru bagi angkatan kerja, juga dapat memberikan dampak positif bagi peningkatan pendapatan per daerah yang akan berdampak kepada berkurangnya konsentrasi kemiskinan di daerah tersebut.

Usaha ekonomi produktif sangat cocok sekali diusahakan oleh perempuan, karena dalam hal ini tidak mengharuskan perempuan meninggalkan 100% dari tugas domestik dalam perawatan anak dan pekerjaan rumah tangga. Usaha ekonomi produktif dapat dilakukan dalam lingkungan rumah, seperti home industri merupakan bentuk usaha ekonomi produktif yang relevan. Perempuan pada dasarnya mempunyai potensi yang sangat penting dalam usaha ekonomi produktif keluarga.

Pemerintah menerapkan keterlibatan perempuan dalam pembangunan melalui Inpres No. 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam

pembangunan nasional (PUG). PUG mencakup perencanaan program maupun pelaksanaannya. Program yang dimaksudkan merujuk pada RPJMN/RPJMD, RKP/RKPD, dan RAPBN/ RAPBD (Anonim 2001). Di sektor perikanan dan kelautan misalnya, kebijakan pengentasan kemiskinan perlu melibatkan perempuan nelayan melalui integrasi kebijakan pembangunan dari kebijakan, dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

Di tingkat Pemerintah Kabupaten Barru pemberdayaan Perempuan di Kampung Nelayan desa Madello seharusnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten sejalan dengan RPJMN. RPJMD SKPD kabupaten Barru yang berkaitan dengan hal tersebut adalah Meningkatkan perekonomian masyarakat yang berorientasi pasar melalui fasilitasi pendampingan usaha oleh tenaga teknis yang trampil, didukung oleh sistem informasi, regulasi dan kelembagaan dengan sumber pembiayaan dari pemerintah dan lembaga keuangan. kebijakan pembangunan jangka menengah daerah yang terkait dengan perekonomian daerah diarahkan pada :

- 1) Mengembangkan transformasi struktur perekonomian dari sektor primer ke sektor sekunder dan tersier.
- 2) Menciptakan jaringan kerjasama dengan lembaga-lembaga mitra.
- 3) Meningkatkan produksi dan produktivitas komoditi pertanian yang semakin berkualitas
- 4) Meningkatkan populasi ternak besar yang bersinergi dengan intensifikasi tanaman pangan.
- 5) Meningkatkan produksi ternak unggas.

- 6) Meningkatkan produksi perikanan tangkap dan budidaya dan sarana prasarananya.
- 7) Meningkatkan produksi dan penyerapan tenaga kerja pada sector industry dan umkm.
- 8) meningkatkan eksploitasi sumber-sumber pertambangan bernilai ekonomis tinggi.
- 9) Meningkatkan kelestarian ekologi dan sumberdaya alam pada wilayah pertambangan.
- 10) Mengembangkan koperasi sebagai bagian dari gerakan social masyarakat dan,
- 11) Meningkatkan kunjungan dan event wisata.

Hal ini seperti terlihat dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Setyawati (2006). Hasil penelitian menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran yang tidak sedikit dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi keluarga. Konsentrasi tenaga kerja perempuan pesisir memperlihatkan kecenderungan pada sektor usaha produktif yang memanfaatkan potensi lokal. Kondisi tersebut juga nampak pada tenaga kerja perempuan pesisir di Desa Madello yang pada hakikatnya banyak terserap dalam tenaga kerja rumah tangga dan usaha ekonomi produktif. Usaha ekonomi produktif yang didukung oleh tenaga kerja perempuan perlu memperoleh porsi perhatian yang penting.

Usaha ekonomi produktif yang didukung oleh tenaga kerja perempuan perlu memperoleh porsi perhatian yang penting. Apalagi letak Desa Madello yang berada dipesisir sangat mendukung sekali perempuan di desa ini untuk

mengusahakan ekonomi produktif. Salah satu binaan yang sudah terwujud adalah home industri terasi, pembuatan sirup mangrove dan berbagai hasil olahan rumput laut.

Selain sudah didukung oleh kemampuan serta keterampilan Ibu-Ibu PKK sendiri, tetapi sangat disayangkan sekali masih banyak potensi sumber daya alam yang belum dioptimalkan. Salah satunya adalah pengolahan abon ikan, selama ini ikan hasil tangkapan nelayan desa Madello masih dijual dalam bentuk segar dan ada yang sudah diolah menjadi kerupuk tetapi pemasaran masih sebatas bila ada pesanan saja. Pengolahan hasil olahan abon ikan yang masih sangat terbatas ini sangat disayangkan sekali, padahal Desa Madello termasuk salah satu penghasil ikan di wilayah kecamatan Balusu. Seharusnya dengan banyaknya diversifikasi pengolahan abon ikan dapat memberikan nilai tambah bagi pendapatan masyarakat di Desa Madello khususnya untuk perempuan atau Ibu-ibu sendiri.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat di Desa Madello, masyarakat Desa Madello harus memiliki kemandirian dalam menopang dan meningkatkan pendapatan mereka, tentunya hal tersebut dapat diwujudkan melalui pemberdayaan masyarakat khususnya melalui pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu pilar dalam penguatan ekonomi daerah secara spesifik, dalam hal ini haruslah dimulai dari lingkungan terkecil dari komunitas masyarakat di desa sendiri. Peran pemerintah dan seluruh *stakeholders* termasuk perguruan tinggi yang menjadi motor penggerak pemberdayaan masyarakat yang merupakan bagian dari tri dharma perguruan tinggi juga sangat diperlukan. Banyak sekali potensi yang ada di Desa Madello sendiri, tetapi

sebagian masyarakat masih banyak yang belum bisa memanfaatkan potensi yang ada. Salah satunya adalah pengolahan abon ikan, masih terbatas dijual dalam bentuk segar walaupun ada sebagian yang sudah diolah menjadi kerupuk tetapi dari segi pemasaran masih sangat terbatas dan hanya menjual bila ada pesanan saja. abon Ikan sendiri memiliki nilai gizi yang bagus, tetapi memang kebanyakan orang jarang sekali suka makan ikan. Tujuan dari diversifikasi olahan abon ikan sendiri diharapkan dapat menarik minat konsumen khususnya yang tidak terlalu gemar makan ikan, bisa merasakan manfaat dari makan ikan sendiri tetapi disajikan dalam bentuk olahan yang menarik dan salah satunya dijadikan dalam bentuk abon. Olahan abon dari ikan sendiri diharapkan dapat menarik minat anak-anak yang memang kebanyakan kurang suka makan ikan menjadi gemar makan ikan dan tentunya sangat baik sekali untuk perkembangan otak mereka.



Gambar 5.1 Penyuluhan dan praktek pembuatan abon Ikan di Desa Madello

Kegiatan penyuluhan dilakukan dengan metode ceramah dan demonstrasi. Metode ceramah dilakukan untuk menyampaikan berbagai informasi umum mengenai kandungan gizi dan manfaat abon ikan serta cara membuat pembukuan usaha. Pembuatan produk olahan dari abon ikan ,

khususnya menjadi abon ikan dilakukan dengan metode demonstrasi.

Materi pelatihan meliputi proses pemisahan abon ikan dari daging dan durinya, pembuatan abon ikan, cara pengemasan, cara penggunaan alat-alat produksi, cara menghitung keuangan dan penentuan harga serta cara pemasaran lewat on line. Evaluasi dilakukan dalam bentuk pertanyaan kontrol yang bertujuan untuk melihat perhatian dan minat dari peserta pelatihan ini.

Peran perempuan pesisir dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Perempuan pesisir dapat meningkatkan sumberdaya manusia dan keterampilan dalam mengolah produk-produk kerajinan limbah hasil perikanan sesuai dengan tuntutan pasar serta menghindari ancaman-ancaman yang dapat menghambat peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat pesisir.

Perempuan pesisir pengrajin limbah hasil perikanan dapat memaksimalkan kekuatan yang ada dengan memanfaatkan waktu luang dari peran intinya sebagai Ibu Rumah Tangga serta bahan baku yang banyak tersedia di daerah tersebut untuk melakukan kerajinan limbah hasil perikanan. Selain itu adanya motivasi yang kuat untuk membantu perekonomian keluarga serta peran dukungan dari pihak pemerintah dalam mengembangkan pemberdayaan masyarakat, dapat dimanfaatkan dengan baik bagi perempuan pesisir pengrajin limbah hasil perikanan untuk mengikuti pelatihan-pelatihan yang bersifat softskill untuk meningkatkan kreatifitas produk yang dihasilkan.

Perempuan pesisir pengrajin limbah hasil perikanan juga dapat memanfaatkan lokasi wisata pantai Ujunge dan pulau Pannikiang, dengan

orientasi konsumen yang merupakan wisatawan dari luar daerah dengan menambah tempat pendistribusian produk kerajinan limbah hasil perikanan seperti ruko-ruko atau outlet souvenir dengan menawarkan produk kerajinan yang mencirikan daerah tersebut. Selain itu, untuk memperluas jaringan pemasaran secara online perempuan pesisir dapat menggunakan perkembangan teknologi baik melalui media sosial maupun penjualan online.

Kelompok perempuan pesisir pengrajin limbah hasil perikanan juga dapat memanfaatkan ajang pameran dan promosi yang bekerjasama dengan Pemerintah untuk memperkenalkan produk-produk yang dihasilkan oleh perempuan pesisir pengrajin limbah hasil perikanan ke pasaran baik di tingkat lokal (dalam daerah) maupun nasional (luar daerah). Kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar dapat ditingkatkan dengan menerapkan strategi tersebut untuk mencapai hasil akhir yang akan memberikan keuntungan pada semua pihak, terutama bagi perempuan pesisir pengrajin limbah hasil perikanan.

Umumnya kaum perempuan mencoba untuk mengembangkan usaha dengan membuka toko atau warung makan karena keterbatasan kemampuan untuk mengembangkan jenis usaha lain. Namun usaha ini sering tidak berhasil karena banyak saingan, pengalaman yang kurang, serta keterbatasan modal untuk kulakan dari Kecamatan lain. Sedikit dari mereka yang mencoba berwiraswasta seperti membuka rias pengantin atau menjahit. Keterbatasan dan tidak menentunya pendapatan mendorong sebagian dari mereka untuk meminjam kepada pada renteiner di desa. Bagi kaum perempuan, meminjam ke renteiner dirasakan lebih mudah karena tidak memerlukan persyaratan administratif

sebagaimana kalau meminjam ke bank.

Keterlibatan perempuan di sektor pariwisata memang semakin meningkat dalam segala bidang usaha pariwisata. Meskipun secara statistik tampak masih terbatas, data penelitian ini menunjukkan bahwa di kawasan wisata Madello tampak adanya keterlibatan perempuan dalam berbagai sektor. Penelitian ini melihat keterlibatan perempuan dalam kegiatan pariwisata, dari dua sisi, yaitu, mereka yang duduk sebagai pengambil keputusan (pemilik) serta mereka yang terlibat langsung dalam kegiatan pariwisata seperti misalnya penjual hasil tangkapan maupun pekerja informal.

Berdasarkan hasil penelitian sebelum dan sesudah pariwisata berkembang secara dinamis di kawasan Pantai Madello, pembagian kerja perempuan dan laki-laki di sini tidak terlalu berbeda, kecuali pada kegiatan domestik sepenuhnya dibebankan kepada perempuan (Setyawati, 2010). Aktivitas kerja lain, bekerja seperti di sawah, mencari pakan ternak, mencari kayu bakar, dan merawat ternak, merupakan kerja bersama atau dilakukan secara bergantian pendapatan mereka rata-rata hanya sebagai pendapatan tambahan dalam keluarga dan mereka menyatakan bahwa dengan memiliki penghasilan sendiri mereka merasa memiliki hal yang tidak jauh berbeda dengan suami/partner dalam mengambil keputusan dalam keluarga.

Keterlibatan seorang perempuan dalam bekerja berdasarkan alasan ekonomi dan sosial. Secara umum perempuan bekerja dengan alasan seperti misalnya untuk mencari tambahan penghasilan keluarga atau untuk alasan pribadi seperti meningkatkan peran dan status mereka dalam masyarakat. Dengan bekerja di sektor

pariwisata, perempuan mendapatkan tambahan pengetahuan secara langsung, seperti misalnya kemampuan (*skill*) berkomunikasi dengan orang lain (wisatawan), selain itu juga kemampuan manajemen perempuan juga semakin meningkat. Seiring dengan meningkatnya kemampuan tersebut mereka secara sosial mempunyai '*bargaining power*' yang lebih baik. Dengan bekerja mereka merasa memiliki nilai tambah (*added value*) di dalam masyarakat. Hal ini membuat mereka merasa lebih dihargai ketimbang hanya sebagai ibu rumah tangga biasa atau sebagai perempuan yang tidak bekerja. Dengan keterlibatan di dunia pariwisata, dalam hal ini pariwisata, narasumber juga yakin bahwa masyarakat lebih menghargai lebih dari itu bisa berperan serta dalam kegiatan sosial di lingkungannya seperti misalnya di lingkungan RT dan dalam kegiatan PKK serta memiliki lebih percaya diri karena merasa memiliki kelebihan di banding dengan mereka yang tidak bekerja.

Menurut keterangan dari kepala desa, perempuan tidak pernah diikuti sertakan dalam kegiatan pembangunan daerah, karena masalah pembangunan di serahkan sepenuhnya kepada laki-laki atau pengurus desa yang sebagian besar adalah laki-laki, dan juga di tambahkan oleh ibu desa sekaligus sebagai ketua PKK, bahwa urusan pembangunan daerah bukan urusan perempuan karena perempuan hanya di masukkan dalam berbagai kegiatan PKK. Jadi kesadaran tentang penyeteraan gender masih belum terlalu di pahami ataupun disadari oleh pemerintah Desa Madello, sehingga mereka tidak menyadari adanya ketimpangan gender yang di alami oleh perempuan yang ada Di Desa Madello. Karena menurutnya perempuan itu tidak terlalu penting untuk di masukkan dalam berbagai program pembangunan daerah, karena perempuan sibuk mengurus

rumah tangga mereka, apalagi jika perempuan itu juga mempunyai kesibukan lain selain sebagai ibu rumah tangga.

Kegiatan-kegiatan yang dibentuk oleh PKK harus berdasarkan persetujuan dari kepala desa, jadi setiap kelompok PKK ingin mengadakan kegiatan, ketua PKK harus melaporkan terlebih dahulu rencana kegiatannya kepada kepala desa. Kegiatan yang sudah pernah dilakukan kelompok PKK adalah pelatihan menjahit, pelatihan pembuatan kue, dan pembentukan kelompok Majelis Taklim, namun kegiatan yang paling sering dilakukan adalah pembuatan kue, karena bahannya bisa mereka siapkan dan tidak mengeluarkan biaya yang banyak. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Pelatihan menjahit ataupun pelatihan pembuatan kue bertujuan untuk pembekalan keterampilan kepada para ibu rumah tangga agar mereka dapat menjadi perempuan yang mandiri, dengan membuka usaha sendiri sehingga kesejahteraan terhadap perempuan dapat tercapai.
- 2) Pembentukan kelompok Majelis Taklim bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada para ibu rumah tangga mengenai pengetahuan agama, serta bertujuan untuk memperkuat tali silaturahmi untuk semua ibu-ibu rumah tangga yang ada di Desa Madello, dalam majelis taklim itu juga mereka membentuk arisan agar bisa mengajarkan para ibu rumah tangga untuk menabung.

Namun tujuan-tujuan itu belum dapat tercapai secara maksimal karena masih banyak perempuan-perempuan yang ada di Desa Madello tidak mengaplikasikan berbagai pelatihan yang mereka dapatkan dari PKK,

sementara PKK pun juga belum memberikan pelatihan lebih jauh kepada para anggotanya tentang cara pengaplikasian dari berbagai kegiatannya misalnya pembelajaran tentang wirausaha, agar stiap anggotanya bisa membuka usaha sendiri dan menjadi perempuan-pertempuan yang mandiri. Sebagian besar perempuan yang ada di Desa Madello memang lebih cenderung kurang aktif dalam kegiatan publik, mereka lebih konsentrasi pada kegiatan domestik, sehingga ketergantungan para ibu-ibu rumah tangga terhadap suami cukup tinggi. Kurangnya modal keterampilan yang dimiliki oleh para ibu-ibu rumah tangga membuat mereka kurang mandiri, dan hal tersebut disadari oleh kelompok PKK sehingga ia membentuk berbagai kegiatan yang bisa memberikan modal keterampilan usaha bagi para ibu rumah tangga yang ada di Desa Madello, apalagi kelompok PKK yang ada di Desa Madello baru diaktifkan setelah yang menjadi ketua PKK adalah MT, ketua PKK yang lalu tidak begitu aktif dalam melakukan berbagai kegiatan PKK, meskipun struktur organisasi dari kelompok PKK Desa Madello ada.

Pengurus anggota kelompok PKK adalah ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan ataupun kesibukan. Ketua PKK sengaja memilih para ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan ataupun kesibukan lainnya, agar mereka lebih mudah diajak kerjasama jika ada berbagai kegiatan-kegiatan dibanding perempuan yg memiliki kesibukan lain ataupun pekerjaan, mereka akan sulit untuk ikut aktif dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PKK. Sementara kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Majelis Taklim tidak jauh berbeda dengan kegiatan yang di lakukan oleh PKK karena yang membentuk

Majelis Taklim adalah PKK, hanya saja dalam kelompok Majelis Taklim, mereka membentuk kegiatan pengajian atau siraman rohani dan juga membentuk arisan. Kelompok majelis taklim mempunyai struktur organisasi tersendiri, setiap dusun mempunyai ketua Majelis Taklim tersendiri namun mereka tetap dikordinir oleh PKK.

Namun pada kenyataannya, kegiatan pengajian itu tidak berjalan aktif, karena menurut ketua majelis taklim yang ada di Dusun Latimpa, mereka hanya mengadakan pengajian itu sekali saja, yaitu pada saat pembukaan kelompok majelis taklim yaitu pada tanggal 7 agustus 2011 di mesjid Ar-Rahman Dusun Latimpa. Masyarakat lebih sibuk dengan kegiatan sehari-harinya di rumah ketimbang kegiatan pengajian.

Masyarakat Desa Madello tidak dengan mudah mengubah pola aktivitasnya sebagai ibu rumah tangga, mereka sudah terbiasa dengan aktivitas-aktivitasnya di dalam rumah (kegiatan domestik), sehingga pada saat ada kegiatan-kegiatan yang berbeda dari kegiatan rumah tangga seperti pengajian, mereka akan merasa malas untuk mengikuti kegiatan tersebut karena mereka belum terbiasa dalam kegiatan-kegiatan diluar aktivitas rumah tangga atau pekerjaan domestik.

Kegiatan pelatihan menjahit dan pelatihan pembuatan kue sudah dilakukan selama empat bulan, yaitu mulai tanggal 10 Juli 2011, dan terakhir mereka mengadakan pelatihan pembuatan kue abon-abon ikan, kegiatan ini tidak mempunyai waktu tertentu karena kegiatannya dikondisikan oleh kesempatan masing-masing anggota PKK, dan kegiatan yang sering di lakukan

adalah pembuatan kue abon-abon ikan, karena bahan utamanya adalah ikan sementara di Dusun Ujunge adalah daerah nelayan, sehingga pelatihan pembuatan kue itu lebih sering diadakan di Dusun Ujunge, tempat pelatihan itu diadakan secara bergiliran di rumah anggota-anggota PKK, masyarakat lebih antusias dengan pelatihan ini karena kebiasaan mereka dalam rumahnya melakukan kegiatan memasak, sehingga mereka lebih tertarik pada kegiatan yang berkaitan dengan pekerjaan domestik.

Perhatian pemerintah untuk perkembangan kelompok-kelompok perempuan yang ada di Desa Madello sangat kurang, sehingga perempuan ini merasa sangat terbatas dalam berbagai aktivitasnya untuk menjadi perempuan yang mandiri, ini juga merupakan salah satu penyebab ketertinggalan para perempuan yang ada di Desa Madello dalam hal kemandiriannya, karena pemerintah adalah sebagai motor penggerak dalam perkembangan masyarakatnya, sehingga tanpa peranan pemerintah masyarakat akan susah untuk mengalami kemajuan ataupun perkembangan. Pemerintah yang baik adalah pemerintah yang memberikan perhatian penuh kepada berbagai kegiatan-kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan kemajuan masyarakat.

Organisasi Kelompok Wanita Tani ini dibentuk oleh dinas pertanian yang di lantik oleh kepala desa, yaitu pada tanggal 16 september 2008, organisasi ini berbeda dari kelompok PKK, karena setiap kegiatan yang akan dilakukan oleh Kelompok Wanita Tani (KWT) diputuskan oleh para anggota kelompok wanita tani itu sendiri tanpa harus mendapat izin dari pemerintah desa, meskipun kegiatan yang dilakukannya dilaporkan kepada pemerintah Desa Madello.

Kelompok Wanita Tani ini berdiri sendiri, hubungannya dengan pemerintah desa hanya sebatas hubungan kerja sama dalam membangun masyarakat Desa Madello khususnya para perempuan-perempuan.

Yang dipilih sebagai ketua kelompok wanita tani adalah seorang sarjana pertanian, namun aktivitasnya hanyalah sebagai ibu rumah tangga, ia tidak memiliki kesibukan yang banyak, namun ia membuka usaha jualan di rumahnya, jadi ia tidak terlalu sibuk dengan urusan diluar rumah, suaminya adalah seorang guru SMP, ia mempunyai anak satu yang sekarang juga sudah melanjutkan pendidikannya di salah satu perguruan tinggi yang ada di Makassar. Ketua Kelompok Wanita Tani adalah salah satu perempuan yang tidak memiliki kesibukan banyak, termasuk pada kegiatannya di kelompok wanita.

Kelompok Wanita Tani lebih berkonsentrasi pada aktivitas pertanian untuk para perempuan, tujuan dibentuknya organisasi ini adalah untuk membantu para perempuan dalam mengelola usaha pertanian, ini adalah salah satu bentuk usaha penyetaraan gender yang di upayakan oleh Kelompok Wanita Tani, jadi pertanian itu pun juga bisa dilakukan oleh para perempuan sehingga dapat membantu mereka untuk mendapatkan penghasilan sendiri dan menjadi perempuan-perempuan yang mandiri sehingga ketergantungan istri terhadap laki-laki yang cukup tinggi dapat berkurang.

Kegiatan-kegiatan yang dibentuk oleh kelompok wanita tani adalah menyangkut pertanian, dan kegiatan yang sudah pernah mereka lakukan adalah, memberikan sosialisasi kepada masyarakat tentang pengelolaan pertanian yang baik, kegiatan ini di lakukan sejak awal dibentuknya organisasi ini

yaitu pada tahun 2008, awal dibentuknya organisasi ini ketua kelompok wanita tani sangat antusias dalam mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai pertanian, namun itu hanya dilakukannya selama beberapakali saja karena masyarakat ternyata tidak terlalu merespon dengan baik, utamanya para perempuan yang juga menjadi fokus utama kelompok wanita tani, perempuan yang ada di Desa Madello hampir tidak ada ditemukan perempuan yang bekerja dibidang pertanian, dalam data penduduk desa hanya ada satu orang perempuan yang bekerja sebagai petani.

Sebagian besar hanya sebagai ibu rumah tangga biasa tanpa ada pekerjaan ataupun aktivitasnya yang lain. Biasanya perempuan atau para istri-istri ke sawah apabila ingin membantu suaminya memanen padi, itu pun peranan perempuan cukup sedikit. Sementara tujuan dari sosialisasi pertanian yang dilakukan oleh kelompok wanita tani adalah mengharapkan agar perempuan pun dapat berpartisipasi dalam usaha pertanian, utamanya kepada para ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan dan memiliki lahan persawahan. Namun pada kenyataannya, dalam masyarakat Madello khususnya perempuan tidak terbiasa melakukakn pekerjaan yang pada umumnya adalah pekerjaan laki-laki.

Pada tahun 2010 kelompok wanita tani kembali mensosialisasikan tentang penanaman toga, penanaman toga ini dapat dilakukan di rumah-rumah warga tanpa harus memiliki lahan perkebunan luas, tanaman toga ini pun juga dapat membantu para warga dalam kebutuhan sehari-harinya misalnya sayur-sayuran ataupun tanaman obat. Namun pada kenyataannya, masyarakatpun tidak juga

terlalu meresponnya, hanya ada beberapa rumah saja yang bisa kita dapati tanaman toga tersebut dan ini yang menjadi kendala terbesar kelompok wanita tani yaitu membuat masyarakat menyadari akan fungsi dari berbagai kegiatan yang dibentuk oleh kelompok wanita tani, sehingga kelompok wanita tani sampai saat ini fakum dalam berbagai kegiatan-kegiatan perempuan.

“Susah itu buatki masyarakat ikuti ki karena mungkin nda’ terlalu na pahamiki fungsinya ini kegiatan, padahal dirumahnya ji disuruh menanam sayur, nda tau mi itu bilang kenapa, apa karena nda tauki atau memang malaski ” (Wawancara, Ati, 19 Agustus 2021).

Adapun cara kelompok wanita tani mensosialisasikan tentang penanaman toga ini hanya di dusunnya saja, itupun tidak secara menyeluruh karena ia tidak melakukannya dengan membuat sebuah pertemuan, ia hanya memberitahukan masyarakat melalui pembicaraan yang biasa saja, sehingga banyak masyarakat yang tidak terlalu mengetahui tentang penanaman toga ini.

Kelompok wanita tani pada kenyataanya tidak terlalu bekerja secara maksimal dalam mengajarkan para ibu-ibu rumah tangga yang tidak memiliki pekerjaan, mengenai penanaman toga ataupun cara bertani, selain itu juga karena adanya faktor budaya yang tidak membiasakan para perempuan mengerjakan pekerjaan yang pada umumnya dilakukan oleh laki-laki, salah satunya adalah pekerjaan bertani.

Pemberdayaan perempuan di desa Madello di bagian kedalam tiga kelompok antarlain;

- 1) Kelompok perempuan yang dibentuk oleh dinas pertanian yaitu Kelompok Wanita Tani (KWT),

- 2) Kelompok perempuan yang dibentuk oleh pemerintah Desa Madello adalah Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK),
- 3) Kelompok Majelis Taklim yang dibentuk oleh PKK.

Di samping itu, Scheyvens (2000) menyatakan bahwa dengan bekerja dan bergabung dalam kelompok, maka fungsi pemberdayaan sosial bisa meningkat. Rasa kesatuan dan persatuan karena terikat dalam kegiatan yang sama akan memberikan dinamika yang lebih tinggi pada masing-masing individu merasa disertakan dalam kegiatan ekonomi yang menghasilkan. Para perempuan inipun merasa bahwa mereka diperlakukan sesuai dengan kemampuannya bukan karena mereka perempuan. Secara umum, narasumber menyatakan bahwa keterlibatan dalam pengembangan kemampuan di tempat bekerja memberikan kepuasan pada mereka sehingga bisa berproduksi lebih bagus di masa yang akan datang. Dari dalam keluarga, para perempuan ini menyatakan bahwa mereka memiliki kesempatan yang sama dalam keluarga karena kebanyakan mereka diberi hak yang sama dalam mengambil keputusan-keputusan yang diambil dalam keluarga.

Hal ini penting karena secara sosial budaya masyarakat di kawasan desa Madello masih menganggap perempuanan posisinya lebih rendah dari kaum lelaki, sehingga mereka tidak diberi tanggung jawab yang besar baik di rumah maupun di tempat kerja. Sayangnya persepsi pekerja perempuan juga tidak jauh berbeda dengan pendapat para pemangku kepentingan pariwisata sehingga mereka pun merasa baik-baik saja jika diperlakukan tidak sama karena mereka perempuan. Meski begitu ada beberapa informan yang menyatakan bahwa kesempatan mereka

untuk berkembang sama besarnya dengan kaum laki-laki. Para perempuan yang belum memiliki peluang untuk berperan serta dalam pengembangan pariwisata pada umumnya menyatakan keinginannya untuk mengembangkan kemampuan secara sosial lebih dihargai. Keterlibatan tersebut bisa keterlibatan aktif maupun aspiratif. Pertama mereka menyatakan perlu ikut berperan serta memberikan atau meningkatkan kesadaran masyarakat umum tentang arti penting dan mendorong kaum perempuan untuk lebih banyak terlibat didalamnya karena membuka peluang kerja bagi mereka. Kedua didorong dan motivasi dari para pemangku kepentingan di pariwisata agar keinginan perempuan untuk lebih terlibat dalam memfasilitasi sehingga keinginan tersebut bisa terwujud.

Dalam skala yang lebih luas, peningkatan status sosial dalam masyarakat karena, berperan serta dalam kegiatan pariwisata ada dua, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Yang pertama misalnya dengan bekerja mereka mendapatkan keuntungan ekonomis sehingga kehidupan keluarga akan terjamin, sedangkan pengaruh yang tidak langsung termasuk kesempatan mendapatkan akses yang lebih bagus terhadap fasilitas-fasilitas umum seperti misalnya sarana air bersih dan jalan yang semakin baik serta akses ke klinik-klinik kesehatan.

Pariwisata yang efektif sebagai kegiatan yang berbasis masyarakat semestinya memberikan keuntungan bagi masyarakat, karena sebagian dari kegiatan mereka disihkan untuk kegiatan konservasi alam jika kegiatan pariwisata melibatkan alam sebagai dasar kegiatannya.

Keterlibatan perempuan dalam kegiatan pariwisata juga bisa menguntungkan secara budaya. Misalnya dengan kegiatan di dalamnya, para pekerja perempuan akan mulai mengenal hasil karya seni dan budaya serta kegiatan-kegiatan yang mendukung pariwisata, karena seni dan budaya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pariwisata. Mereka merasa bahwa kegiatan di bidang ini membawa pandangan ke arah positif dan hal ini akan membawa kaum perempuan ke arah pemberdayaan perempuan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan budaya. Para narasumber mengatakan bahwa dengan bekerja di sektor pariwisata, mereka menambahkan cinta budaya lokal seperti kesenian setempat sebagai salah satu produk budaya lokal. Para narasumber juga mengharapkan agar mereka lebih sering dilibatkan dalam acara-acara budaya sehingga lebih dapat dikenal oleh masyarakat dan peluang mereka untuk memproduksi hasil karya bisa lebih serta memberikan peluang pekerjaan bagi perempuan lain di sektor ini.

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa peluang dan kendala yang dihadapi untuk dapat aktif terlibat dalam kegiatan pariwisata. Di antaranya adalah adanya kesempatan untuk mengembangkan potensi pribadi yang cukup besar yang nantinya bermanfaat bagi kegiatan pariwisata dan perempuan yang terlibat di dalamnya. Secara umum mereka menyatakan bahwa peluang perlu ditingkatkan oleh pemerintah untuk melibatkan mereka secara aktif dalam kegiatan riil, seperti misalnya pameran pariwisata tingkat regional maupun nasional. Pengembangan jejaring juga penting untuk dilakukan, terutama atas bantuan pemerintah agar pemasaran produk atau jasa dapat berkembang lebih luas. Namun

jika dihadapkan secara lebih mendalam maka tantangan yang dihadapi perempuan dalam pengembangan pariwisata di desa Madello ini cukup besar, karena mereka masih memiliki keterbatasan antara lain kreativitas yang kurang, ketegasan, dan akses, baik untuk akses produksi dan jasa serta akses pemasaran. Oleh karena itu perlu ditingkatkan dukungan dari pemerintah daerah, tidak hanya untuk pengembangan produk, tetapi juga pemasaran serta peningkatan kemampuan (*skills*) dengan cara *training* serta kursus. Hal ini akan meningkatkan kemampuan mereka dalam memproduksi sehingga kesejahteraan mereka akan lebih terjaga.

Resesi dan pandemi Covid-19 telah memperbesar dampak bagi perempuan baik dari sisi keamanan ekonomi, pekerjaan, representasi politik hingga kesehatan. Sektor yang didominasi perempuan seperti pariwisata, retail, penjualan, manufaktur terpuak parah selama masa PSBB. Perempuan lebih banyak berada pada pekerjaan yang sifatnya sementara atau paruh waktu.

a. Kegiatan Ekonomi Produktif Perempuan Pesisir

Sebagian masyarakat Desa Madello di wilayah pesisir. Mata pencaharian masyarakat pesisir sebagian besar nelayan, pembuat jaring, dan usaha hasil tangkapan laut. masyarakatnya memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, pembuat jaring dan pengolah hasil perikanan dan petani. Nelayan di Desa Madello pergi melaut untuk mencari cumi-cumi, ikan, udang serta hasil laut lainnya. Umumnya nelayan dari Desa Madello adalah nelayan Ikan. Mereka pergi melaut jam 3 sore dan pulang jam 8 malam untuk memasang jaring perangkap. Kemudian jam 3 pagi esok harinya mereka pergi melaut lagi untuk mengambil hasil tangkapan. Tetapi ada juga

nelayan yang melaut sampai ke Parepare dan selat makassar sehingga membutuhkan waktu sehari-hari hingga sepekan.

Upaya mengoptimalkan pemberdayaan perempuan dan upaya membangkitkan daerah yang miskin, dapat ditempuh salah satunya dengan mendampingi perempuan untuk peningkatan potensi perempuan yang telah ada, melalui pengembangan usaha produktif dan diversifikasi hasil lokal secara berkelompok. Dalam proses pemberdayaan perempuan ini diajak untuk mengenali dulu apa yang menjadi kebutuhan riil perempuan baik kebutuhan praktis maupun kebutuhan strategis, dan permasalahannya. Sehingga perempuan sendirilah yang menentukan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dari solusi yang ditentukan.

Dengan meningkatnya kemandirian perempuan dalam bidang ekonomi akan meningkatkan pula penghasilan dan kesejahteraan keluarganya. Selanjutnya akan mampu mempengaruhi perempuan lain agar mau ikut ambil bagian dalam peningkatan keterampilan dan pengetahuan, sehingga akhirnya mampu pula meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir (Indriyati, dkk 2009).

Peran wanita di Desa Madello memiliki peran ganda, yaitu sebagai ibu rumah tangga dan pencari nafkah untuk membantu meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Jumlah dan curahan waktu wanita dalam kegiatan rumah tangga umumnya lebih tinggi dibandingkan kaum pria. Menurut Ninik (2011), program pemberdayaan ditujukan agar masyarakat lebih berdaya dengan melibatkan masyarakat dalam pengambilan

keputusan, dalam rangka pembangunan desa dengan tujuan yaitu dalam pengentasan kemiskinan. Istri nelayan yang ikut terlibat dalam kegiatan produktif mempunyai peran dominan dalam mengatur pengeluaran rumah tangga sehari-hari, sehingga sudah sepatutnya peranan istri-istri nelayan tersebut menjadi salah satu pertimbangan dalam setiap program pemberdayaan.

Menurut Indrawasi (2001), besarnya peranan istri dalam rumah tangga yaitu dalam kegiatan domestik dan terutama kegiatan ekonomi akan mempengaruhi posisi istri dalam pengambilan keputusan terhadap berbagai persoalan dalam rumah tangga. Istri nelayan memiliki peran penting dalam peningkatan pendapatan rumah tangga. Seperti yang diungkapkan oleh Handayani (2009), bahwa perempuan bekerja adalah untuk membantu perekonomian keluarga.

Jika dilihat dari jenis pekerjaan yang dilakukan oleh istri nelayan di Desa Madello dapat disimpulkan bahwa pekerjaan yang dilakukan tidak memerlukan tingkat pendidikan yang tinggi. Jika dikaitkan dengan hasil penelitian Nilakusumawati (2009), yang menyatakan bahwa pada umum yang terlibat pada pekerjaan sektor informal memiliki tingkat pendidikan rendah.

Beberapa ibu-ibu buruh pengolah ikan yang diwawancarai seperti Ibu Raodah, Rahma, dan Darni mengatakan bahwa mereka mengerjakan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian, mencuci piring, membersihkan dan membereskan rumah, belanja, dan memasak sejak pukul

5 pagi hingga pukul 8 pagi kemudian dilanjutkan bekerja mencari nafkah (mengolah ikan) hingga pukul 4 sore. Sepulangnya bekerja mencari nafkah, ibu-ibu pengolah kembali bekerja untuk urusan domestik seperti membersihkan rumah, menemani anak belajar (seperti yang dilakukan Ibu Nani dan Masidah yang memiliki anak usia SD), serta menonton televisi. Pendapatan keluarga nelayan yang minim mendorong istri nelayan untuk lebih berdaya dan produktif agar perekonomian keluarga mereka lebih baik dan sejahtera. Dalam masyarakat dimana keluarga sebagai satuan terkecil mengalami kekurangan ekonomi akan menjadi alasan kuat bagi para wanita melakukan kegiatan ekonomi produktif untuk menambah pendapatan keluarga. Hal tersebut didesak pula oleh kurangnya penghasilan suami dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, sekalipun para suami yang tidak menuntut istrinya untuk bekerja. Sebagaimana penuturan beberapa pengolah seperti Ibu Nani, Ibu Rahma, dan Ibu Darni yang mengatakan bahwa suami mereka tidak pernah menuntut istrinya mencari nafkah, tetapi penghasilan suami sebagai nelayan maupun tukang bangunan tidak mencukupi kebutuhan keluarga sehari-hari. Ibu Raodah usia 34 tahun, salah seorang agen kecil yang memiliki 2 orang anak yang masih bersekolah SMP dan TK menuturkan bahwa kondisi ekonomi keluarganya menjadi lebih baik setelah ia menjadi anggota UMKM pengolah abon ikan. Saat ini ia memiliki 10 orang buruh pengolah yang semuanya wanita, baik muda maupun tua. Begitu pula dengan keluarga Ibu Odah usia 47 tahun, yang memiliki 5 orang anak dan 2 orang cucu merupakan salah seorang agen kecil yang memiliki 7 orang buruh untuk mengolah ikan.

Ibu Odah menjadi tulang punggung keluarganya karena suaminya tidak bekerja lagi. Usaha menjadi agen kecil pengolah perikanan memberinya keuntungan yang cukup besar, sehingga ia mampu memenuhi kebutuhan keluarganya.

Berdasarkan wawancara dengan Ibu Masreni dan Ibu Odah, diperoleh data tentang pendapatan dan biaya usaha mengolah ikan. Harga ikan mentah untuk jenis lokal Rp 50.000 per kg sedangkan ikan kecil Rp35.000 per kg. Daging ikan yang telah diolah dijual ke agen besar dengan harga Rp 200.000 per kg. Dalam waktu sehari agen kecil seperti Ibu Masreni, Ibu Odah, dan Ibu Sana'ah mampu mengolah ikan segar sekitar 25-30 kg daging. Jadi dalam sehari penghasilan kotor pengolah ikan kecil ini maksimal dapat mencapai Rp1.500.000. Penghasilan yang diperoleh agen kecil tidak hanya dari pengolahan perikanan, ikan kecil pun dapat dijual dengan harga Rp 10.000 per kg, sedangkan bila diolah menjadi ikan asin harga jualnya lebih tinggi yaitu Rp 15.000 per kg. Usaha mengolah hasil perikanan bukan usaha tanpa kendala. Kadang agen kecil seperti ibu Rahma, Ibu Sana'ah, dan Ibu Odah ini mengalami kerugian jika ikan yang diperoleh dari nelayan atau dibeli dari tempat pelelangan ikan kurang segar, sehingga daging ikan yang dihasilkan kurang baik untuk diolah. Kendala lainnya yang menjadi permasalahan dalam usaha pengolahan ikan ini adalah ketergantungan pada hasil tangkapan suami. Seperti diketahui bahwa usaha nelayan sangat tergantung pada cuaca dan musim. Jika cuaca buruk, maka ikan menjadi langka, sehingga ketika produksi ikan yang

dihasilkan oleh suami rendah, maka rendah pula produksi ikan olah yang dihasilkan oleh istri. Seperti yang dilakukan Ibu Odah yang beralih melakukan usaha lain agar tetap mendapatkan penghasilan untuk membiayai kebutuhan mereka sehari-hari.

B. Potensi yang dimiliki Desa Madello sehingga dapat dijadikan sebagai Desa Wisata Bahari

Pembangunan dibidang pariwisata merupakan upaya-upaya untuk mengembangkan dan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah dimiliki oleh suatu daerah agar lebih baik lagi, karena di tiap-tiap daerah pastinya memiliki kekayaan alam yang indah dan keragaman tradisi seni budaya serta peninggalan dan purbakala yang berbeda-beda.

Menurut Yoeti, pengembangan adalah usaha atau cara untuk memajukan serta mengembangkan sesuatu yang sudah ada. Pengembangan pariwisata pada suatu daerah tujuan wisata selalu akan diperhitungkan dengan keuntungan dan manfaat bagi masyarakat yang ada di sekitarnya. Pengembangan pariwisata harus sesuai dengan perencanaan yang matang sehingga bermanfaat baik bagi masyarakat, baik juga dari segi ekonomi, sosial dan juga budaya.

Dampak ekonomi bagi masyarakat ketika memiliki objek wisata berpengaruh besar bagi masyarakat di sekitar area objek wisata. Adanya pembangunan objek wisata dapat meningkatkan pendapatan sehari-hari. Seperti yang diutarakan dari hasil wawancara narasumber oleh sebagai berikut:

“Iya jelas mereka kemarin-kemarin yeah sessah cede too tapi selama ada wisata pangeli bale, pangeli kaluru iyah bisa. Artinya

sangat berdampak bagi masyarakat disini wawancara:Rahmi, dusun Ujunge 23 Juli 2021).

Maksud dari hasil wawancara peneliti di atas bahwa masyarakat sebelumnya kesusahan dalam menghasilkan pendapatan. Namun adanya rencana untuk mengelolah tempat wisata ini mereka sudah ada pendapatan sehari-harinya. Pembangunan objek wisata ini sangat berdampak bagi masyarakat sekitar dengan ini mereka bisa memanfaatkannya dengan membangun usaha kecil-kecilan untuk meningkatkan pendapatan sehari-hari. Dan hasil wawancara yang diutarakan oleh Rahmi berikut:

“Iyah, bahwa dulunya ekonomi masyarakat pencarian hanya nelayan dan sawah tapi kalau memang nanti ini pantai ujunge mau dijadikan tempat wisata pantai pasti banyak warga yang senang karena kita bisa buka warung-warung kecil, jadi ada penghasilan tambahan (wawancara:Rahmi, dusun Ujunge 23 Juli 2021).

Objek wisata di Desa Madello ini berdampak secara ekonomi bagi masyarakat dalam membangun usaha kecil-kecilan untuk meningkatkan perekonomian. Namun secara umum masyarakat sekitar wisata memiliki pencarian sebagai mayoritas petani dan nelayan. Sehingga adanya pembangunan objek wisata ini akan melibatkan mereka membuka lembaran baru untuk membangun usaha kecil-kecilan dalam meningkatkan pendapatanya.

Pembangunan kawasan wisata di Madello untuk saat ini masuk di fokuskan di pulau Pannikiang, sebab kawasan ini sangat potensial, telah banyak wisatawan yang berkunjung ke pulau pannikiang hanya saja fasilitas wisata di sana kurang mendukung.

Perkembangan sektor pariwisata di Kabupaten Barru berkembang dengan

sendirinya, sehingga antara obyek yang satu dengan obyek yang lain tidak saling mendukung. Sehubungan dengan hal tersebut, dibutuhkan visi mengenai pembangunan yang seimbang, memantapkan kemitraan, dan kesejajaran antara pariwisata dan sektor lain. Oleh karena itu di perlukan suatu rumusan strategi pengembangan obyek wisata khususnya pada Obyek Wisata Bahari di Desa Madello.

1) Daya Tarik alam;

Hal yang unik dari Desa Madello adalah daya tarik alam yang begitu memukau dan eksotis yang terdiri dari batuan Karts, persawahan dan pantai. Bahkan bahkan didesa yang terdiri dari 5 dusun ini memiliki 1 pulau yang banyak merupakan paradise mangrove dan menjadi habitat hidup kelelawar sehingga pulau itu disebut pulau Pannikiang yang berarti pulau kelelawar. Dengan adanya daya tarik alam pada pulau Pannikiang dan pantai di dusun Ujunge, wisatawan dapat melakukan aktifitas camping di sekitar lokasi wisata, berenang, menikmati dan mempelajari aktivitas nelayan. Panorama alam yang indah terlihat dari frekuensi kunjungan wisatawan dipulau pannikiang yang banyak di unggah ke media sosial, Jadi dapat dikatakan prioritas aktifitas wisatawan di pulau pannikiang kebanyakan adalah menikmati keindahan panorama alam yaitu dengan mengambil gambar (foto) dan menikmati pemandangan mangrove dan laut yang indah sepanjang pulau pannikiang, untuk menikmati seluruh bentang alam pulau dan

keindahan mangrovenya telah didirikan suatu menara kayu, wisatawan dapat naik ke atas menara dan melihat seluruh pemandangan pulau dan mendapatkan foto yang instagramable.

2) Ketersediaan lahan untuk pengembangan;

Adanya lahan yang kosong di sekitar lokasi wisata pulau Pannikiang yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan obyek wisata. Lahan kosong yang tidak dimanfaatkan menimbulkan kemubaziran dan hilangnya kesempatan usaha dan bekerja bagi masyarakat demikian pula halnya dengan pemerintah dari segi pendapatan daerah.

3) Dukungan masyarakat setempat;

Adanya dukungan masyarakat ini menunjukkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah yang harus dijaga dengan baik, sosialisasi dan membahas setiap upaya dan tahap kegiatan merupakan kunci agar masyarakat merasa dilibatkan dan tidak berprasangka buruk, sehingga masyarakat merasa ikut bertanggung jawab dengan keberhasilan pengembangan dan ikut menjaga kenyamanan, keamanan serta kelestarian lingkungan.

4) Keinginan pemerintah untuk mengembangkan Obyek wisata Pulau Pannikiang

Pemerintah Kabupaten Barru berencana untuk mengembangkan obyek wisata pulau Pannikiang dengan system pengelolaan kepariwisataan

daerah yang mandiri terutama dalam hal pembiayaan dan penyediaan sumber daya manusia. Dukungan ini direalisasikan dalam bentuk pemberian izin penelitian kepada akademisi dan mahasiswa yang ingin melakukan penelitian dipulau pannikiang terkait ekosistem mangrove dan sebagai laboratorium ilmiah.

Potensi penunjang objek wisata merupakan hal penting untuk lancar usaha pariwisata, adapun potensi penunjang yang dimaksud adalah sarana dan prasarana penunjang seperti; akomodasi (toilet umum dan gazebo), jaringan jalan, dan jaringan komunikasi. Kesemua hal ini telah tersedia di Pulau Pannikiang.

Walaupun belum adanya perhitungan yang akurat akan jumlah kunjungan wisatawan yang mengunjungi Obyek wisata pulau Pannikiang di Desa Madello, namun dari berbagai informasi dari masyarakat yang di peroleh peneliti, mengemukakan bahwa kunjungan wisatawan pada Obyek wisata Pulau Pannikiang pada waktu-waktu libur mengalami peningkatan apalagi dengan banyaknya pengunjung membagikan foto-foto mereka pada saat menikmati obyek wisata Pulau Pannikiang di social media.

Yang menjadi kendala dalam pengembangan objek wisata di Desa Madello adalah Dalam Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Barru tahun 2016-2030, pengembangan obyek wisata Desa Madello khususnya di dusun Ujunge dan Pulau Pannikiang belum menjadi prioritas hal ini dikarenakan terdapat obyek wisata lain yang menjadi prioritas antarlain; Air Terjun Waesae (Prioritas), Lappa Laona (Prioritas), Hutan Pinus Lajoanging (Prioritas), Batu

Mallopie (penunjang), Lembah Harapan (penunjang), Wae Nunge (penunjang), dan untuk obyek wisata di Desa Madello sendiri masih sebatas penunjang.

a. Potensi Wisata yang Dimiliki Desa Madello

Sebagai sebuah desa yang berada di wilayah pesisir, desa madello memiliki beberapa potensi wisata Bahari yang belum dikelola secara maksimal diantaranya;

- 1) Pulau Pannikiang
- 2) Pantai Ujunge
- 3) Wisata Kuliner
- 4) Eduwisata di hutan Mangrove
- 5) Snorkling dan berenang

Basic culture masyarakat, termasuk kaum perempuan di Desa Madello, lebih menunjukkan pada kedekatan kultur nelayan dibandingkan kultur petani. Oleh karena itu pengembangan wisata Desa Madello saat cocok untuk diarahkan dalam pengembangan wisata Bahari. Khususnya di dusun Ujunge dan Pulau Pannikiang.

“Pengembangan destinasi ini dalam beberapa tahun terakhir kita sedang mempersiapkan kesiapan administrasi lahan, seperti pengurusan sertifikat karna itu claim punya kita. Namun terkadang pemerintah sendiri lemah pada administrasinya, seperti pulau pannikiang yang ingin kita manfaatkan lokasinya dan semoga disetujui oleh pusat melalui dana alokasi khusus pada sarana fisik, kita ingin mempersiapkan pulau pannikiang untuk kita tata dan kelola dengan baik (Wawancara: Staf Dinas Pariwisata Kab Barru)

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa,pemerintah kabupaten Barru dalam hal ini Dinas Pariwisata Kabupaten Barru sebeanrnya telah memiliki program untuk mengembangkkn pulau pannikiang sebagai salah satu objek wisata prioritas namun masih terkendala dalam hal administrasi dan dan pembangunan. Meskipun begitu hal ini masih diupayakan hingga saat ini sebab Kabupaten Barru memiliki banyak potensi wisata yang belum dikelolah secara maksimal, menurut penuturan salah seorang narasumber;

“Wisata bahari yang sudah ada seperti pulau Pannikiang dan beberapa pantai lainnya di kabupaten Barru itu sebenarnya sudah ada lahannya, tapi kan itu masih diberikan kepada penjaganya. Sebenarnya ada wisata bahari yang di Pulau Pannikiang, tapi sampai saat ini masih dalam tahap penataan. Karena sebagian besar pinggir Kota Kabupaten Barru ini baharinya cukup banyak tetapi dengan adanya otonomi daerah sehingga banyak dikuasai oleh kabupaten/daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Barru. Kalaupun ada itu milik pribadi, maksudnya tanah itu sejak lama dimiliki oleh pribadi sehingga mereka mengolah sendiri. Kalau menurut undang-undang masih bisa tapi kita tidak mau mematikan potensi seperti itu. Disitu wisata bahari banyak sekali manfaatnya, di tahun 2018 sedang dipersiapkan nanti ada penataan pesisir pantai seperti dibangunnya Pelabuhan Garongkong namun bertahap, Sebenarnya yangkita kerjakan itu banyak tapi sedikit dananya, sedangkan kita masih ada prioritas pembangunan yang lebih utama. Hal tersebut bukan berarti tidak dikelola secara maksimal, tetapi memang belum ada dana yang mumpuni dan pemerintah masih banyak konsen pada peningkatan taraf hidup masyarakat seperti kesehatan, pendidikan. Jadi bukan berarti terbengkalai tapi ada skala prioritas yang lebih baik yang harus dikerjakan oleh Pemerintah Daerah terlebih dahulu (wawancara: Staf Dinas Pariwisata kabupaten Barru, 23 Juli 2021).

Berdasarkan pernyataan informan diatas diketahui bahwa pembangunan pariwisata berbasis bahari di Kabupaten Barru dilakukan secara bertahap, hal ini dikarenakan adanya keterbatas modal dan sumber daya manusia. Selain itu garis

pantai Kabupaten Barru yang cukup panjang membuat pembangunan wisata bahari diarahkan sesuai dengan program pembangunan pariwisata prioritas.

Hal ini dibenarkan oleh salah satu narasumber, menurutnya;

“Sebenarnya kita tetap menyicil pembangunan. Kita usahakan pembangunan itu tetap ada, namun membangun itu tidak dengan dana yang sedikit tetapi minimal kita membangun mental masyarakat, kerangka fikir masyarakat bahwa Kabupaten Barru bukan merupakan kota wisata. Setiap pengunjung tentu menginginkan sesuatu yang berbeda, dan Kabupaten Barru memumpuni dalam bidang jasa, maka kita sediakan wisata kuliner dengan cafe-cafe yang menjamur namun tidak terpusat menjadi satu melainkan pusat-pusatnya banyak tersebar. Kita hanya memberikan semacam stimulan atau rangsangan kepada para pengusaha, tidak mesti harus membangun tetapi menyediakan lahan untuk usaha berdagang sehingga membantu kesejahteraan masyarakat dan kita memberikan dari sisi hiburannya seperti live music untuk menarik perhatian pengunjung. Dari hal itu, membangun tidak selalu secara fisik akan tetapi menstimulan juga merupakan membangun yaitu membangun manusia atau masyarakat. Kita jangan terjebak dengan kata membangun harus dari segi fisiknya dan kita harus keluar dari mind set itu, karena kreatifitas juga perlu dibangun untuk membuat masyarakat lebih kreatif dalam membangun pariwisata itu sendiri sehingga memperoleh pendapatan dari industri pariwisata tersebut (wawancara: Staf Dinas Pariwisata kabupaten Barru, 23 Juli 2021).

Berdasarkan wawancara diatas diketahui bahwa dinas Pariwisata Kabupaten Barru telah menyicil pembangunan pariwisata di Kabupaten Barru selain itu langkah yang dilakukan adalah dengan memberikan stimulan/rangsangan kepada pelaku usaha mendirikan pusat-pusat perdagangan yang saling terintegrasi dengan kawasan wisata. Pengelolaannya yang jelas diserahkan kepada masyarakat sepenuhnya, seperti di Pulau Pannikiang masyarakatnya yang mengelola. Kita memberikan arahan jika ingin objek wisatanya dikunjungi banyak wisatawan maka lingkungannya harus dibersihkan,

karena tidak menarik retribusinya. Namun Dinas Pariwisata menyiapkan sarananya seperti musholla, ada ruang ganti atau toilet, kemudian sanitasinya juga kita perhitungkan. Dinas Pariwisata melihat angka kunjungan wisatawan dipulau pannikiang cukup sering karena ada beberapa yang bisa dilihat seperti mangrove yang subur, pasir putih dan pantai yang bersih dan iar yang jernih. jadi pihak dinas Pariwisata menyediakan fasilitas standar untuk diperbaiki dan dipelihara oleh orang-orang yang tinggal disekitarnya. Dan masyarakat perlu untuk memperbaiki lingkungannya dengan menjaga dan menanam pohon mangrove lebih banyak lagi.

Pembangunan pariwisata yang dilaksanakan oleh pemerintah atau Dinas Pariwisata juga berupa membangun mental dan pola fikir masyarakat agar selalu melestarikan kebudayaan Kabupaten Barru dan memberikan pemahaman bahwa Kabupaten Barru bukan merupakan kota wisata sehingga masyarakat atau pelaku usaha diharapkan untuk lebih kreatif dalam mengembangkan usahanya serta memiliki kreatifitas yang tinggi dan kemampuan lain dalam kegiatan usaha yang berkaitan dengan kepariwisataan. untuk meningkatkan kesejahteraannya, sehingga pengembangan pada jasa usaha pariwisata terus meningkat dan lebih baik lagi.

Peningkatan jasa usaha pariwisata di Kabupaten Barru merupakan sumber penyokong utama bagi kontribusi sektor pariwisata untuk pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Barru yang berasal dari Pajak Hotel, Pajak Restoran/rumah makan, dan Pajak Hiburan. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh bertambahnya kunjungan wisatawan yang setiap tahun.

Maka dengan adanya pemberdayaan sesuai dengan tahapan pengembangan desa wisata yang berada di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dengan adanya partisipasi masyarakat secara terorganisi yang melibatkan desa Madello mampu memberikan dampak yang positif yang cukup signifikan dalam upaya peningkatan perekonomian masyarakat setempat. Hal ini sesuai dengan tujuan pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata. Dengan melihat pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata yang terletak di desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru sebagai berikut:

Tabel 5.1 Pemberdayaan dan peran Perempuan di Desa Madello

Potensi	Tahap-Tahap Pemberdayaan Perempuan	Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Perempuan	Kriteria Desa Wisata
Abon Ikan di Dusun Ujunge	<ol style="list-style-type: none"> 1) Tahap seleksi lokasi sudah tepat di dusun Ujunge untuk usaha pengolahan abon ikan 2) Tahap sosialisasi tidak dilakukan karena kaum perempuan di dusun Ujunge sudah membuat abon ikan melalui pelatihan sebelumnya. 3) Tahap pemberdayaan sudah dilakukan untuk 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kesetaraan antara laki laki dan perempuan dilakukan dalam pemberdayaan tidak ada perbedaan antar upah dan pekerjanya. 2) Partisipasi pada masyarakat sangat didukung. 3) Keswadayaan dengan menghargai kemampuan orang lain sudah dilakukan 4) Berkelanjutan menjadi destinasi wisata 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki keunikan dan daya tarik pada wisatawan 2) Memiliki fasilitas dan dukungan dari pihak kepariwisataan. 3) Memiliki interaksi dengan pasar wisatawan dan mendapat kunjungan dari wisatawan. 4) Mendapat dukungan dari masyarakat setempat dengan adanya kegiatan

	<p>meningkatkan taraf hidupnya</p> <p>4) Tahap pemandirian sudah dilaksanakan</p>		
Wisata Kuliner	<p>1) Tahap seleksi lokasi sudah tepat di Pulau Pannikiang untuk menikmati olahan hasil laut yang segar</p> <p>2) Tahap sosialisasi Agar kaum perempuan mau membuka jasa pengolahan hasil laut untuk menjadi makanan khas dari Kabupaten Barru.</p> <p>3) Tahap pemberdayaan sudah dilakukan untuk meningkatkan taraf hidupnya dalam rangka membuka warung</p> <p>4) Tahap pemandirian sudah dilaksanakan</p>	<p>1) Kesetaraan antara laki laki dan perempuan dilakukan dalam pemberdayaan tidak ada perbedaan antar upah dan pekerjaan. Partisipasi pada masyarakat sangat didukung.</p> <p>2) Keswadayaan dengan menghargai kemampuan orang lain sudah dilakukan</p> <p>3) Berkelanjutan menjadi destinasi wisata</p>	<p>1) Memiliki keunikan dan daya tarik pada wisatawan</p> <p>2) Memiliki fasilitas dan dukungan dari pihak kepariwisataan.</p> <p>3) Memiliki interaksi dengan pasar wisatawan dan mendapat kunjungan dari wisatawan.</p> <p>4) Mendapat dukungan dari masyarakat setempat dengan adanya kegiatan</p>

C. Pola pengembangan Desa Wisata yang sesuai dengan Desa Madello sebagai

Kampung KB dalam meningkatkan partisipasi perempuan

Penelitian ini mengadopsi tahapan penyusunan model pemberdayaan dari *United Nations* yang dirincikan sebagai berikut; (a) *getting to know the local community*; (b) *gathering knowledge about the local community*; (c) *identifying the local leaders*; (d) *stimulating the community to realize that it has problems*; (e) *helping people to discuss their problem*; (f) *helping people to identify their most pressing problems*; (g) *fostering self-confidence*; (h) *deciding on a program action*; (i) *recognition of strengths and resources*; (j) *helping people to continue to work on solving their problems*; (k) *increasing people's ability for self-help*. (dalam Edi Suharto 2005:83-92).

Sesuai dengan hasil pengkajian di lapangan dan berkonsultasi dengan pakar pemberdayaan dan gender, maka tahapan tersebut diringkas menjadi enam tahapan pemberdayaan sebagai berikut: 1) memahami karakteristik lokal masyarakat Kampung Laut secara menyeluruh; 2) mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi tentang masyarakat secara detail; 3) memberikan penyadaran kepada masyarakat tentang masalah yang dihadapi melalui pendekatan persuasif dan membangun rasa percaya diri mereka untuk menyelesaikan masalah tersebut; 4) penetapan keputusan mengenai program kegiatan yang akan dilakukan dan dilanjutkan dengan implementasi program kegiatan; 5) pendampingan secara berkelanjutan untuk menyelesaikan permasalahan selama pelaksanaan program kegiatan; dan 6) pelaksanaan usaha kemitraan antara koperasi dan badan usaha.

Keseluruhan uraian sebelumnya yang menyangkut kondisi geografis, sosial dan ekonomi masyarakat desa Madello secara umum, identifikasi permasalahan perempuan nelayan dalam pemenuhan perekonomian keluarga, serta penelaahan

terhadap kendala upaya pemberdayaan, merupakan pelaksanaan dari tahapan pemahaman karakteristik lokal dan mengumpulkan pengetahuan tentang masyarakat desa Madello yang menyangkut soal kependudukan, pekerjaan, pendidikan, status sosial ekonomi, nilai dan sikap, faktor kepemimpinan dan lain sebagainya. Selain itu, informasi penting yang dibutuhkan juga menyangkut tentang potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk upaya pemberdayaan perempuan nelayan. Beberapa potensi ekonomi yang ada meliputi:

- 1) perikanan terpadu yang perlu dikembangkan secara intensif, baik dalam pengelolaan maupun pemasaran;
- 2) pengembangan perikanan sungai dan genangan air secara lebih intensif;
- 3) pemanfaatan tumbuhan mangrove, terutama jenis *krujon* untuk pembuatan teh dan krupuk yang sudah mulai dirintis, yang perlu dikembangkan dalam hal pengelolaan dan pemasaran; dan
- 4) pemanfaatan tanah timbul sebagai tambak (dalam jangka pendek) dan untuk lahan pertanian (dalam jangka panjang).

Sesuai dengan pentahapan penyusunan model di atas, maka penelitian ini melanjutkannya dengan melakukan pendekatan langsung ke lapangan secara persuasif untuk mendorong kesadaran bagi warga, khususnya perempuan nelayan, mengenai berbagai persoalan yang dihadapi di tengah himpitan ekonomi. Proses ini selain ditujukan untuk perempuan nelayan, juga melibatkan tokoh masyarakat, laki-laki nelayan, dan perangkat desa. Termasuk juga dalam hal ini membantu mereka membangun kepercayaan diri untuk menyelesaikannya demi

mencapai perekonomian yang lebih baik. Beberapa penekanan yang berkaitan dengan proses penyadaran tersebut meliputi:

- 1) Kebutuhan untuk mengembangkan alternatif usaha tidak cukup mengandalkan modal dana tetapi juga ketrampilan, pengetahuan, dan kemauan keras;
- 2) Pentingnya partisipasi aktif perempuan nelayan setara dengan laki-laki, dalam kegiatan program pengembangan mulai dari perencanaan sampai pelaksanaan;
- 3) Pemahaman bahwa program pengembangan yang ada bukan bersifat bantuan, tetapi bersifat memancing bertindak mandiri dan mampu mengembangkan;
- 4) kemauan untuk bekerjasama dengan tokoh-tokoh terkait, baik formal maupun informal, untuk bersama-sama keluar dari permasalahan;
- 5) pentingnya pemahaman bagi tokoh-tokoh terkait, bahwa warga perempuan maupun laki-laki nelayan membutuhkan keberadaan mereka melalui cara yang persuasif;
- 6) pentingnya sikap bekerjasama dengan pihak luar dengan itikad baik untuk bersama-sama membantu warga untuk meningkatkan kehidupan perekonomian;
- 7) kebutuhan untuk membangun kerjasama dan rasa memiliki dalam kelompok, baik perempuan maupun laki-laki untuk menyelesaikan persoalan bersama-sama;

- 8) keharusan untuk mengalihkan kebiasaan warga, kaum perempuan dan remaja, dari kebiasaan judi menjadi kegiatan yang lebih bermanfaat, secara bertahap;
- 9) keharusan untuk menjaga kelestarian lingkungan di kawasan Segara Anakan secara berkelanjutan; dan
- 10) pentingnya kehati-hatian perempuan untuk melakukan peminjaman uang kepada renteiner, yang selama ini dianggap lebih mudah syaratnya.

Kegiatan untuk menyusun model pemberdayaan dilanjutkan dengan mendapatkan masukan dan pertimbangan dari instansi pemerintah terkait, yang terdiri dari KPKSA, DKP, Bagian Pemberdayaan Perempuan, Bapermades, dan Pemerintah Kec. Balusu Beberapa masukan dan pertimbangan dalam menyusun program pemberdayaan perempuan nelayan antara lain sebagai berikut:

- 1) program bersifat partisipatif yaitu sesuai dengan keinginan dan melibatkan perempuan nelayan dan masyarakat luas secara menyeluruh;
- 2) melibatkan tokoh masyarakat yang potensial, aparat pemerintah, tokoh agama, tokoh adat, motivator kewirausahaan dalam model pemberdayaan lintas sektoral;
- 3) memperhatikan kondisi geografis Kampung Laut dan tidak merusak lingkungan setempat;
- 4) memaksimalkan potensi ekonomi yang ada di wilayah tersebut;

- 5) program bersifat praktis dengan dukungan peralatan teknologi yang tepat guna dan relatif sederhana, khususnya untuk kelompok perempuan; dan
- 6) pembentukan kelompok secara variatif dengan bantuan mulai dari pelatihan, bahan dasar, maupun peralatan harus didukung dengan pendampingan sampai pemasaran.

Berbagai program pemberdayaan di atas belum menunjukkan hasil dan tidak berkelanjutan. Demikian juga program pemberdayaan masyarakat dengan sasaran khusus perempuan nelayan juga mempunyai kondisi yang sama dengan program pemberdayaan yang sifatnya umum. Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui beberapa kegiatan antara lain peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, perbaikan lingkungan, pengembangan usaha milik desa pengembangan lembaga keuangan desa, serta ikut kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam meningkatkan hasil produksinya.

Upaya-upaya pemberdayaan masyarakat seharusnya mampu berperan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan merubah perilaku masyarakat untuk mencapaitaraf hidup yang lebih baik. Pemberdayaan dipandang sangat penting untuk mewujudkan struktur perekonomian yang seimbang, berkembang dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha masyarakat untuk menjadi usaha yang sangat tangguh dan mandiri.

Meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan daerah, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan rakyat dari kemiskinan. Proses pemberdayaan masyarakat pesisir tentunya mengacu pada undang undang nomor 6 tahun tahun 2014 dimana peraturan tersebut secara tegas menjelaskan tentang proses pemberdayaan masyarakat secara mendalam.

Pemberdayaan masyarakat pesisir yang ada di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru telah di laksanakan beberapa program dalam rangka pemberdayaan masyarakat pesisir berikut adalah hasil wawancara dengan staf Pemberdayaan Perempuan Desa Madello terkait dengan Pemberdayaan perempuan Pesisir dalam hal ini Ibu Ranti“

Terkait pemberdayaan perempuan pesisir sudah di laksanakan program pemberdayaan yaitu berupa bantuan alat kontrasepsi dan sosialisasi serta penyuluhan pentingnya alat kontrasepsi, selain itu juga diberikan bantuan khusus masyarakat nelayan di berikan fasilitas nelayan berupa mesin tempel, katinting dan perahu boat yang langsung diberikan oleh Dinas kelautan dan perikanan provinsi maupun daerah sedangkan untuk petani di berikan bibit padi yang langsung di berikan oleh dinas pertanian”.

Dalam pelaksanaan proses pemberdayaan masyarakat berdasarkan aturan yang termuat dalam UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dimana Pemberdayaan Masyarakat merupakan wujud dari pemberdayaan Masyarakat Pesisir yang tersebar disetiap daerah. Hal Relevan juga di katakana oleh Bapak Ridwan yang merupakan Dewan fasilitator Lembaga pemberdayaan Masyarakat (LPM) dimana Menurut Beliau:

Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir desa Madello selalu berpatokan dengan potensi-potensi yang dimiliki oleh masyarakat pesisir sehingga prosedur pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan masyarakat”.

Program pelaksanaan masyarakat pesisir bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ada di desa dengan melihat setiap kebutuhan masyarakat yang ada di desa. Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu kaur Pembangunan Bapak Marwan Desa Madello.

Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir yang ada di desa Madello telah di laksanakan melalui tahapan-tahapan yang ada di desa Madello proses pelaksanaan pun di sesuaikan dengan kebutuhan masyarakat yang pada umumnya berprofesi sebagai nelayan dan petani”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan di atas pemberdayaan masyarakat pesisir yang ada di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru telah di laksanakan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang ada. kemudian pelaksanaan program melibatkan beberapa dinas baik dari provinsi maupun kabupaten. di samping itu juga proses pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir dilaksanakan dengan melihat kebutuhan yang kompleks bagi masyarakat pesisir guna meningkatkan kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat yang ada di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru.

Hal senada juga di sampaikan sekertaris desa ia mengatakan bahwa pelaksanaan program sudah sesuai dengan harapan kebutuhan perempuan pesisir. dimana program pemberdayaan perempuan pesisir mengikuti standar pembangian anggaran dalam proses pemberdayaan perempuan pesisir di desa Madello. Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat pesisir adalah sebagai wujud untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dimana program pemberdayaan perempuan harus melibatkan pemerintah sepenuhnya dengan

membangun hubungan kerja sama dengan masyarakat lewat swadaya murni perempuan pesisir. Berikut adalah hasil wawancara dengan salah satu masyarakat;

Beliau mengatakan upaya pemberdayaan masyarakat pesisir lewat program pemerintah desa belum maksimal. ini dapat dilihat dari program pemerintah yang hanya berfokus pada bidang pembangunan infrastruktur. Beliau juga menambahkan perlu dibuat program yang mencakup keseluruhan kebutuhan perempuan pesisir (wawancara: Raodah, Dusun Pannikiang 23 Juli 2021)

Hal yang sama juga ditegaskan oleh narasumber lain, ia mengatakan bahwa;

pelaksanaan program oleh pemerintah desa belum sepenuhnya menyentuh masyarakat terutama perempuan. Karena pemerintah desa hanya terfokus pada pembangunan infrastruktur (wawancara: Burhan, Dusun Ujunge 23 Juni 2020).

Pelaksanaan program dalam upaya pemberdayaan perempuan pesisir dalam meningkatkan kesejahteraan di Desa Madello merupakan hal terpenting dalam hal peyelenggaraan pemerintahan desa melihat dari tugas dan fungsi pemerintah desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan memberdayakan masyarakat desa lewat program yang di laksanakan.

Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya alam melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Upaya untuk memandirikan masyarakat lewat perwujudan potensi kemampuan mereka miliki. adapun pemberdayaan

masyarakat senantiasa menyangkut dua kelompok yang saling terkitan yaitu masyarakat sebagai pihak yang di berdayakan dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang memberdayakan.

Pemberdayaan Masyarakat Aprillia Theresia (2015:93). Pemberdayaan masyarakat pesisir dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah sebagai wujud meningkatkan kesejahteraan yang ada di desa. Tentunya segelintir program di buat dan di laksanakan sesuai dengan mekanisme dan tahapan yang ada yang berfokus pada masyarakat. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat pesisir yang ada di Desa Madello Kecamatan Balusu Kabupaten Barru dilaksanakan sesuai dengan pemanfaatan kebutuhan masyarakat desa.

Pengetahuan merupakan bagian terpenting dalam upaya penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat pesisir. Dimana pengetahuan dijadikan kekayaan intelektual masyarakat dan harus di pertahankan dan dikembangkan secara berkesinambungan dalam konteks pengembangan dalam lingkungan masyarakat pesisir. Kemampuan menjadi implikasi penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir yang ada di desa. Kemampuan yang dimiliki harus dibarengi dengan pengetahuan yang memadai dimana diperlukan pendekatan ilmu yang bersifat konseptual yang setidaknya tidak bersifat tradisional lagi.

Prioritas pertama dalam strategi pemberdayaan wanita nelayan untuk meningkatkan ekonomi rumah tangganya di wilayah pesisir pantai barat Kabupaten Barru adalah penguatan kelembagaan masyarakat pesisir khususnya kaum perempuan nelayan melalui pembentukan kelompok usaha diberbagai bidang seperti usaha abon ikan dan ikan kering.

Penguatan kelembagaan pada masyarakat pesisir pantai barat juga telah dilakukan karena kurangnya pelayanan dalam mensosialisasikan program-program bantuan pemerintah Kabupaten Barru serta informasi lain yang terkait dengan kesejahteraan rumah tangga nelayan, seperti bantuan Sapras (Sarana dan prasarana) 1 paket alat tangkap (pancing rawai/*set long line* dan jaring insang/*gill net*) dan 1 unit mesin tempel kepada nelayan tradisional yang telah diimplementasikan Tahun 2014 dan 2015 oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Barru serta bantuan peralatan untuk usaha abon ikan dan ikan kering, baik dari Dinas Kelautan dan Perikanan serta Dinas Perindustrian Kabupaten Barru sebagai lembaga pemerintah maupun lembaga swasta *Oxfam* untuk memberdayakan nelayan dan wanita/ istri nelayan.

Kelompok usaha tersebut beranggotakan wanita/ istri nelayan, yaitu : Kelompok Usaha Abon ikan yang dijadikan sebagai sampel penelitian ini adalah “Kelompok *Konya*”, Melalui penguatan kelembagaan khususnya wanita nelayan di Kabupaten Barru yang banyak bekerja di sektor usaha kecil dan menengah ini diharapkan dapat meningkatkan posisi tawar (*bargaining position*) sebagai pondasi yang kokoh dalam upaya menanggulangi kemiskinan secara mandiri di wilayah pesisir pantai barat Kabupaten Barru dalam meningkatkan ekonomi rumah tangganya. Hal ini pula berbeda dengan penelitian Amrawaty, dkk (2009:67) bahwa profil usaha wanita nelayan di kabupaten Takalar sebahagian besar adalah perorangan dan bentuk lembaga-lembaga yang ada antara lain lembaga peminjam modal yaitu bank, ponggawa dan lembaga pemasaran yaitu langsung ke konsumen dan juga diserahkan ke ponggawa, sementara faktor yang

mempengaruhi yaitu kurangnya koordinasi antara lembaga sehingga pendapatan yang diperoleh wanita nelayan masih rendah.

Menurut Sipahelut (2010:105) bahwa penguatan kelembagaan masyarakat pesisir merupakan bagian dari peran pemerintah dari *co-management* dalam memberikan pelayanan bagi peningkatan wawasan, pengetahuan, dan keterampilan masyarakat pesisir, serta usaha perikanan. Hal terpenting dari kegiatan ini adalah mendorong modal social masyarakat pesisir agar lebih berdaya dan mandiri dalam menggerakkan perekonomiannya. Pembinaan dan pelatihan diharapkan dapat menjadi *triger* (pemicu) tumbuh kembangnya inovasi usaha perikanan dengan tidak mengandalkan pemerintah semata.

Usaha perikanan tangkap yang musiman memang memiliki resiko tinggi (penuh ketidakpastian) sering menjadi alasan keengganan baik pihak bank bahkan koperasi sering tidak menyediakan modal bagi usaha perikanan, apalagi tidak ada anggunan pinjaman. Untuk itu program pemerintah daerah Kabupaten Barru melalui Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, dan *Oxfam* sebagai pemberi hibah dari sektor swasta berupa bantuan peralatan pembuatan produk usaha seperti abon ikan pada kelompok usaha "*Konya*" yang terdapat Kecamatan Balusu (Desa Madello).

Terbentuknya koperasi yang beranggotaan khususya wanita nelayan, dapat posisi tawar (*bargaining position*) nelayan dapat terbentuk seperti membeli hasil tangkapan dari nelayan dan hasil pengolahan ikan dari produk buatan/ wanita nelayan. Pada wilayah pesisir pantai barat Kabupaten Barru,

organisasi yang beranggotakan wanita nelayan (kelompok *konya*, majelis *ta'lim*, koperasi) telah terbentuk untuk menambah penghasilan keluarganya.

Untuk itu kelompok usaha wanita nelayan wilayah pesisir pantai barat Kabupaten Barru sangat perlu meningkatkan berbagai mutu produk baik dalam bentuk dan ukuran kemasan maupun menghasilkan jenis produk dalam bentuk modifikasi dengan bahan baku ikan laut, seperti *nugget* ikan, tepung ikan, dan keripik ikan. Bahan baku dan bahan penolong pun dapat ditemukan dengan mudah karena dekat dengan lokasi industri.

Peningkatan mutu tersebut dapat dilakukan melalui pemberdayaan wanita nelayan seperti *pelatihan* (uji coba yang disertai dengan evaluasi dan perbaikan produk pada percobaan berikutnya) yang dapat dilaksanakan oleh *stockholder* melalui kerjasama atau bermitra dengan Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Perindustrian, maupun Perguruan tinggi.

Selain pelatihan tersebut yang dilakukan melalui kerjasama *stockholder*, juga dapat memberikan *modul resep baku* atau *prosedur baku* yang diperoleh dari berbagai media baik buku-buku maupun media elektronik sebagai rujukan pengembangan produk (seperti kerupuk ikan dan *nugget* ikan).

Selanjutnya Widodo dkk (2011:14) alasan-alasan penting yang menjadi dasar dipilihnya pemberdayaan perempuan nelayan berbasis penciptaan nilai tambah produk ikan melalui penerapan teknologi tepat guna terpadu tersebut adalah: 1) Cukup besarnya jumlah perempuan keluarga nelayan di lokasi penelitian; 2) Bahan mentah (ikan) cukup tersedia sehingga dapat menjamin kesinambungan produk ikan hasil olahan (*sustainability*); 3) Memanfaatkan dan

meningkatkan hasil tangkapan ikan yang selama ini dipandang kurang *marketable* dan banyak ditemukan kendala adanya keterbatasan-keterbatasan; 4) Pemasaran hasil tangkapan (ikan segar), terutama oleh nelayan tradisional masih sangat terbatas dan hanya bersifat subsistem sehingga tidak mampu mengakselerasi peningkatan kesejahteraan keluarga nelayan; 5) Menghindarkan cara pengolahan hasil penangkapan ikan dengan menggunakan zat-zat yang berbahaya bagi manusia; 6) *Teknologi tepat guna* yang digunakan sangat sederhana, mudah diadopsi kelompok sasaran (perempuan keluarga nelayan miskin) dan tidak memerlukan biaya operasi tinggi. Sedangkan *terpadu* yang dimaksud adalah adanya pemanfaatan hasil tangkapan secara maksimal (*sinergi*) misalnya: produk ikan pindang dan ikan kering (industri hulu) cenderung memanfaatkan ikan-ikan jenis tertentu dan berkualitas, sementara untuk jenis ikan asalan (kualitas rendah) dapat dimanfaatkan untuk pengolahan produk-produk seperti: kerupuk ikan, terasi, petis ikan (industri hilir); dan 7) *Multiplier effect* yang dimaksud adalah manfaat ganda yang diperoleh dari proses pengolahan ikan, misal: limbah dari air bekas rebusan pindangan dapat dimanfaatkan untuk pembuatan krupuk, trasi, petis ikan. Di samping itu juga munculnya peluang-peluang usaha baru sebagai akibat pengolahan ikan pasca tangkap tersebut, misal: transportasi lokal, perdagangan ikan segar.

D. Analisis Peran dan Pemberdayaan Perempuan

a. Peran Perempuan dalam Industri Pariwisata

Tidak dapat disangkal lagi kehadiran kaum perempuan dalam dunia kerja pariwisata besar manfaatnya, untuk sebagian perempuan mereka

menyandang posisi atau peran ganda. Disatu sisi mereka sebagai ibu rumah tangga atau sebagai partner kaum laki-laki dalam berumah tangga dan di sisi lain sebagai seorang pekerja yang membantu mencari nafkah. Bagaimanapun mereka juga adalah ibu rumah tangga yang sulit lepas begitu saja dari lingkungan keluarga, oleh karenanya dalam meniti karier perempuan mempunyai beban dan hambatan lebih berat dibanding rekan prianya. Berarti kaum perempuan harus lebih dulu mengatasi urusan rumah tangganya, mengurus suami, menjaga dan mendidik anak-anaknya dan hal-hal lain yang menyangkut urusan rumah tangga.

Ada tiga poin utama keterlibatan perempuan dalam industry pariwisata, pertama tenaga kerja. Kedua, kewirausahaan dan ketiga, Kesetaraan gender

1) Tenaga kerja

Pariwisata menyediakan lahan ekonomi dan pekerjaan bagi wanita, namun banyak dari kita tidak sadar bahwa wanita banyak berperan dalam dunia pariwisata dan menunjang roda industri yang satu ini. Hanya saja sering kali para pekerja wanita dalam dunia pariwisata dikategorikan sebagai pekerja dengan upah yang murah, baik dalam industry pariwisata maupun bentuk lainnya dari manajemen wisata.

Indonesia sesungguhnya telah menempatkan posisi perempuan pada level yang sejajar dengan laki-laki, terutama dalam masalah ketenagakerjaan, karena disadari atau tidak perempuan mempunyai peran

ekonomi yang sangat penting dalam pembangunan nasional. Bila melihat fenomena yang berkembang saat ini masalah ketenagakerjaan wanita terlihat ada berbagai kesenjangan walaupun undang-undang ketenagakerjaan telah menjamin segala hak dan kewajibannya. Masih banyak perusahaan yang mempekerjakan perempuan di luar peraturan yang ada. Mereka masih diperlakukan tidak adil dan hak-haknya sebagai pekerja dilanggar seperti terjadi diskriminasi, bahkan sampai kepada pelecehan seksual. Ironisnya kenyataan seperti itu jarang sekali terungkap sehingga memberi peluang kepada pihak pengusaha untuk terus mempekerjakan perempuan meski masih dalam kondisi yang memprihatinkan.

Meskipun prospek pekerja perempuan cukup baik dilihat dari pertumbuhan angkatan kerja perempuan lebih cepat dari angkatan kerja laki-laki, namun tuntutan persamaan hak atas perolehan upah atau gaji dengan laki-laki belum sepenuhnya berhasil. Hal ini disebabkan oleh selain sumberdaya pekerja perempuan masih rendah juga disebabkan oleh absentisme dan pemutusan hubungan kerja di kalangan pekerja perempuan cukup tinggi. Akibatnya pihak perusahaan enggan menginvestasikan sumberdaya mereka untuk memberikan pendidikan dan pelatihan kepada pekerja perempuan

Angka partisipasi kerja perempuan Indonesia di bidang ini masih jauh lebih rendah dibanding Singapura dan Thailand. Pada persentase keterlibatan perempuan di sektor pariwisata Indonesia, sebuah kabar yang dilaporkan dalam *Global of Women in Tourism Report UNWTO (2019)*,

sebanyak 55,07% tenaga kerja industri pariwisata adalah perempuan. Namun faktanya, terdapat kesenjangan upah bahwa perempuan hanya mendapatkan 30,07% lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Adanya *wage gap* tersebut, semakin kuat seharusnya aspirasi-aspirasi publik datang untuk menyuarkan ketidakadilan upah yang menimpa perempuan baik dalam sektor formal maupun informal di bidang pariwisata. Sehubungan dengan isu tersebut, secara umum, Rasyani dan Aruni (2016) mengemukakan bahwa kaum marjinal seperti perempuan jarang menduduki ranah politik di lembaga tinggi negara, partai politik, dan organisasi publik lainnya. Maka, mungkin bukan kabar yang mengherankan lagi bagi warga tanah air jika kebijakan-kebijakan negara cenderung tidak mengakomodir kebutuhan kepentingan perempuan, termasuk pada sektor pariwisata.

Penelitian oleh Andani (2017) contohnya, perempuan di Kampung Tebing Okura terlibat pada Kelompok Sadar Wisata, namun, peran mereka masih berada pada posisi anggota dan seksi saja. Peran-peran inti masih ditujukan oleh dominannya posisi laki-laki. Selanjutnya, Wardoyo (2011, dalam Rahayu: 2017) menunjukkan bahwa Desa Wisata Pentingsari, Sleman, Yogyakarta masih mendapati dominasi dari peran laki-laki yang terlibat dikarenakan kuatnya sistem patriarki di desa tersebut. Walaupun demikian, kegiatan memasak, membatik, dan urusan domestik lainnya masih banyak dilakukan oleh perempuan. Tidak hanya itu, Wilkinson dan Pratiwi (1995) rupanya sudah meneliti sejak lama bahwa terdapat sebuah polemik dari adanya kegiatan pariwisata bagi perempuan yang terlibat. Isu

tersebut adalah beban ganda yang dirasakan oleh setiap perempuan, baik dalam mengurus rumah tangga maupun bekerja di sektor pariwisata. Efek dari beban ganda ini terlihat dari kondisi kesehatan perempuan yang menurun karena kelelahan setelah pulang bekerja (Kousis, 1989 (Beedle, 2011 dalam Monica: 2018). Wilkinson dan Pratiwi (1995) melihat bahwa beban kerja perempuan meningkat dua kali lipat karena keterlibatan mereka dalam kegiatan pariwisata. Kendatipun, hal tersebut tidak lekang dari adanya stereotip gender yang selama ini memposisikan perempuan hanya di peran domestik sedangkan laki-laki berada di ranah publik dalam perencanaan pariwisata ramah lingkungan (Pratiwi, 2017). Padahal, sudah cukup banyak penelitian yang secara umum membahas kinerja laki-laki dan perempuan dalam sektor kerja formal yang menguatkan bukti bahwa baik dari mereka sama-sama berkompeten (Wachyuni, 2020). Buktinya, Wachyuni (2020) meneliti tentang kinerja pramusaji pada restoran ternama di Jakarta yang menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan kinerja antara laki-laki dan perempuan dalam segi keefektifan, keefisienan, kualitas, ketepatan waktu, dan produktivitas kerja.

2) Kewirausahaan

Pemberdayaan perempuan di sektor pariwisata masih menghadapi sejumlah tantangan, misalnya stigma bahwa peran perempuan terbatas pada bidang domestik dan kesenjangan upah dengan laki-laki. Upaya pemberdayaan bisa dimulai dengan edukasi dan pelibatan masyarakat lokal.

Secara keseluruhan, jasa pariwisata dianggap sebagai perpanjangan dari pekerjaan rumah tangga yang seharusnya jadi milik perempuan. Padahal, sektor ini dinilai sanggup memberi peluang bagi perempuan lewat banyaknya pilihan tanpa pembiayaan awal yang besar. Kesempatan ini acap kali terhambat akibat kurangnya akses teknologi, informasi, keterampilan bisnis, pendidikan, dan pelatihan.

3) Kesetaraan Gender

Isu gender dalam pariwisata dapat dikaji dalam beberapa aspek. Aspek yang paling sering berkaitan adalah mobilitas dan *sex tourism* karena kedua aspek ini sering dijumpai. Aspek mobilitas yang diangkat dalam isu ini adalah kesulitan perempuan dalam mengakses dan berekspresi di industri pariwisata.

Isu ketimpangan gender ini menjadi perhatian kembali oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mempromosikan kesetaraan gender sebagai salah satu agenda *Sustainable Development Goals* (SDGs). Pada dasarnya, jika dilihat lebih dalam, pariwisata dapat membuka peluang bagi perempuan untuk berpartisipasi. Cattarinich (2001, dalam Manwa: 2008) menjelaskan bahwa pariwisata dapat menjadi mesin untuk pembangunan ekonomi bagi negara berkembang, terutama di daerah yang tertinggal dan didominasi oleh masyarakat perempuan.

Dalam pekerjaan di industri pariwisata perempuan lebih sering ditempatkan pada bagian administrasi atau *food and beverage* yang

dianggap selaras dengan pekerjaan domestik. Sedangkan pekerjaan untuk laki-laki lebih bervariasi dan mendominasi seperti pengambil keputusan, pekerja terampil, berkompotensi teknis, dan mampu menjadi pemimpin. Namun pada kenyataannya pekerjaan administratif yang dianggap selaras tersebut juga banyak dilakoni oleh laki-laki yang dinilai lebih cekatan dalam bekerja. Praktis, hal ini memunculkan stereotip bahwa perempuan merupakan pekerja sekunder, tidak terampil, berfisik lemah, tidak mempunyai kompetensi teknis dan tidak mampu mengemban tugas sebagai pemimpin. Struktur yang timpang tersebut tidak terlepas dari kepentingan sekelompok orang yang menguasai sumber daya ekonomi. Padahal dengan melibatkan perempuan, dapat membuktikan bahwa mereka mampu mengerjakan tugas tersebut dan menunjukkan potensi yang dimiliki.

Secara data, perempuan mendominasi pendidikan dan keterampilan pariwisata. Tapi, dalam praktiknya, angka keterlibatannya masih kurang dan terdapat kesenjangan gender di tingkat pendidikan lebih tinggi. Perlu adanya intervensi untuk mendorong peningkatan kesempatan partisipasi perempuan dalam level manajerial di sektor pariwisata. Kemudian, menciptakan lebih banyak kesempatan dan pengembangan bisnis untuk perempuan, baik dalam hal finansial maupun akses pasar. Selain itu, juga ada investasi dalam peningkatan pendidikan dan memberi kesempatan sebesar-besarnya untuk mengasah keterampilan. Tak hanya *hard skill*, tapi juga manajerial bagi para perempuan, para perempuan punya posisi kunci,

seperti *general manager, sales and marketing director*, dan *digital marketing manager*.

Dari penjelasan di atas, bisa disimpulkan kalau terdapat sebagian kesempatan serta hambatan yang dialami oleh wanita buat dapat secara aktif ikut serta dalam aktivitas pariwisata. Antara lain merupakan buat kelompok strata atas mempunyai kesempatan yang lebih besar dibanding dengan kelompok strata menengah serta dasar. Peluang buat meningkatkan kemampuan individu lumayan besar yang nantinya berguna untuk aktivitas pariwisata serta wanita yang ikut serta di dalamnya. Secara universal mereka berpikiran kalau kesempatan butuh ditingkatkan paling utama oleh pemerintah buat mengaitkan mereka secara aktif dalam aktivitas riil semacam misalnya pameran pariwisata tingkatan nasional serta internasional. Pengembangan jejaring pula lumayan berarti buat dicoba paling utama atas dorongan pemerintah supaya pemasaran produk ataupun jasa dapat tumbuh lebih luas.

Tetapi buat kelompok yang satunya, hambatan yang dialami cukup besar, sebab mereka mempunyai keterbatasan antara lain kreativitas yang kurang, ketegasan, serta akses baik buat akses penciptaan serta jasa dan akses pemasaran. Oleh karena itu butuh ditingkatkan *support* dari pemerintah, tidak cuma buat pengembangan produk namun pemasaran dan kenaikan keahlian (*skills*) dengan metode *training* dan kursus sangatlah dibutuhkan. Perihal ini hendak tingkatkan keahlian mereka dalam berproduksi sehingga kesejahteraan mereka hendak lebih terpelihara.

Disamping akses terhadap peluang buat tumbuh mengarah kondisi yang lebih baik, keterbatasan dana, ketenagakerjaan, profesionalisme kerja serta mutu produk pariwisata ialah bagian yang tidak terpisahkan dari hambatan yang dialami oleh mereka yang terletak di strata menengah serta dasar. Dengan membagikan dorongan berbentuk *training* misalnya, para pekerja pariwisata dapat meningkatkan kemampuannya dibidang tersebut buat berikutnya dipakai selaku pengembangan pariwisata di wilayah Desa Madello. Lebih lanjut wajib terdapat sebagian pihak yang menolong percepatan keahlian mereka biar lebih maju misalnya pemerintah, lembaga swadaya warga serta pihak swasta yang memiliki ikatan dengan pariwisata.

Perihal yang lebih menguntungkan dalam konteks pariwisata di Desa Madello kalau kesempatan buat lebih ikut serta dalam pariwisata terbuka lebar sebab kalangan lelaki yang nota bene umumnya ialah kelompok yang dominan tidak keberatan istri ataupun pendampingnya bekerja. Perihal ini terlihat dari komentar responden yang melaporkan kalau partner mereka tidak melarang kala mereka mau senantiasa kerja sehabis menikah. Ini berarti kalau peluangnya sangat besar. Dari kalangan wanita strata atas, terlihat sekali kalau mereka sudah memiliki kontrol yang lumayan kokoh terhadap usaha mereka.

Meskipun demikian, dukungan secara publik sesungguhnya bisa datang dari mana saja. Contohnya, perempuan Kabupaten Toraja Utara mendapatkan dukungan dari Bupati berupa bantuan promosi produk budaya asli Toraja, seperti kerajinan, kuliner, kesenian, dan fesyen. Menurut Bupati

Toraja Utara, perempuan mampu mendongkrak sektor pariwisata dan ekonomi kreatif daerah. Tentunya, hal ini berkaitan dengan kepentingan politik dan kesadaran akan kesetaraan gender pada masing-masing daerah. Selain itu, peran lembaga swadaya masyarakat juga memberikan dampak yang signifikan pada kesadaran mengenai kesetaraan gender. Manwa (2008, dalam Moscardo: 2008) menjelaskan bahwa langkah tersebut ditransformasikan oleh *Non Governmental Organization* (NGO) dari Belanda yang enggan memberikan bantuan dana jika perempuan tidak terlibat secara setara dalam proyek batik di Jambi, Sumatera. Sehubungan dengan itu, Scheyvens (2000) mengungkapkan bahwa NGO berperan penting dalam mengedukasi masyarakat untuk segala isu yang berkaitan dengan kesetaraan gender.

b. Pengembangan dan Pemberdayaan Perempuan dalam industry Pariwisata

Scheyvens (2000: 236) menyatakan kalau terdapat 4 ukuran yang butuh dibahas buat memastikan apakah wanita telah diberdayakan dalam aktivitas pariwisata, di negara- negara tumbuh tercantum Indonesia. Keempat ukuran tersebut meliputi pemberdayaan dilihat dari sudut ekonomi, sosial, psikologi dan politik(Scheyvens, 2000). Meski sepanjang ini pembicaraan menimpa pemberdayaan warga lokal terhadap aktivitas pariwisata lebih banyak difokuskan pada permasalahan ekonomi, dalam realitasnya pembangunan pariwisata itu ialah aktivitas yang multidimensional, tidak cuma semata permasalahan ekonomi saja.

Bila membicarakan permasalahan pemberdayaan ekonomi dari sudut pandang pariwisata, butuh rasanya dibicarakan zona resmi serta informal dan peluang berupaya yang ada, sebab, aktivitas wisata yang sifatnya musiman membagikan pengaruh yang lumayan signifikan untuk warga lokal. Terlebih lagi, kerap terjalin ketidak samaan pemasukan untuk orang- perorang yang bisa memunculkan kasus (Wilkinson& Pratiwi, 1995). Scheyvens (2000) berkomentar kalau, dalam perihal pekerjaan resmi, umumnya wanita lokal tidak kerap diikut sertakan dalam perihal pembangunan sarana akomodasi maupun Daerah Tujuan Wisata (DTW). Selaku contoh, di Zimbabwe, pembangunan halaman nasional membagikan berpengaruh terhadap dibangunnya sarana yang terus menjadi baik, misalnya hotel dan jalan- jalan beraspal. Tetapi, dalam perihal pekerjaan resmi di bidang pariwisata tersebut, pekerja pria masih mendominasi secara totalitas.

Keterlibatan wanita di zona pariwisata nampaknya memanglah terus menjadi bertambah dalam seluruh bidang usaha pariwisata. Walaupun secara statistik terlihat masih terbatas, informasi riset ini menampilkan kalau diantara objek pariwisata yang dapat teridentifikasi di Desa Madello, mayoritas sudah mengaitkan wanita dalam bermacam zona. Riset ini memandang keterlibatan wanita dalam aktivitas pariwisata, dari 2 sisi ialah mereka, yang duduk selaku pengambil keputusan (owner) dan mereka yang ikut serta langsung dalam aktivitas pariwisata semacam misalnya penciptaan souvenir, serta penjual souvenir ataupun pekerja informal.

Keahlian komunikasi public serta kematangan beauty jadi alasan utama. Mereka kerap ikut serta secara aktif serta turut dan mengkoordinir kegiatan- kegiatan pariwisata serta membagikan dorongan baik secara moral ataupun material. Mereka pula aktif melakukan aktivitas bisnisnya hingga keluar negara serta sebagian tempat di Indonesia dan mempunyai jejaring yang lumayan baik antara lain dengan konsumen serta perbankan. Disamping itu keahlian mereka dalam berorganisasi buat meningkatkan usaha mereka dapat dikatakan lumayan baik sehingga pelan tetapi tentu mereka sanggup meningkatkan usaha mereka.

Nampaknya wanita pada strata atas ini tidak mempunyai permasalahan sama sekali dalam keterlibatannya dengan pariwisata sebab peluang tumbuh untuk mereka sama besarnya antara laki- laki serta wanita semacam misalnya peluang buat memperoleh dorongan keuangan dari lembaga keuangan dan proses perundingan harga serta sebagainya. Keduanya merasa kalau mereka sudah menampilkan keahlian yang optimal dalam aktivitas pariwisata, walaupun masih butuh memperoleh tutorial dari pemerintah utamanya soal pemasaran serta manajemen pariwisata. Disamping itu masih minimnya uraian mereka tentang konsep pariwisata butuh terdapatnya pendekatan yang lebih proaktif dari sebagian pihak misalnya akademi besar. Mereka berdua menyangka kalau pariwisata cuma berhubungan dengan alam saja, sementara itu secara khusus sudah dikatakan kalau pariwisata pula memasukkan faktor pelestarian seni serta budaya setempat guna menunjang aktivitas tersebut.

Sebaliknya, kalangan wanita yang ikut serta dalam proses penciptaan serta aktivitas pariwisata tercantum dalam kelompok menengah kebawah serta keterlibatannya belum nampak nyata utamanya buat pengembangan pariwisata. Perihal ini diakibatkan oleh sebagian perihal misalnya mereka tidak mempunyai akses yang lumayan buat berfungsi aktif dalam aktivitas pariwisata ataupun sebab kesibukannya menolong ekonomi keluarga mereka tidak mempunyai waktu luang yang lumayan buat berpartisipasi aktif. Sebagian diantara mereka telah bekerja lebih dari 6 tahun dengan posisi yang sama, walaupun terdapat yang melaporkan kalau sepanjang ini mereka memperoleh peluang belajar lebih banyak, sehingga pemasukan mereka terus menjadi bertambah bersamaan dengan kenaikan keterampilan mereka memproduksi benda ataupun jasa di posisi pariwisata tersebut. Jika biasanya mereka berkomentar kalau keterlibatan perempuan di bidang pariwisata masih sangat terbatas dengan bermacam alibi semacam yang diucap diatas ialah sosial budaya, keterbatasan keahlian serta keterbatasan waktu yang mereka punyai. Mereka merasa bekerja dengan kondisi yang saat ini telah lumayan baik, dibanding bila tidak bekerja ataupun tidak berpenghasilan. Perihal ini ialah salah satu permasalahan yang dialami oleh perempuan pada biasanya, yang menyangka bekerja berapapun pendapatannya lebih baik dibanding tidak bekerja sama sekali.

Secara pendek dapat dirangkum kalau buat strata atas keterlibatan serta kedudukan perempuan cukup besar serta mereka mempunyai jaringan kerja yang lumayan baik, mempekerjakan pekerja senantiasa minimum 3

ataupun 4 orang, dengan modal yang terbatas. Sebaliknya buat strata menengah serta dasar, keterlibatan wanita dalam aktivitas pariwisata masih sangat terbatas cuma buat kepentingan individu serta keluarganya saja. Mereka umumnya tidak mempunyai akses sama sekali terhadap peluang buat pembangunan pariwisata disamping tidak mempunyai pengetahuan yang lumayan dibidang tersebut. Nampaknya dunia pariwisata serta pariwisata pada umumnya, yang didominasi oleh kalangan laki- laki, telah semestinya memikirkan buat mengaitkan perempuan sehingga akses buat berpartisipasi aktif dalam pembangunan pariwisata dapat terbuka yang pada kesimpulannya membagikan nuansa yang tidak bias gender di dunia pariwisata di Indonesia.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat serta martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang yang tidak mampu melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakngan. Pemberdayaan masyarakat dinilai sebagai salah satu pendekatan yang sesuai dalam mengatasi masalah sosial terutama kemiskinan yang dilakanakan berbagai elemen mulai dari pemerintahan, dunia usaha dan masyarakat melalui sebuah organisasi yang melibatkan sebagian masyarakat setempat. Melalui pemberdayaan masyarakat yang ada di desa Madello dengan adanya desa wisata dapat memberdayakan masyarakat seperti halnya potensi yang ada di desa wisata tersebut.

Dengan melihat potensi yang ada di desa Madello seperti halnya wisata pantai, wisata kuliner dan pengolahan abon ikan yang dikelola

oleh kelompok Ibu-ibu PKK dan kelompok wanita tani Banyak memberikan manfaat atau dampak yang positif terhadap masyarakat desa Madello dengan adanya pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan dalam suatu masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, terutama melihat kondisi sekitar tempat yang akan diberdayakan, kondisi sosial ekonomi masyarakat. Pemberdayaan masyarakat bermaksud memperkuat masyarakat, dengan cara menggerakkan serta mendorong untuk menggali potensi pada dirinya dan berani bertindak memperbaiki kualitas hidupnya. Pemberdayaan maupun pengembangan masyarakat tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, melainkan menjadi tanggung jawab bersama. Dari pernyataan tersebut, pemberdayaan masyarakat desa identik dengan ciri dari, oleh dan untuk masyarakat, sangat mengharapkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Pemberdayaan masyarakat tidak akan tercapai dengan optimal tanpa adanya kerja sama dan gotong royong.

Menurut Bapak Munir dengan adanya kelompok PKK pengolah abon ikan yang dijadikan sebuah kelompok ini membuat dampak yang sangat besar bagi masyarakat dusun 5 yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dan menjadikan dampak yang positif untuk Kaum Perempuan di Desa Madello.

Demikian pula hasil penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Nugraheni S dkk, 2012, bahwa selain wanita nelayan berperan sebagai ibu rumah tangga (domestik), wanita nelayan di Desa Bedono juga

berperan dan ikut berpartisipasi mencari nafkah untuk pemenuhan ekonomi keluarganya. Bias jender dalam kehidupan ekonomi keluarga sudah tampak kabur karena para istri juga diuntut untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Partisipasi istri dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga di desa Bedono diwujudkan dalam lingkungan rumah tangga, dalam bidang ekonomi, maupun dalam masyarakat.

Kendala dalam pemberdayaan masyarakat Desa Madello tampak dalam tahap sosialisasi, tahap transformasi kemampuan, tahap kemandirian. Kendala yang ada pada tahap sosialisasi ini adalah sebagai berikut:

Pertama, komunikasi dan koordinasi. Pengelolaan yang baik terlihat dari cara komunikasi yang baik. Menurut pengamatan peneliti masih terlihat kurangnya komunikasi antara pengelola Desa Madello dengan warga masyarakat, pengelola dengan tokoh-tokoh masyarakat dusun sehingga kadangkala masih terdapat kurangpercayaan terhadap pengelola desa Madello. Satu hal yang melatarbelakangi kurangnya komunikasi ini adalah proses pembentukan desa Madello itu sendiri yang tidak melibatkan elemen-elemen masyarakat terutama lembaga-lembaga dusun.

Kedua, sikap dan perilaku masyarakat. Sikap dan perilaku masyarakat erat kaitannya dengan tingkat pendidikan dan kesejahteraan masyarakat yang muaranya pada tingkat pemahaman dan perasaan membutuhkan aktualisasi diri. Pada tahap sosialisasi ini, pengelola desa wisata kesulitan untuk mengajak warga masyarakat selain karena jumlah kegiatan atraksi

wisata yang belum bisa merangkul semua warga juga pengaruh sikap dan perilaku masyarakat

Ketiga, kurangnya sumber daya manusia terlatih. Desa Madello dengan berbagai kegiatan budaya masih kurang kaderisasi untuk pemandu-pemandu yang membutuhkan sumber daya yang terlatih. Hal ini terlihat pada beberapa atraksi wisata.

Keempat, ketersediaan sarana dan prasarana atraksi wisata. Ketersediaan sarana dan prasarana atraksi wisata menjadi penting untuk meningkatkan kepuasan wisatawan. Atraksi wisata di Desa Madello perlu ditunjang dengan kelengkapan sarana prasana atraksi wisata seperti pada alat perlengkapan wisata, tempat kondusif pada atraksi yang bersifat demo dan resume kegiatan atraksi yang menjelaskan dan menggambarkan makna-makna kearifan lokal. Selain itu ketersediaan sarana dan prasarana atraksi wisata akan wisata mempermudah pemandu dalam memandu atraksi wisata

Kelima, dana pengembangan. Anggaran desa wisata tidak didukung oleh pemerintah daerah karena sampai saat ini belum ada peraturan yang mengatur tentang desa wisata, sehingga promosi menjadi ujung tombak untuk menggaet wisatawan. Pengelola desa wisata harus dapat memanfaatkan pendapatan secara efektif dan efisien untuk operasional dan pengembangan desa Madello sebagai desa wisata.

Pemerintah daerah sudah berupaya untuk melakukan berbagai pelatihan dan penyuluhan dalam pemberdayaan masyarakat khususnya

pemberdayaan perempuan, berupa pelatihan dan penyuluhan serta pemberian bantuan alat-alat. Contohnya bantuan dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Barru untuk para pelaku Usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM). Selain itu SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) lainnya juga mempunyai berbagai program penyuluhan dan pelatihan khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan ekonomi perempuan contoh lainnya yaitu dari program dinas Pertanian, peternakan dan perkebunan salah satunya adalah program peningkatan ketahanan pangan yang memiliki program khusus bagi Kelompok Wanita Tani (KWT) berupa pemberian Kawasan Rumah Tangga Lestari (KRTL) baik dari tingkat desa hingga kabupaten.

Pemberdayaan ekonomi dan pemberdayaan lingkungan yang dimediasi oleh partisipasi perempuan tidak mempunyai pengaruh terhadap pengembangan desa wisata. Masyarakat adalah sebagai penentu kegiatan pemberdayaan perempuan sehingga lembaga pendukungnya hanya memiliki peran sebagai fasilitator. Membangun kemampuan perempuan yang menekankan partisipasi perempuan dalam proses pembangunan semakin terlihat, walaupun masih banyak ditemukan diskriminasi terhadap perempuan. Permasalahan tersebut sebenarnya sudah sejak lama timbul, hal tersebut disebabkan karena masih banyak kelompok masyarakat beranggapan bahwa kaum perempuan tugasnya hanya memasak dan mengurus anak dirumah. Oleh sebab itu, Partisipasi laki-laki di dalam pemberdayaan ekonomi perempuan di perlukan juga. Karena ketika

perempuan yang telah menikah masuk ke dunia bisnis tanpa dukungan laki-laki dalam artian pasangan mereka, maka besar kemungkinan usaha/bisnisnya akan mengalami kegagalan. Dorongan dari laki-laki untuk partisipasi

perempuan telah menjadi suatu hal yang wajib, agar kesetaraan gender dapat terwujud dalam berbagai bidang . Hal tersebut perlu diterapkan pada masyarakat di desa wisata Madello, perlunya dukungan laki-laki di dalam mendorong perempuan untuk berpartisipasi pada pengembangan desa wisata dengan menerapkan penyuluhan dan pelatihan yang telah diberikan oleh pemerintah daerah melalui pemberdayaan masyarakat, agar perempuan dapat lebih kreatif di dalam berinovasi untuk kemajuan daerah mereka dan tidak hanya semata-mata hanya bertujuan mencari nafkah untuk membantu suami atau keluarga.

Adapun keterkaitan antara perempuan dengan pembangunan, dimana pariwisata menjadi sumber pekerjaan yang penting bagi tenaga kerja yang tidak terampil, terutama perempuan dan imigran. Menunjukkan bahwa adanya hubungan antara pengembangan pariwisata dan pekerjaan yang berhubungan dengan perempuan dalam potensi ekonomi dan budaya. Keputusan perempuan untuk berpartisipasi di dalam bekerja yang tak luput dari motivasi ekonomi yang merupakan keputusan keluarga. Begitu pula, keputusan perempuan di dalam berpartisipasi terhadap pengembangan desa wisata Madello merupakan keputusan keluarga di dalam meningkatkan ekonomi rumah tangga. Sehingga terdapat hubungan yang antara

partisipasi perempuan sebagai pelaku usaha pada desa wisata yang memberikan kontribusi terhadap pendapatan rumah tangga.

Proses pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan desa wisata dilakukan dengan tiga tahap, yaitu tahap sosialisasi, tahap transformasi kemampuan, dan tahap kemandirian.(Muliawan, 2008). Tahap sosialisasi ini dilakukan dengan: Pertama, penyadaran terhadap masyarakat. Sejak tahun 2004 pengelola Desa Wisata Madello, mensosialisasikan konsep desa wisata kepada warga masyarakat untuk memperoleh dukungan. Pengelola berusaha meyakinkan warga bahwa dengan dibentuknya desa wisata bahari Madello akan memberikan dampak ekonomi maupun sosial budaya bagi masyarakat.

Dampak ekonomi yang akan dirasakan adalah peningkatan pendapatan masyarakat apabila masyarakat aktif berpartisipasi dalam wadah desa wisata dengan menyediakan rumahnya untuk akomodasi wisatawan dalam bentuk *home stay*, atau ikut aktif sebagai pemandu dalam atraksi desa wisata, sedangkan dampak sosial budaya adalah adanya peningkatan peran sosial masyarakat untuk bersama-sama menjaga seni budaya tradisional maupun memperkuat persaudaraan dengan bersama-sama menjaga dusun. Lambat laun warga menerima ide desa wisata yang dirintis pengelola Desa Wisata Madello setelah wisatawan sering berkunjung ke pulau Pannikiang dan terbukti ada timbal balik yang pantas bagi masyarakat, sehingga membuat masyarakat yang kontra menjadi mendukung konsep desa wisata.

Kedua, inventarisasi potensi wisata. Potensi wisata di Desa Wisata Madello yang patut digali adalah potensi yang melekat pada kehidupan sehari-hari warga masyarakat. Potensi tersebut menjadi keseharian warga masyarakat atau aktifitas rutin yang telah dikemas dengan baik dan dipromosikan tepat sasaran sehingga menjadi suatu obyek wisata yang menarik. Selanjutnya pengelola desa wisata mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan desa wisata terutama atraksi desa wisata dengan mempromosikan kegiatan-kegiatan pertanian, melaut dan budaya.

Ketiga, partisipasi masyarakat. Proses pemberdayaan dapat berhasil dengan baik bila mendapat dukungan dan partisipasi dari individu maupun kelompok dalam masyarakat. Partisipasi masyarakat Desa Madello dalam mendukung kegiatan pengembangan desa wisata. Hal ini menunjukkan pertumbuhan partisipasi masyarakat.

A. Analisis Strategi Pengembangan Wisata di Desa Madello

Kabupaten Barru merupakan Kabupaten yang berada di wilayah administratif Provinsi Sulawesi Selatan. Kabupaten Barru memiliki potensi dan sumber daya yang dapat dikembangkan untuk menunjang program otonomi daerah di bidang pariwisata, sehingga berpotensi untuk di kembangkan sebagai daerah wisata.

Kabupaten Barru, sebagai daerah yang berada pada jalur antara Kota Makassar dengan daerah tujuan wisata Tana Toraja memiliki kemungkinan untuk menangkap peluang arus pengunjung sehingga pengembangan potensi

wisata sangat relevan untuk dijadikan sebagai komoditas dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat.

Hal ini sejalan dengan UU Nomor 23 tahun 2014 dimana terdapat urusan pemerintahan pilihan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah. Salah satu urusan pemerintahan pilihan adalah pariwisata yang merupakan salah satu sektor potensial yang dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan daerah karena ketersediaan berbagai potensi pariwisata yang ada di setiap daerah.

Kabupaten Barru memiliki wewenang sendiri untuk mengelola sumberdaya yang terdapat di wilayahnya, termasuk di dalamnya adalah potensi sumberdaya sektor Pariwisata. Kabupaten Barru memiliki sektor pariwisata yang potensial untuk dikembangkan serta dipasarkan yaitu mulai dari wisata alam, wisata budaya, dan wisata rohani. Berbagai potensi objek wisata yang ada di Kabupaten Barru, sudah sepantasnya daerah ini menjadi destinasi wisata yang baru dan unggul di Indonesia. Seluruh objek wisata di atas masih dalam kendali pemerintah Kabupaten melalui Dinas Pariwisata Kabupaten Barru. Artinya, pengelolaan dan pengembangan obyek wisata masih mengandalkan insentif dari pemerintah daerah, yang dalam perkembangannya dengan perijinan dari pemerintah daerah dapat dikelola oleh pihak swasta dan masyarakat.

Dinas Pariwisata dan Dinas Kepemudaan dan Olahraga sebagai sumber daya manusia pelaksana tidak berperan optimal mendukung kebijakan pemberdayaan dalam pengembangan pariwisata sehingga berdampak pada tidak adanya eksistensi kelompok sadar wisata (pokdarwis) yang telah dibentuk.

Selain itu, kompetensi sumberdaya manusia belum memadai sebagai pengelola dalam bidang kepariwisataan serta tingkat pengetahuan masyarakat lokal terhadap obyek dan daya tarik wisata (ODTW) yang masih kurang sehingga diperlukan pelatihan-pelatihan dan pembinaan agar pengunjung merasa nyaman.

Selain itu juga pemerintah provinsi mulai membenahi destinasi-destinasi yang telah ditetapkan dalam RIPDA agar nampak lebih menarik untuk dikunjungi. Dengan terselenggaranya kegiatan kepariwisataan dan pembenahan destinasi tersebut diharapkan mampu menarik hati calon wisatawan untuk datang melihat kegiatan tersebut dan juga mau mengunjungi destinasi-destinasi lainnya yang berada di Kabupaten Barru.

Keberhasilan dalam pembangunan dan pengembangan kepariwisataan daerah bukan hanya dinilai dari banyaknya bangunan yang direvitalisasi hingga pembuatan/pembukaan wisata baru namun lebih dari pada itu juga tidak luput dari peranan sumber daya manusianya. Dari rancangan program pembangunan pariwisata daerah lebih diarahkan pada pembenahan fisik semata, hal ini baik dilakukan namun akan menjadi suatu persoalan tersendiri pada masa yang akan datang apabila tidak disertai dengan kesiapan sumber daya manusianya. Pembangunan pariwisata daerah seyogyanya diiringi dengan pembangunan Sumber daya manusia, karena manusia sebagai penggerak majunya kepariwisataan daerah.

Dalam melaksanakan fungsi dan peranannya dalam pengembangan pariwisata daerah, pemerintah daerah atau Dinas Kebudayaan Pariwisata Daerah Kabupaten Barru yang bertanggung jawab dalam mengembangkan potensi

pariwisata di daerah, telah menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan. Fasilitas-fasilitas guna penunjang wisata tersebut merupakan langkah untuk mendukung jenis kegiatan wisatanya.

Sarana dan prasarana yang dapat mendukung objek wisata di Kabupaten Barru masih kurang seperti transportasi dari pusat kota menuju objek wisata, tempat penginapan untuk wisatawan dan sarana informasi. Hal tersebut dapat dikatakan masih minimnya fasilitas yang ada di objek wisata tapanuli utara, padahal dengan adanya fasilitas yang mendukung dapat membantu pengembangan dalam meningkatkan pendapatan operasional pada objek wisata Kabupaten Barru. Pengembangan objek wisata tersebut, ada beberapa hambatan seperti dana untuk pengembangan wisata, hal ini terlihat dari belum diperbaikinya kondisi jalan ada yang rusak, belum dibangunnya taman-taman bermain disekitar objek wisat serta fasilitas-fasilitas umum lainnya.

Pearce, 1998 (dalam Pitana dan Gayatri, 2005) berpendapat, wisatawan dalam melakukan perjalanan wisata termotivasi oleh beberapa faktor yakni: Kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, prestise, dan aktualiasasi diri. Sedangkan Jackson, 1989 (dalam Pitana dan Gayatri, 2005:62) melihat bahwa faktor penting yang menentukan permintaan pariwisata atau dorongan untuk berwisata berasal dari komponen daerah asal wisatawan antara lain, jumlah penduduk (population size), kemampuan finansial masyarakat (financial means), waktu senggang yang dimiliki (leisure time), sistem transportasi, dan sistem pemasaran pariwisata yang ada.

Membicarakan tentang pengembangan objek wisata tidak terlepas

dari peranan pemerintah khususnya dinas pariwisata sangat tidak asing lagi bagi kehidupan kita. Peran pemerintah yang sangat penting terutama dalam melindungi wisatawan dan memperkaya atau mempertinggi pengalaman perjalanannya. Peraturan pemerintah dan undang-undang yang berlaku mutlak dilaksanakan oleh pemerintah. Didalam pengembangan pariwisata harus merupakan pengembangan yang berencana secara menyeluruh, sehingga dapat diperoleh manfaat yang optimal bagi masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial dan *cultural*. Perencanaan tersebut harus mengintegrasikan pengembangan pariwisata kedalam suatu program pembangunan ekonomi, fisik, dan sosial dari suatu negara. Di samping itu, rencana tersebut harus mampu memberikan infrakstruktur, management dan keamanan yang baik dalam proses pengembangan pariwisata guna terciptanya suatu objek pariwisata yang mempunyai daya tarik dan daya jual baik di dalam negeri dan luar negeri.

Potensi Pariwisata dapat dipakai untuk mendukung macam-macam kegiatan ekonomis, menciptakan lapangan pekerjaan baru, memperoleh devisa yang dibutuhkan bagi pembangunan daerah dan masih banyak lagi. Kawasan Pariwisata yang ada di Kabupaten Barru merupakan potensi yang sangat besar jika pemerintah daerah mau mengerjakan dan mengembangkan dengan cara yang benar dan konsisten, melainkan juga serius dalam menggarapnya segala potensi melalui kebijakan-kebijakan yang memang benar sebagai upaya pembangunan ekonomi bagi Kabupaten Barru.

Pengembangan objek wisata hendaknya dilakukan dengan lebih fokus melalui penataan dan pengembangan berbagai objek pariwisata secara gradual

dan sistematis, dengan melengkapi segala fasilitas pendukungnya. Harus diakui bahwa fasilitas penunjang dan daya tarik berbagai objek wisata di Kabupaten Barru belum seluruhnya dalam kondisi baik, khususnya aksesibilitas menuju ke berbagai objek wisata yang ada, sebagian besar dalam kondisi yang kurang baik. Selain itu terbatasnya sarana transportasi, baik kualitas maupun kuantitas dapat menghambat mobilitas wisatawan menuju objek wisata, serta masih kurangnya informasi tentang konstelasi objek wisata yang ada. Selain itu belum meratanya pembenahan sarana dan prasarana disetiap objek wisata yang dapat menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke objek wisata tersebut. hal itu disebabkan karena pemerintah daerah masih berfokus pada obyek wisata yang iunggulkan saja.

Kosentrasi untuk pengembangan objek-objek wisata di Kabupaten Barru di lakukan dengan mengembangkan objek wisata yang sudah punya nama atau sudah dikenal banyak orang seperti Ujung Batu dan Taman Wisata Padongko yang dikelola melauai dana APBD Kabupaten Barru sedangkan hanya satu objek wisata yang telah berkontribusi terhadap PAD yaitu Pantai Ujung Batu.

Dari sekian banyak potensi pariwisata di kabupaten Barru hanya dua objek saja yang dikembangkan secara maksimal hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam hal ini belum maksimal. Dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran wisata dan pemberian pembekalan, sosialisasi atau keterampilan untuk mengelolah tempat wisata.

Perlunya upaya pengembangan objek wisata di Kabupaten Barru, agar dapat bermanfaat lebih optimal, dapat memberikan pendapatan tambahan bagi

masyarakat setempat yang berusaha disektor wisata tersebut. Objek wisata di Kabupaten Barru masih banyak sarana dan prasana yang masih kurang sehingga dapat dikatakan prasarana dan sarana pariwisata belum memadai.

Di Kabupaten Barru, pengembangan sektor pariwisata mulai menampakkan kemajuan yang ditunjang dari beberapa peran pemuda lokal baik dalam pengelolaan objek pariwisata secara langsung maupun dalam mempromosikan lewat media sosial, fanpage maupun website. Kegiatan kepemudaan seperti itu membutuhkan perhatian dan dukungan pemerintah sebagai sebuah upaya berkesinambungan oleh pemerintah daerah Kabupaten Barru dan kreatifitas pemuda Barru untuk memperkenalkan pariwisata Kabupaten Barru (Masdy dkk, 2017).

Pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang sangat berperan penting dalam mengembangkan suatu objek wisata, mengingat bahwa objek wisata di Kabupaten Barru mempunyai potensi yang sangat besar dalam menumbuhkan perekonomian dan pendapatan daerah.

Agar pengembangan wisata bahari di Desa Madello dapat sukses maka dapat dilihat dari berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah desa dalam membentuk desa wisata seperti halnya :

- 1) Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) bisa dilakukan melalui pendidikan, pelatihan dan keikutsertaan dalam seminar, diskusi, dan lain sebagainya serta di bidang-bidang kepariwisataan. Menurut hasil wawancara dengan dengan salah satu staf kantor Desa Madello dengan membuat abon ikan yang ada di desa Madello dilakukan pendidikan

atau pelatihan untuk membuat kreasi abon ikan yang enak, lezat dan bernilai ekonomis tinggi.

- 2) Kemitraan atau kerja sama dapat saling menguntungkan antara pihak pengelola desa wisata dengan para pengusaha pariwisata di kota atau pihak pembina desa wisata dalam hal ini pihak dinas pariwisata daerah. Bidang-bidang usaha yang dikerjakasamakan antara lain seperti bidang akomodasi, perjalanan, promosi, pelatihan, dan lain-lain. Hasil wawancara dengan bapak Harianto adanya desa wisata saling menguntungkan antara masyarakat dan untuk memajukan pariwisata daerah setempat dan membuat bangga masyarakat desa Madello hanya saja dalam tahap pengelolaanya belum maksimal.
- 3) Kegiatan pemerintahan di desa. Kegiatan dalam rangka desa wisata yang dilakukan oleh pemerintah desa, antara lain seperti rapat-rapat dinas, pameran pembangunan, dan upacara hari-hari besar diselenggarakan di desa wisata.
- 4) Promosi Desa wisata harus sering dipromosikan melalui berbagai media. promosi yang dilakukan untuk desa wisata menggunakan media sosial, namun hal ini belum maksimal sebab desa Madello belum memiliki website resmi dalam mempromosikan destinasi wisatanya, promosi wisata di desa madello kebanyakan dilakukan langsung oleh wisatawan melalui *Mouth of Mouth* atau postingan foto di sosial media.
- 5) Festival/pertandingan. Untuk event wisata belum dilakukan, hal ini karena adanya keterbatasan Sumber daya manusia di desa Madello.

Meskipun begitu pemerintah desa telah melakukan beberapa upaya untuk berbenah diri.

- 6) Membina organisasi masyarakat. Seperti komunitas nelayan, ibu-ibu di kampung KB dan komunitas UMKM di Desa Madello untuk memajukan desa wisata mereka.

Model pemberdayaan perempuan di desa Madello Kecamatan Balusu dilakukan melalui pendidikan komunitas wirausaha jasa kuliner UMKM pembuatan Abon ikan. Ketersediaan potensi lingkungan dan sumber daya alam menjadi motivasi bagi komunitas dalam meningkatkan diri secara mandiri. Dengan potensi lokal yang beranekaragam dapat, jika komunitas dapat memanfaatkan dan mengolahnya secara optimal, maka akan meningkatkan keberhasilan dalam pemberdayaan perempuan.

Model pemberdayaan perempuan di desa Madello dilakukan dengan Langkah-langkah kegiatan pendidikan berbasis komunitas dilakukan dengan penerapan pendekatan partisipatif. Pendekatan partisipatif, yakni dengan memanfaatkan pengalaman-pengalaman peserta pelatihan sebagai sumber belajar untuk terlibat dalam kegiatan pelatihan.

Metode penyelenggaraan pelatihan menggunakan pola individual dan kelompok. Pelatihan dibagi dalam kelompok besar dengan jumlah 25 orang. Sedangkan pada saat praktik, warga belajar dibagi dalam kelompok kecil yang terdiri dari 5 anggota kelompok. Teknik yang digunakan meliputi: ceramah, tanya jawab, curah pendapat, diskusi, demonstrasi, simulasi, praktek, dan penugasan.

Kegiatan pelatihan ini terdiri dari 3 tahapan, yaitu: 1) Pendahuluan, meliputi: bina suasana, motivasi, dan persepsi. 2) Kegiatan inti: penyampaian materi, pengenalan alat dan bahan, prosedur praktek, praktek, dan mentoring (pendampingan). 3) Penutup, yaitu mereview dan membuat kesimpulan dari hasil pelatihan.

Setiap kegiatan pelatihan dan pendidikan memberikan dampak dan hasil bagi pesertanya. Melalui kegiatan ini diperoleh informasi sebagai berikut; menambah motivasi peserta dalam melakukan usaha jasa kuliner berbasis kelompok-kelompok. Peserta berusaha lebih memahami cara memelihara pelanggan, cara mengelola usaha yang lebih produktif, memiliki keterampilan dalam memberikan layanan pada pelanggan dan memiliki keterampilan dalam mengembangkan usahanya. Salah satu pengetahuan pengalaman yang diperoleh adalah menyusun standar operasional paket-paket menu dan variasi harganya. Secara sederhana dapat dinyatakan bahwa hasil dari penerapan model perberdayaan perempuan melalui pendidikan berbasis komunitas wirausaha jasa kuliner pembuatan abon ikan ini memberikan dampak; memberikan motivasi dalam mengelola usaha, dimilikinya pengetahuan dan keterampilan dalam mengelola usaha lebih produktif dan memperluas akses sesuai dengan potensi yang dimiliki.

Pendidikan berbasis komunitas wirausaha jasa kuliner dimaksudkan untuk memberikan penguatan dalam kegiatan wirausaha jasa kuliner sebagai upaya meningkatkan taraf kehidupan masyarakatnya.

Pendidikan berbasis masyarakat adalah sebuah proses yang didesain

untuk memperkaya kehidupan individual dan kelompok dengan mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, atau berbagai mengenai kepentingan umum, untuk mengembangkan dengan sukarela tempat pembelajaran, tindakan, dan kesempatan refleksi yang ditentukan oleh pribadi, sosial, ekonomi dan kebutuhan politik mereka.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa : Sektor pariwisata mampu menghasilkan berbagai jenis usaha yang terkait dengan pariwisata yang dapat dimanfaatkan oleh tenaga kerja baik laki-laki maupun perempuan. Meskipun pekerja perempuan telah banyak terlibat dalam berbagai kegiatan di sektor pariwisata karena masalah gender mereka sering dianggap tidak mampu untuk bekerja pada ruang publik sehingga terjadi berbagai diskriminasi dan subordinasi yang terpinggirkan yang ditemukan ketika mendapatkan upah atau gaji, tetapi perempuan terkonsentrasi pekerja dengan jenis pekerjaan manual yang tidak memerlukan pendidikan dan keterampilan yang tinggi. Potensi perempuan sebagai bagian dari pembangunan nasional tidak dapat dipungkiri lagi, terutama di sektor pariwisata. Peran ganda pekerja perempuan menjadi dilema, di satu sisi sebagai ibu rumah tangga yang harus menyelesaikan urusan rumah tangga dan di sisi lain harus profesional untuk meniti karirnya.

Kemampuan seorang perempuan pesisir dalam beraktifitas akan menentukan besaran hasil yang didapatkan, begitu pula sebaliknya. Secara umum perempuan pesisir memiliki kemampuan atau skill yang relatif rendah. Sebagai seorang istri nelayan, aktifitas yang dilakukan hanya sebatas melakukan transaksi jual beli ikan secara manual, gelondongan, mentahan. Tidak ada inisiatif untuk mengolah ikan itu menjadi sesuatu yang lebih mahal

dari sekedar dijual mentahan yang seharusnya mendapatkan hasil berlipat. Hal ini dilakukan secara monoton dan terus menerus sesuai dengan tradisi yang telah ada dari para leluhurnya.

Sebagian besar para ibu-ibu rumah tangga yang ada di Desa Madello memiliki pendidikan yang rendah dengan modal keterampilan yang kurang. Sebagian besar para istri yang ada di Desa Madello hanya sebagai ibu rumah tangga biasa yang sehari-harinya mengurus anak, melayani suami, memasak, membereskan rumah dan sebagainya, walaupun ada perempuan yang memiliki pekerjaan itu hanya sebagian kecil saja dan biasanya hanya mendapatkan penghasilan rendah sehingga perempuan yang ada di Desa Madello masih sangat tertinggal dari daerah lain yang sudah sadar akan pentingnya motivasi kesetaraan gender dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Adapun faktor-faktor yang menjadi kendala bagi perempuan yang ada di Desa Madello untuk ikut dalam berbagai kegiatan publik yaitu: 1) Konstruksi sosial ataupun nilai-nilai budaya, 2) Nilai-nilai patriarkhi, paham patriarkhi tidak berbeda jauh dari adanya nilai-nilai budaya yang telah berhasil memetakan pola pembagian tugas antara perempuan dan laki-laki, 3) Rendahnya pendidikan dan kurangnya modal keterampilan, 4) Kurangnya modal ataupun lahan, 5) Kurangnya dukungan atau bantuan dari pemerintah, 6) Nilai-nilai agama, dalam agama islam hampir sebagian besar orang-orang yang fanatik menganggap bahwa perempuan itu tugasnya di dalam rumah yang hampir sama dengan konsep konstruksi sosial, 7) Strata Sosial, ini pun

terkadang menjadi penghambat bagi perempuan yang ada di Desa Madello untuk ikut berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan publik.

B. Saran

Adapun saran untuk penelitian ini agar lebih baik kedepannya sebagai berikut;

1. Memudahkan perempuan pesisir memasarkan produk kerajinannya. Tempat khusus seperti toko atau outlet souvenir yang merupakan tujuan utama wisatawan perlu dibangun di lokasi wisata pantai Ujunge dan Pulau Pannikiang , selain itu juga tetap melakukan promosi dengan memanfaatkan teknologi secara online (media sosial).
2. Membentuk kelembagaan atau kelompok perempuan pesisir pengrajin limbah hasil perikanan, sehingga mempermudah dalam melakukan pinjaman ke pihak bank maupun kerjasama promosi dan pelatihan-pelatihan bersama dinas terkait.
3. Pemerintah daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan hendaknya mampu memberdayakan perempuan pesisir dengan memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan sehingga tepat sasaran. Perempuan pesisir pengrajin limbah hasil perikanan perlu diberikan pelatihan kreatifitas maupun pelatihan menggunakan teknologi terbaru (modern) serta pendampingan secara rutin kepada sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat sekitar.
4. Perempuan lebih diberi ruang pengambilan keputusan dan aktualisasi diri yang lebih luas dalam setiap pengaturan strategi dan implementasi

kepariwisataan di Desa Madello. Hal tersebut dalam rangka mencapai kesetaraan gender yang diinginkan dan lebih mengoptimalkan peran laki-laki dan perempuan masyarakat setempat.

DAFTAR PUSTAKA

- Afrina, Eka, Herni Ramdlaningrum, Pihri Buhaerah, Tedy Setiadi, and Dia Mawesti. 2019. *Praktik Baik Pelatihan Vokasi Di Indonesia: Studi Kasus Tiga Balai Latihan Kerja Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Dan Swasta*. Perkumpulan PRAKARSA.
- Amrawaty, A.A., Hasani, dan H.M.Chasyim. 2009. *Strategi Penguatan Kelembagaan pada Usaha Wanita Nelayan di Kabupaten Takalar Propinsi Sulawesi Selatan*, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Hasanuddin University, Makassar
- Andani, F. 2017. Peran Perempuan dalam Kegiatan Pariwisata di Kampung Tebing, Okura, Pekanbaru. JOM FISIP, Vol.4. 1–11.
- Anonim.2001. *Panduan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan*, CIDA-Kementerian Pemberdayaan Perempuan RI- WSP II. Jakarta
- Aprillia Theresia, dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta
- Arjana, Bagus Gusti. 2016. *Geografi Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif*. Jakarta: Rajawali Pers
- Bengen, D.G. 2001. *Pengelolaan Sumberdaya Wilayah Pesisir Secara Terpadu, Berkelanjutan dan Berbasis Masyarakat*. Makalah pada Sosialisasi Pengelolaan Sumberdaya Berbasis Masyarakat. Bogor, 21-22 September
- Boelaars, Yan. 1984. *Kepribadian Indonesia Modern: Suatu Penelitian Antropologi Budaya*. Jakarta: Gramedia
- Demartoto, Argryo. 2012. *Pemberdayaan Perempuan Dalam Pariwisata Berbasis Komunitas (studi kasus di iga desa wisata di Jawa Tengah)*. Surakarta: Skripsi Universitas Sebelas Maret
- Dewi, D. A. L., 2015. *Peran Ibu Rumah Tangga dalam Perekonomian Keluarga Studi Kasus di Desa Gunem Kabupaten Rembang*
- Edi Suharto. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Elizabeth, Misbah Zulfa. 2015. *Antropologi Kajian Budaya dan Dinamikanya*. Semarang : CV. Karya Abadi Jaya.
- Fakih, M. 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Hairurrozi, Lalu. 2019. "Wisata Budaya Dan Kesejahteraan." *KOMUNITAS* 10(1):75–94. doi: 10.20414/komunitas.v10i1.1165.
- Hermawan, Hary . 2016. *Dampak Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Terhadap Ekonomi Masyarakat Lokal*. Jurnal Pariwisata, Vol. III No. 2 September
- <https://docplayer.info/62865490-Pemberdayaan-perempuan-dalam-pengembangan-pariwisata.html>
- <https://womentourism.id/id/post/62-partisipasi-perempuan-dalam-ekowisata-tantangan-dan-peluang-menuju-kesetaraan-gender-di-sektor-pariwisata-indonesia>
- <https://www.researchgate.net/publication/348456965> KESESUAIAN DAN DAYA DUKUNG EKOSISTEM MANGROVE UNTUK PENGEMBANGAN EKOWISATA DI PULAU PANNIKIANG KABUPATEN BARRU SULAWESI SELATAN
- Indriyati, Nugrahani, Gunawan, Bahrum, dan Purwanti. 2009. Laporan Ibm Kelompok Perempuan Usaha Pengolahan Makanan Hasil Laut di Pesisir Pantai Parangtritis Kabupaten Bantul (Hibah IbM Pengabdian Dikti)
- Indrawasih. B. N. 2001. *Mobilitas Sosial Rumah Tangga Nelayan Dalam Meningkatkan Taraf hidupnya di daerah Pariwisata Pantai*. (Studi Kasus pantai PangandaranInstitut Pertanian Bogor
- Khumaini, Asnan. 2002. "Pengembangan Kepariwisata (Studi Efektivitas Pengembangan Kepariwisata Di Obyek Wisata Gua Maharani Kabupaten Lamongan) / Oleh Asnan Khumaini." *Pengembangan Kepariwisata (Studi Efektivitas Pengembangan Kepariwisata Di Obyek Wisata Gua Maharani Kabupaten Lamongan) / Oleh Asnan Khumaini* 2002(2002):1–99.
- Kusnadi, dkk. 2006. *Perempuan Pesisir*. Yogyakarta : Lkis
- Lingga, Osland Herijon. 2021. "Pengembangan Potensi Wisata Kuliner Berbasis Kearifan Lokal Di Desa Tongging Kecamatan Merek Kabupaten Karo Sumatera Utara." *Jurnal Akademi Pariwisata Medan* 9(1):27–35. doi: 10.36983/japm.v9i1.103.
- Manwa, H. 2007. *Enhancing Participation Women in Tourism*. Dalam Giana Moscardo (ed). *Building Community Capacity for Tourism Development*, London CABI. 116–122.
- Masdy, Nur Aina dkk. 2017. *Peran Pemerintah Daerah Terhadap Pemberdayaan Pemuda Dalam Pengembangan Sektor Pariwisata di Kabupaten Barru Pantai Ujung Batu*. Makassar: Jurnal analisis.
- Megawangi, Ratna. 1999. *Membiarkan Berbeda Sudut Pandang tentang Relasi*

Gender. Bandung : Mizan.

- Muljadi. 2010. *Kepariwisata dan Perjalanan*. Jakarta:Raja Grafindo
- Mu'tamaroh, Nadzifatul, and Yuni Pantiwati. 2020. "Implementasi Kebijakan 'Segregasi' Kelas Berbasis Gender Di SMP Islam Al-Maarif 01 Singosari." *Jurnal Kebijakan Dan Pengembangan Pendidikan* 7(1). doi: 10.22219/jkpp.v7i1.12040.
- Moleong, L.J., 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Monica, A. R. 2018. "*Sikap Warga Terhadap Partisipasi Perempuan Pemilik Usaha Pariwisata berdasarkan Pengukuran Women Owned and Operated Tourism Businesses (WOOTB)*". *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Muliawan, H. 2008. *Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat Konsep dan Implementasi*. tanpa kota: tanpa penerbit
- Nilakusumawati, D. P. E. 2009. *Kajian Aktivitas Ekonomi Pelaku Sektor Informal di Kota Denpasar (Studi Kasus Wanita Pedagang Canang Sari)*. *Jurnal PIRAMIDA*. Volume V No.2 Desember 2009.
- Pedoman Umum PNPM Mandiri Perkotaan.2009. Departemen Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Cipta Karya
- Pitana, I G. dan Gayatri, P G. 2005. *Sosiologi Pariwisata*. Yogyakarta:Penerbit Andi
- Pratiwi, dkk. 2017. *Disparitas Gender dalam Pembangunan Pariwisata Ramah Lingkungan*. Palastren, Vol. 10. 1-22.
- Priasukmana, Soetarso & R. Muhamad Mulyadin 2001. *Pembangunan Desa Wisata : Pelaksanaan Undang-undang Otonomi Daerah*. Info Sosial Ekonomi. Vol.2 No
- Primadany, Sefira Ryalita. Mardiyono. Riyanto. 2012. *Analisis Strategi Pengembangan Pariwisata Daerah (Studi Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Daerah Kabupaten Nganjuk*. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No. 4, 137
- Puspitawati, H. 2012. *Gender dan Keluarga: Konsep dan realita di Indonesia*. ISBN: 978- 979-493-000-0. Bogor : IPB Press (Jurnal).
- Radel, C. A. 2012. *Outcomes of Conservation Alliances with Women's Community-Based Organizations in Southern Mexico*. *Society & Natural Resources*, Vol. 25 Issue 1, p52-70.

- Rahayu, A. T. 2017. *Gambaran Tingkat Berdaya Perempuan Pada Sektor Pariwisata di Desa Wisata Pentingsari Berdasarkan Pengukuran RETS*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Remiswal, 2013. *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Scheyvens, R. 2000. *Promoting Women's Empowerment through Involvement in Ecotourism: Experiences from the third world*. *Journal of Sustainable Tourism*, 235–249
- Shiva, Vandana. *Pemiskinan terhadap Lingkungan: Perempuan dan Anak yang Jadi Korban*. Dalam Shiva, V. dan Mies, M. 2005. *Ecofeminism: Perspektif Gerakan Perempuan dan Lingkungan*. Yogyakarta: IRE Press
- Sharpley, R., Telfer, D. J. 2002. *Tourism development. Concepts and issues*. Cambrian printers Ltd
- Sipahaelut, M., 2010, *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*, Tesis S2 Program Magister Sains Mayor Sistem dan Permodelan Perikanan Tangkap, Departemen Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, Bogor (tidak dipublikasikan)
- Soekanto, Soerjono. 1987. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Jakarta : Rajawali
- Soemarno. 2010. *Desa Wisata*. marno.lecture.ub.ac.id/files/2012/01/Desa-wisata.doc.
- Soemarno. 2010. *Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pangan Rumah Tangga Pedesaan*. Prosiding WidyaKarya Nasional Pangan dan Gizi VI. Jakarta: LIPI.
- Sofiani Triana. 2009. *Membuka Ruang Partisipasi Perempuan dalam Pembangunan*. *Jurnal Muwazah*, (1,1), Januari – Juni, hal 63-71
- Sofyan Syukrie Erna. 2003. *Pemberdayaan Perempuan dalam Pembangunan Berkelanjutan*
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Suja, S. 2012. *Women Empowerment Through Self-Help Group- An Evaluative Study*. *Global Management Review*, Vol. 6 Issue 3, p68-82.
- Suryani, Dedeh. 2018. *Analisis Pengembangan Parawisata terhadap Kesempatan Kerja dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi di Pantai Sari Ringgung Kecamatan Teluk Pandan Kabupaten pesawaran)*, Bandar Lampung: UIN RIL.
- Suwantoro, Gamal. 2004. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Andi Offset

- Suwantoro. 1997. *Dasar-Dasar Pariwisata*. Yogyakarta : Penerbit Andi. Systematic Linkange. Gramedia: Jakarta.
- Undang-Undang No.1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.
- Undang-Undang No.6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- UNWTO. 2019. "Global Report on Women in Tourism, 2019".<https://www.e-unwto.org/doi/book/10.18111/9789284420384>
- Wachyuni, S. S. 2020. *Kinerja Pramusaji Berdasarkan Gender (Studi Kasus di Restoran Amuz Gourmet Jakarta)*. Media Wisata, Vol 18. 21–29.
- Weber, Max. 1964. *The Theory of Social and Economic Organization*. New York : Free Press (Edited by Talcott Parsons and translated by A.M. Handerson and Talcott Parsons).
- Wibowo, Sukarno. 2013. *Ekonomi Mikro Islam* . Bandung: Pustaka Setia
- Widiastuti, Arista Nur. 2018. "Perempuan Dalam Iklan Pariwisata Indonesia." *Mediator: Jurnal Komunikasi* 11(2):214–26. doi:10.29313/mediator.v11i2.3836.
- Widodo, S., H. Bustamam, dan Soengkono. 2011. *Model Pemberdayaan Ekonomi Perempuan Keluarga Nelayan Miskin melalui Penerapan Teknologi Tepat Guna Terpadu (Studi Keluarga Nelayan Di Kecamatan Pondok Kelapa Kabupaten Bengkulu Utara)*, *Majalah Ekonomi*, Tahun XXI, No. 1 April 2011
- Wilkinson, P. and Pratiwi, W.1995. *Gender and Tourism in an Indonesian village*. *Annals of Tourism Research* 22(2), 283-299.
- Wolfman, Brunetta R. 1993. *Peran Kaum Wanita*. Yogyakarta : Kanisius
- Zakaria, Faris R. D. 2014. *Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan* . *JURNAL TEKNIK POMITS* , 246-247